



BAPPEDA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**SINERGI KUAT
KINERJA HEBAT**



LAPORAN

EVALUASI CAPAIAN RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

BAPPEDA PROVINSI NTB
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya sehingga Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 sampai dengan tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Laporan evaluasi RPJMD merupakan Laporan evaluasi capaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah serta program prioritas dan program unggulan dalam 5 tahun terakhir 2019-2023 dan tingkat capaiannya terhadap target akhir RPJMD pada tahun. Laporan ini mengacu pada RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, terdapat 11 tujuan dengan 14 indikator kinerja dan 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi NTB serta 146 program prioritas dan 75 program unggulan. Sampai akhir periode pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Capaian kinerja tujuan pembangunan daerah mencapai 50% dari 14 indikator kinerja, 7 indikator memenuhi bahkan melampaui target, sedangkan 7 indikator tidak memenuhi target, sedangkan sasaran pembangunan daerah mencapai 72,97% atau terdapat 27 indikator telah sesuai bahkan melampaui target, sedangkan 10 indikator atau 27,03% tidak mencapai target.

Demikian laporan ini disusun dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja serta sebagai bahan perencanaan selanjutnya dalam pembangunan di NTB. Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta dukungan dan kontribusinya terhadap penyelesaian laporan ini. Penyusunan laporan ini tentu masih memiliki kekurangan, dan Bersama ini diharapkan saran dan kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan di masa mendatang sehingga dapat lebih baik dan informatif.

Mataram, 2024
KEPALA BAPPEDA PROVINSI NTB

Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19651231 199403 1 153

RINGKASAN

Laporan Evaluasi Capaian RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 disusun sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dimana pemerintah provinsi NTB dalam melakukan pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah harus mengetahui progres dan tingkat capaian secara berkala serta capaian akhir terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Evaluasi ini mengacu hasil capaian pembangunan dalam 5 tahun terakhir periode 2019-2023. Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, terdapat 11 tujuan pembangunan dengan 14 indikator kinerja dan terdapat 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja. Dari sasaran tersebut, kemudian dijabarkan kedalam 10 program strategis, 75 program unggulan, dan 145 program pembangunan daerah.

Hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa dari 37 indikator kinerja utama yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Capaian kinerja tujuan pembangunan daerah mencapai 50% dari 14 indikator kinerja, 7 indikator memenuhi bahkan melampaui target, sedangkan 7 indikator tidak memenuhi target, sedangkan sasaran pembangunan daerah mencapai 70,27% atau terdapat 26 indikator telah sesuai bahkan melampaui target, sedangkan 11 indikator atau 29,73% tidak mencapai target.

Tujuan pembangunan daerah yang memenuhi bahkan melampaui target akhir RPJMD 2019-2023 yaitu Indeks Aksesibilitas, Indeks Kesehatan, Indeks Kriminalitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pendidikan, Pertumbuhan Industri, dan Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), sedangkan yang tidak tercapai sesuai target akhir adalah Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, Neraca pengelolaan sampah, Indeks Daya Beli, Tingkat Kemiskinan (%), Partisipasi politik masyarakat, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Adapun sasaran pembangunan daerah yang memenuhi bahkan melampaui target akhir RPJMD 2019-2023 yaitu Indeks Kapasitas Daerah, Persentase

Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi publik, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Indeks Profesionalisme ASN, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita *Stunting*, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik social, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Sedangkan sasaran pembangunan yang tidak tercapai adalah persentase kemantapan jalan, cakupan rumah layak huni (RLH), indeks kualitas tutupan lahan, pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum), pengeluaran per kapita, nilai SAKIP, indeks pelayanan publik, persentase penanganan sampah, pertambahan nilai PDRB sektor industri pengolahan, persentase pengurangan sampah, serta persentase penurunan konflik sosial

Indikator Kinerja Daerah (IKD) juga sebagai dasar dalam melakukan evaluasi atau menilai keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB dari kondisi awal sampai akhir periode RPJMD. Terdapat 103 Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang dikelompokkan pada 3 aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum. Sampai dengan akhir periode RPJMD pada tahun 2023, capaian pada 3 aspek tersebut sebagai berikut:

1. Pada aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat capaiannya sebesar 60,0%. Terdapat 3 indikator yang sesuai bahkan melampaui target yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan indikator yang belum tercapai yaitu penurunan kemiskinan dengan target akhir sebesar 11,92% dengan capaian 13,85%. sedangkan untuk pengurangan tingkat ketimpangan pengeluaran (gini ratio) ditarget akhir sebesar 0,297 dengan capaian sampai 2023 sebesar 0,375.
2. Pada aspek daya saing daerah dari 7 indikator kinerja, terdapat 3 indikator tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sedangkan 4 indikator yang tidak memenuhi target yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang

sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik

3. Pada aspek pelayanan umum, dari 91 indikator kinerja, terdapat 61 indikator tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 30 indikator tidak mencapai target. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Persentase PMKS yang tertangani, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB), Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana), Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Nilai Realisasi Investasi, Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pertumbuhan sektor pariwisata (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik, Persentase Balita Stunting, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas, Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Kapasitas Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Indeks Kualitas Air, Indeks Kesehatan, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Rata-rata Lama Sekolah, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan, Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Indeks Profesionalisme ASN, Angka Harapan Hidup, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Persentase konektivitas transportasi publik, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase Koperasi Aktif, Cakupan Air Minum, Indeks Kualitas Udara, Indeks Pendidikan, Ranking Nasional LPPD, Harapan Lama Sekolah, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, Proporsi wirausaha muda, Pertumbuhan Industri, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah,

Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan social, Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Nilai Tukar Petani, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Penempatan Transmigran, Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitas Pelayanan Keagamaan, Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, dan Opini BPK.

Adapun indikator yang tidak tercapai meliputi: Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB, Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan, Nilai Tukar Nelayan, Persentase Kemantapan jalan, Indeks Daya Beli, Partisipasi Politik Masyarakat, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Indeks Kematangan Keamanan Informasi, Pengeluaran per kapita, Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi, Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR), Nilai SAKIP, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Produksi Perikanan, Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih, Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Persentase Penanganan Sampah, Neraca Pengelolaan Sampah (%), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Rata-rata Lama Menginap, Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya, Persentase Pengurangan Sampah, Angka kunjungan wisatawan, Persentase penurunan konflik social, Pertumbuhan Penduduk, dan Persentase Geosites yang Tertata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Sasaran	3
1.5 Sistematika Penulisan Laporan	3
BAB II : RPJMD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2023.....	4
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	6
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	7
2.4 Target Pembangunan Daerah	22
BAB III CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2023.....	37
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Error! Bookmark not defined.
2. ASPEK DAYA SAING DAERAH	Error! Bookmark not defined.
3. ASPEK PELAYANAN UMUM.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV : PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2 Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan mencakup Perencanaan pembangunan jangka Panjang yang disebut RPJPD, Perencanaan pembangunan jangka Menengah yang disebut RPJMD, dan Perencanaan Pembangunan tahun atau di disebut RKPD. Ukuran keberhasilan perencanaan pembangunan daerah tersebut, tidak terlepas dari pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan mengingat pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam siklus perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan informasi penting untuk membantu pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, memperbaiki dan menentukan tindaklanjut yang tepat.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dilakukan dalam rangka menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas perencanaan sehingga wajib dilakukan oleh semua daerah. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pada Pasal 276 yang mengamanatkan bahwa kepala daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerahnya. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah provinsi yang dipimpinnya serta melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah kabupaten/kota. Tatacara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
dan
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas, pelaksanaan evaluasi dilakukan pada setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019–2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program Gubernur serta Wakil Gubernur NTB periode 2019-2023 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Pada tahun 2022 ini, RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023 telah memasuki tahun keempat atau dijabarkan kedalam RKPD tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam evaluasi Capaian RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

1.3 Tujuan

Tujuan dari kegiatan evaluasi RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pencapaian pembangunan sampai tahun 2022 dan terhadap target akhir RPJMD pada tahun 2023.

1.4 Sasaran

Sasaran dari kegiatan evaluasi RPJMD tahun 2019-2023 ini adalah untuk mengukur capaian tujuan dan Sasaran Pembangunan yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

1.5 Sistimatika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Evaluasi RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dilakukan dengan sistimatika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan, sasaran, dan sistimatika penulisan laporan;
- Bab II : RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023;
- Bab III : Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022.
- Bab IV : Penutup

BAB II

RPJMD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019-2023

RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Dalam Pelaksanaan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yang telah berlangsung hampir dua tahun, terjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis, disertai munculnya wabah Pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi, sosial budaya dan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, adanya beberapa pertimbangan perlunya dilakukan penyesuaian atau perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 diantaranya:

1. Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan di Provinsi NTB, terjadi tuntutan masyarakat dan kondisi pembangunan yang sangat dinamis, sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap indikator kinerja, indikator program, strategi, kebijakan dan program prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan.
2. Terjadinya wabah Pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada perubahan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
3. Perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
4. Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
5. Adanya catatan dari hasil review Kementerian PANRB yang dituangkan ke dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

Perubahan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 264 ayat 5) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Pasal 342), mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap dokumen RPJMD sebagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.

Perubahan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 hampir semua isinya mengalami penyesuaian, kecuali Visi dan Misi Pembangunan saja yang tidak mengalami perubahan, sedangkan Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas dan Program Unggulan serta indikator target-target pembangunan dilakukan penyesuaian. Perubahan RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023.

2.1 Visi dan Misi

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah “Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”, Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 -2023 sebagai berikut:

Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah;

Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi;

Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah;

Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;

Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi;

Misi 6 “NTB ADIL DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Adapun tujuan pembangunan NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan
9. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
10. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
11. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatnya Profesionalisme ASN.
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.

22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan daerah, maka strategis dan arah kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah						
1	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	1.1	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	1	Peningkatan Upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana
2	Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	2.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	1	Peningkatan kemantapan jalan	Meningkatkan ketersediaan dan layanan infrastruktur jalan dan jembatan dalam kawasan strategis
				2	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian	Meningkatkan, memelihara dan membangun jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian modern
				3	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku	Meningkatkan, memelihara dan membangun infrastruktur air baku
		2.2	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1	Peningkatan perhubungan antar wilayah yang berkualitas	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan Mendorong integrasi Konektivitas dalam wilayah dan koneksi antar wilayah
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi						

	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Tata kelola keuangan daerah, Asistensi Laporang Keuangan Daerah, koordinasi unsur pendukung pengelolaan keuangan dan Menjamin penyusunan LKPD tepat waktu
		1.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Peningkatan Kemandirian Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan
		1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Meningkatkan konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan menerapkan perencanaan berbasis elektronik
						Mendorong perencanaan yang berorientasi kepada hasil (outcome) yang terukur dan relevan
				2	Penguatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
				3	Peningkatan dan Penguatan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme APIP
				4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan
						Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja

	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
						Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan
		1.4	Meningkatnya Profesionalisme ASN	1	Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur
						Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN
				2	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN berbasis Sistem Merit	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi serta Manajemen Kinerja dan Disiplin dengan Menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian yang Terintegrasi
				3	Peningkatan Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional, dan Sertifikasi	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur
		1.5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	1	Peningkatan standarisasi Pelayanan Pada Unit Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
						Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan
						Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik
				2	Peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Memanfaatkan sistem informasi untuk transparansi dan penyediaan pelayanan publik berbasis elektronik
		Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah				

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	1.1 Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	1 Peningkatan Kualitas Kesehatan Keluarga	Meningkatkan kualitas pelayanan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak sekolah, remaja, dan lansia
			2 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Tidak Menular	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan tenaga kesehatan dalam pencegahan, dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan
			3 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan	Meningkatkan kapasitas Tim Kesehatan dan sarana prasarana penanggulangan bencana dan masalah kesehatan
			4 Peningkatan Akses dan Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang bermutu dan terstandar	Meningkatkan luasan fasilitas kesehatan yang terstandar
				Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan
			5 Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan gizi masyarakat
			6 Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatkan layanan Posyandu yang unggul dan berkualitas
				Mengembangkan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat

	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
2	Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	2.1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Peningkatan Pemerataan Pendidikan	Meningkatkan Akses pendidikan yang berkeadilan dan terjangkau
				2	Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan	Mewujudkan pemerataan penyebaran, ketercukupan dan peningkatan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga kebudayaan
						Mendorong penggunaan Teknologi Informasi dalam pendidikan
						Mengirim seribu putra/putri NTB sekolah ke luar negeri
						Memfasilitasi keminatan siswa melalui Program "Ayo Bercita-cita"
						Memfasilitasi pelatihan TOEFL/IELT bagi putra/putri NTB yang akan melanjutkan sekolah ke Luar negeri
						Melakukan Reengineering SMK
3	Peningkatan kualitas data dan tingkat literasi masyarakat	Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas				
4	Peningkatan pembinaan Pemuda dan olah raga Berprestasi	Meningkatkan kapasitas atlet dan pelatih				
		Meningkatkan ketersediaan sarana olahraga				
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan						
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	1.1	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1	Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai, danau, laut, dan sumber air	Menurunkan beban polusi udara dan pencemaran air pada sektor industri,

	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
						transportasi, masyarakat dan pemerintahan
				2	Peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat	Penguatan peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan
				3	Peningkatan upaya perlindungan dan pengawasan sumberdaya pesisir, laut dan Pulau-pulau kecil melalui penegakan aturan dan partisipasi kelompok masyarakat pengawas	Menguatkan regulasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil
				4	Peningkatan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K
		1.2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah	Meningkatkan kinerja pengurangan dan penanganan sampah
				2	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
				Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi		
1	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	1.1	Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha	1	Optimalisasi manfaat destinasi unggulan dan kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA, dll.) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan
		1.2	Meningkatnya produksi Sektor Primer	1	Peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan kawasan berbasis pertanian	Adopsi teknologi budidaya untuk meningkatkan produksi pertanian dan Pengembangan produk pertanian
						Meningkatkan kapasitas SDM pertanian

	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
				2	Peningkatkan produksi dan pengelolaan hasil peternakan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas peternakan
				3	Pengembangan pengelolaan dan budidaya perikanan	Mengembangkan budidaya perikanan potensial yang memberikan nilai tambah
				4	Peningkatan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Mengembangkan potensi sumber daya hutan berbasis industrialisasi
		1.3	Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	1	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan	Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin
		1.4	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	1	Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Usulan Ketahanan Pangan)	Mendorong Peningkatan Keragaman Ketersediaan Dan Konsumsi Pangan Serta Kualitas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
		1.5	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	1	Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak	Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
						Meningkatkan kualitas air minum perkotaan dan perdesaan
				2	Penyambungan listrik murah dan hemat	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang tersambung listrik
				3	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan layak huni	Diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan
		4	Mendorong penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman	Diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana dasar		

	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
						lingkungan permukiman
		1.6	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	1	Pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok	Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang-barang kebutuhan pokok
		1.7	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	1	Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perdagangan daerah Meningkatkan keamanan dan kenyamanan perdagangan daerah
2	Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	2.1	Meningkatnya daya saing pariwisata	1	Pengembangan desa wisata dan wisata halal	Mendorong pembentukan desa wisata sesuai potensi wilayah Mengembangkan daerah wisata dengan memenuhi standar wisata halal Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata serta promosi dan pemasaran pariwisata Meningkatan kualitas atraksi pariwisata
3	Terwujudnya perindustrian yang unggul	3.1	Meningkatnya daya saing industri	1	Pengkajian dan penerapan teknologi permesinan, teknologi pengolahan pangan, teknologi digital dan industri kreatif, serta teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan (Pengembangan Science Technology Industrial Park (STIP)	Pengujian dan sertifikasi alat produksi Mengelola taman edukasi dan inkubator bisnis

	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
				2	Peningkatan daya saing produk industri	Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri permesinan
						Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UKM
						Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah
		3.2	Menurunnya pengangguran terbuka	1	Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja
						Meningkatkan efektivitas dan kontinuitas penempatan tenaga kerja
				2	Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan pengembangan kesejahteraan tenaga kerja
				Meningkatkan Pengawasan Ketenagakerjaan		
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkeadilan dan penegakan hukum yang berkeadilan						
1	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	1.1	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	1	Pembinaan lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan	Meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat
						Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya dengan menjadikan Islamic Center, Istana Dalam Loka, Asi Mbojo,

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				dan cagar budaya lainnya sebagai pusat peradaban
		1.2 Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	1 Penanganan pelanggaran PERDA melalui tindakan preventif dan represif	Melakukan Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan aparat penegak hukum
			2 Penguatan kemitraan bersama aparat penegak hukum dan masyarakat	Meningkatkan peran dan koordinasi antara Aparat Penegak Hukum, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama dalam kerangka penyelesaian masalah dengan pendekatan Restoratif Justice
				Meningkatkan Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat
			3 Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum	Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah
		1.3 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	1 Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam politik	Meningkatkan keterlibatan Masyarakat dalam politik
		1.4 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga
			2 Peningkatan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak-hak anak	Meningkatkan pemenuhan Hak anak melalui 5 Klaster KLA

Adapun program prioritas pembangunan dalam kurun waktu 2019-2023 sebagai berikut:

A. Program Strategis dan Program Unggulan Daerah

Program Strategis dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan program yang disampaikan sejak saat kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023. Program strategis dan unggulan ini merupakan wujud dari visi dan pencapaian misi yang telah disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk mengatasi permasalahan ditengah masyarakat.

Mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis serta visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka ditetapkan 10 (sepuluh) program strategis dalam pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana.
2. Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah.
3. Reformasi Birokrasi.
4. Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM.
5. Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM.
6. Pengelolaaan Lingkungan Bersih & Berkelanjutan.
7. Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif.
8. Pariwisata Andalan.
9. Industrialisasi Unggul.

Adapun program unggulan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
2. Sekolah Aman Bencana
3. NTB Terkoneksi
4. Percepatan Jalan Mantap
5. Air Bersih/Air Minum untuk Semua
6. Irigasi Cukup
7. Nusa Terang Benderang
8. SPAM Regional
9. SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
10. eNTeBe Plan/SIPD
11. NTB SDG's Center
12. Research Based Policy
13. NTB Satu Peta
14. NTB Satu Data
15. NTB Care
16. e-Pendapatan
17. NTB WTP
18. SAKIP Level A
19. Agen Perubahan
20. Manajemen Talenta
21. Revitalisasi Posyandu
22. NTB Berolahraga
23. Generasi Emas NTB
24. Jamban Keluarga/Stop BABS
25. Rumah Layak Huni
26. 1000 Cendikia/Beasiswa

27. Re-Engineering SMK
28. PAUD Holistik Integratif
29. Literasi Digital
30. Rumah Bahasa
31. NTB Juara
32. Ayo Bercita - Cita
33. NTB Hijau
34. NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah
35. Taman Asri/Indah
36. Tata Ruang Berkelanjutan
37. Pertanian Lestari/Modern
38. BUMDES Maju/Mahadesa
39. Melawan Kemiskinan dari Desa/Penangulangan Kemiskinan
40. Kampung Unggas
41. Budidaya Lobster
42. Kawasan Rumah Pangan Lestari/Pekarangan Pangan Lestari (KRPL/P2L)
43. Mall Investasi dan Pelayanan Publik
44. Ramah Investasi/Online Services
45. Revitalisasi BLK
46. KEK Mandalika
47. Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-Pulau Kecil
48. Wisata Halal dan Sehat
49. Penataan 99 Desa Wisata
50. Geopark-Cagar Biosfer Rinjani dan Tambora
51. Kawasan Samota
52. Industri Peralatan dan Permesinan
53. Industri Peternakan/ Pakan Ternak
54. Industri Motor Listrik
55. Industri Pangan dan Holtikultura
56. Industri Perkebunan
57. Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul
58. Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan
59. Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya
60. Rumah Kemasan
61. Industri Pakaian: Busana Muslim, Tenun Ikat
62. Science Technology and Industrial Park (STIPark)
63. Koperasi Berprestasi
64. UMKM Bersaing
65. Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall
66. Kampung Madani dan Sehat
67. Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid)
68. Bale Mediasi
69. Desa Bersinar
70. Kampung Digital
71. Kota Layak Anak
72. Ramah Difabel
73. Revitalisasi Islamic Center
74. Sekolah Perjumpaan

B. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah disusun sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan memperhatikan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan, maka program pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
10. Program Pengelolaan Permuseuman
11. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
14. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
15. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
16. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
17. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
18. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
19. Program Penyelenggaraan Jalan
20. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
21. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
22. Program Pengembangan Perumahan
23. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
24. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
25. Program Penanggulangan Bencana
26. Program Pemberdayaan Sosial
27. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
28. Program Rehabilitasi Sosial
29. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
30. Program Penanganan Bencana
31. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
32. Program Perencanaan Tenaga Kerja
33. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
34. Program Penempatan Tenaga Kerja
35. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
36. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
37. Program Perlindungan Perempuan
38. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

39. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
40. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
41. Program Perlindungan Khusus Anak
42. Program Pengendalian Penduduk
43. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
44. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
45. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
46. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
47. Program Penanganan Kerawanan Pangan
48. Program Pengawasan Keamanan Pangan
49. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
50. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
51. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
52. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
53. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
54. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
55. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
56. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
57. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
58. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
59. Program Pengelolaan Persampahan
60. Program Pengelolaan Hutan
61. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
62. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
63. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
64. Program Pendaftaran Penduduk
65. Program Pencatatan Sipil
66. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
67. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
68. Program Peningkatan Kerjasama Desa
69. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
70. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
71. Program Pengelolaan Pelayaran
72. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
73. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
74. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
75. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
76. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
77. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

78. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
79. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
80. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
81. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
82. Program Pengembangan UMKM
83. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
84. Program Promosi Penanaman Modal
85. Program Pelayanan Penanaman Modal
86. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
87. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
88. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
89. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
90. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
91. Program Pembinaan Perpustakaan
92. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
93. Program Pengelolaan Arsip
94. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
95. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
96. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
97. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
98. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan
99. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
100. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
101. Program Pemasaran Pariwisata
102. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
103. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
104. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
105. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
106. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
107. Program Penyuluhan Pertanian
108. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
109. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
110. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
111. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
112. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
113. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
114. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
115. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
116. Program Pengembangan Ekspor
117. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
118. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
119. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
120. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

121. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
122. Program Administrasi Umum
123. Program Penataan Organisasi
124. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
125. Program Kesejahteraan Rakyat
126. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum
127. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
128. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
129. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
130. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
131. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
132. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
133. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
134. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
135. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
136. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
137. Program Kepegawaian Daerah
138. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
139. Program Pelayanan Penghubung
140. Program Penyelenggaraan Pengawasan
141. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
142. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
143. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
144. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
145. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
146. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

2.4 Target Pembangunan Daerah

Dalam RPJMD Provinsi NTB telah ditetapkan target pembangunan yang akan dicapai dalam 5 tahun dalam kurun waktu 2019-2023 yang dikelompokkan kedalam 2 kelompok indikator kinerja yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	129,02	126,91	123,11	119,41	115,83	115,83
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	76,02	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,76	83,95	85,36	86,60	86,60
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	48,11	50,04	52,17	54,50	54,50
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	78,64	79,43	81,71	86,86	89,14	89,14
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	34,06	35,41	36,97	38,65	38,65
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)	A (80,01 - 90,00)

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,63	3,93	4,23	4,53	4,55	4,55
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	71,20	71,51	71,97	72,43	73,05	73,05
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,48	66,78	67,08	67,48	67,48
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	25,50	31,99	31,49	30,99	30,49	30,49
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	61,68	62,03	62,39	62,74	63,10	63,10
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,27	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	64,56	67,74	67,98	68,22	68,46	68,46
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	40,23	42,73	42,83	42,93	43,03	43,03
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,40	87,50	87,53	87,56	87,59	87,59
					Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	69,69	70,29	70,89	71,48	71,48

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	65,67	66,70	67,70	68,70	69,70	69,70
			Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	41,71	55,00	70,00	85,00	100,00	100,00
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
					Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	69,76	70,99	72,03	72,91	73,80	74,68	75,56	75,56
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	10.024	11.574	13.362	15.428	17.814	68.202
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,29	23,52	23,71	23,88	23,88
		Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan			%	15,05	14,63	13,75	13,88	13,42	12,77	11,92	11,92
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	85,30	85,80	86,20	86,70	87,20	87,20
				Terpenuhinya pelayanan dasar	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	75,74	76,48	78,45	80,59	80,59

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
				bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	79,36	80,1	80,91	82,46	82,46
					Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,66	99,77	99,88	99,99	99,99
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	56,35	59,50	62,65	65,80	68,95	68,95
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	1,87	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.952	11.273	11.604	11.944	11.944
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)			%	7,27	-4,59	-0,08	-0,10	1,50	3,00	4,50	4,50
				Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	117,21	116,04	122,71	129,78	137,24	137,24
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	4,57	5,50	6,50	7,50	9,00	9,00
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	164,96	160,02	166,39	173,02	179,91	179,91
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	3,35	3,30	3,19	3,17	3,17

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir (2023)
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	12,71	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	46,15	14,29	16,67	20,00	0,00	0,00
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	5,13	5,41	5,72	6,07	6,07
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	82,80	82,8	83,74	84,57	85,2	85,2
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	55,81	57,81	59,81	61,16	61,40	61,40
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47	20,47
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	40	40	60	80	100	100

B. Indikator Kinerja Daerah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7,10	3,08	4,76	1,5-2,5	2,5-3,5	3,5-4,5	4,5-5,5	4,5-5,5
2	Inflasi	%	3,70	3,16	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0
3	Tingkat Kemiskinan	%	15,05	14,63	13,75	13,88	13,42	12,77	11,92	11,92
4	Gini Ratio	Point	0,378	0,372	0,367	0,379	0,353	0,329	0,297	0,297
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	66,58	67,3	68,07	68,44	68,84	69,39	70,09	70,09
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
6	Indeks Kriminalitas	Point	18,05	17,25	16,45	15,65	14,85	14,05	13,25	13,25
7	Indeks Aksesibilitas	Point	73,69	74,6	76,02	77,14	78,56	79,84	81,17	81,17
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	56,99	75,16	57,09	67,74	67,98	68,22	68,46	68,46
9	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	%	-	-	-	88,45	89,03	89,69	90,31	90,31
10	Indeks Risiko Bencana	Point	142,90	139,40	172,18	126,91	123,11	119,41	115,83	115,83
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	CC	CC	B	B	B	BB	BB	BB
12	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,92	3,93	4,23	4,53	4,55	4,55
C	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	Pendidikan									
13	Indeks Pendidikan	Point	60,39	60,85	61,31	62,03	62,39	62,74	63,10	63,10
14	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,62	13,68	13,73	13,79	13,79

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	6,96	6,98	7,01	7,04	7,07	7,07
1.02	Kesehatan									
16	Indeks Kesehatan	Point	70,08	70,57	71,06	71,51	71,97	72,43	73,05	73,05
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73,00	75,00	77,00	80,00	83,00	83,00
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	72,62	79,36	80,10	80,91	82,46	82,46
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,07	66,48	66,78	67,08	67,48	67,48
20	Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	32,49	31,99	31,49	30,99	30,49	30,49
21	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
22	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,76	83,95	85,36	86,60	86,60
23	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	75,74	76,48	78,45	80,59	80,59
24	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	48,11	50,04	52,17	54,50	54,50
25	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0,00	0,00	9,09	18,18	27,20	27,20
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
26	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	92,37	59,50	62,65	65,80	68,95	68,95
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
27	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	5,13	5,41	5,72	6,07	6,07

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
28	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5,07	7,14	11,75	16,36	20,97	25,58	30,18	30,18
31	Indeks Kapasitas Daerah	%	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65
1.06	Sosial									
32	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	5,50	4,64	4,87	5,12	5,37	5,37
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2.01	Tenaga Kerja									
34	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,39	3,35	3,30	3,19	3,17	3,17
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
35	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	59,95	60,06	60,43	57,81	59,81	61,16	61,40	61,40
36	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,36	90,37	91,08	90,43	90,46	90,49	90,52	90,52
37	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,27	20,23	20,42	20,50	20,70	20,90	21,00	21,00
38	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	17,93	18,60	19,27	20,47	20,47
39	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10,00	40,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
2.03	Pangan									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
40	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	78,80	85,80	86,20	86,70	87,20	87,20
2.04	Lingkungan Hidup									
41	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	22,75	42,73	42,83	42,93	43,03	43,03
42	Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	88,45	87,50	87,53	87,56	87,59	87,59
43	Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	69,69	70,29	70,89	71,48	71,48
44	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	-	-	60,00	55,00	70,00	85,00	100,00	100,00
45	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	40,00	50,00	60,00	70,00	70,00
46	Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00
2.05	Pertanahan									
47	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
48	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,84	0,94	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,88
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
49	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	14,17	20,86	24,47	26,74	29,01	31,28	33,69	33,69
50	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	%	-	78,00	82,00	84,00	86,00	88,00	91,00	91,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
51	Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,17	1,13	1,08	1,04	1,00	0,95	0,95
2.09	Perhubungan									
52	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	76,7	79,43	81,71	86,86	89,14	89,14
2.10	Komunikasi dan Informatika									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
53	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	Kualifikasi	N/A	N/A	Informatif	Interaktif	Interaktif	Transaksi	Kolaborasi	Kolaborasi
54	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	%	N/A	N/A	5	15	50	65	75	75
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
55	Persentase Koperasi Aktif	%	61,91	60,00	62,00	63,00	65,00	67,00	70,00	70,00
2.12	Penanaman Modal									
56	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	11.574	13.362	15.428	17.814	68.202
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga									
57	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	30	35	40	45	210
58	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	15	15	15	15	15
59	Proporsi wirausaha muda	%	67,78	67,86	67,97	68,07	68,18	68,28	68,39	68,39
2.14	Statistik									
60	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	%	N/A	N/A	10,00	15,00	30,00	50,00	65,00	65,00
2.15	Persandian									
61	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level	I	I	I+	II	II+	III	III+	III+
2.16	Kebudayaan									
62	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	-	8,70	17,39	20,00	24,35	28,70	33,04	33,04
2.17	Perpustakaan									
63	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47,46	47,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
64	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17,27	19,93	23,91	27,90	31,89	35,87	39,86	39,86
2.18	Kearsipan									
65	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16,55	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00	100,00
3	URUSAN PILIHAN									
3.01	Kelautan dan Perikanan									
66	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,77	4,76	4,76	4,76	4,75	4,75	4,74	4,74
67	Produksi Perikanan	Ton	1.207.076	1.297.325	-	1.405.469	1.436.947	1.468.104	1.499.957	1.499.957
68	Nilai Tukar Nelayan	%	112,25	118,00	-	>110	>110	>110	>110	>110
3.02	Pariwisata									
69	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	%	7,27	-4,59	-	-0,10	1,50	3,00	4,50	4,50
70	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
71	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,64	1,50	2,75	2,95	3,10	3,25	3,35	3,35
72	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.812.379	4.000.000	4.400.000	4.650.000	4.850.000	5.200.000	23.100.000
73	Persentase Geosites yang Tertata	%	0,03	0,06	10,00	12,50	25,00	37,50	50,00	50,00
74	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Milyar	112,36	76,13	113,43	116,04	122,71	129,78	137,24	137,24
3.03	Pertanian									
75	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,00	23,29	23,52	23,71	23,88	23,88
76	Nilai Tukar Petani	Point	107,63	111,21	>105	>105	>105	>105	>105	>105

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.04	Kehutanan									
77	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	60,03	66,70	67,70	68,70	69,70	69,70
78	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	%	0,08	0,08	0,08	5,08	10,08	15,08	20,08	20,08
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral									
79	Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	94,46	99,66	99,77	99,88	99,99	99,99
3.06	Perdagangan									
80	Indeks Daya Beli	Point	69,76	70,99	72,23	72,91	73,80	74,68	75,56	75,56
81	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	9.956	10.952	11.273	11.604	11.944	11.944
3.07	Perindustrian									
82	Pertumbuhan Industri	%	2,00	2,00	3,20	5,50	6,50	7,50	9,00	9,00
83	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	164,57	160,02	166,39	173,02	179,91	179,91
84	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0,57	1,13	1,68	2,20	2,69	3,14	3,55	3,55
3.08	Transmigrasi									
85	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	85	90	95	100	100
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	Administrasi Pemerintahan									
86	Ranking Nasional LPPD	Ranking	10	3	-	4	7	5	3	3,0747
87	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
88	Persentase Fasilitas Pelayanan Keagamaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
89	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	%	-	-	-	28,00	28,00	34,00	45,00	45,00
90	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	Level	1	1	-	2	3	3	4	4
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	Perencanaan									
91	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.02	Keuangan									
92	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
93	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Point	0,46	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,54	0,54
94	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,39	34,06	35,41	36,97	38,65	38,65
5.03	Kepegawaian									
95	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,65	0,66	0,68	0,70	0,72	0,72
5.04	Pendidikan dan Pelatihan									
96	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	Point	NA	NA	NA	0,24	0,25	0,27	0,28	0,28
5.05	Penelitian dan Pengembangan									
97	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	30,00
5.06	Penghubung									
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6.01	Pengawasan									
98	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	B	BB (70,05-73,00)	BB (73,01 - 76,00)	BB (76,01 - 80,00)	A (80,01 - 90,00)	A (80,01 - 90,00)
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik									
99	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	0,00	0,00	3,52	7,05	4,46	4,67	4,89	4,89
100	Partisipasi Politik Masyarakat	%	78,44	77,5	-	82,80	83,74	84,57	85,20	85,20
101	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	0	0,41	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	50,00
102	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	-	14,29	16,67	20,00	0,00	0,00
103	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00

BAB III

CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2023

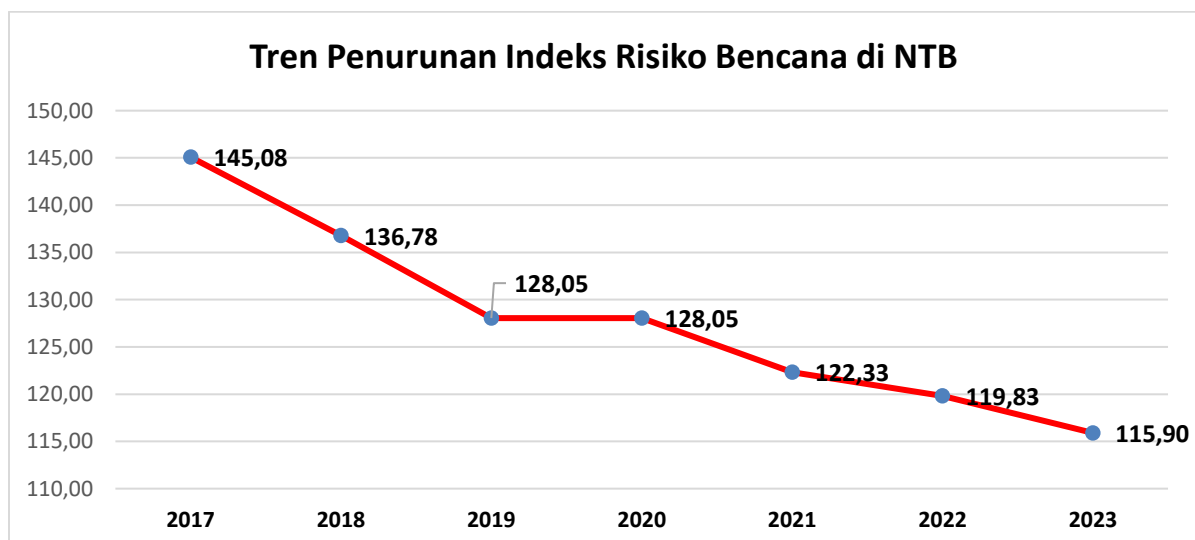
3.1. CAPAIAN VISI DAN MISI RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang diukur berdasarkan pencapaian dari tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Dalam RPJMD Provinsi NTB periode 2019-2023, terdapat 11 tujuan pembangunan daerah dengan 14 indikator kinerja dan 26 sasaran pembangunan daerah dengan 37 indikator kinerja yang dipetakan kedalam 6 Misi Pembangunan Daerah. Adapaun pencapaian kinerja selama kurun waktu periode 2019-2023 dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Visi Pembangunan Daerah “Membangun Nusa Tenggara Barat Yang Gemilang” dengan Misi sebagai berikut:

3.1.1. CAPAIAN MISI PERTAMA: NTB TANGGUH DAN MANTAP

NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah dengan 2 (dua) tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana dengan indikator kinerja Indeks Risiko Bencana dan Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan dengan indikator kinerja Indeks Aksesibilitas.



Pencapaian pada Misi ini dapat dipenuhi sesuai dengan yang ditargetkan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin tangguhnyanya provinsi NTB dalam menghadapi bencana yang diindikasikan dengan pencapaian Indeks Risiko Bencana yang dapat terus ditekan dari

kondisi awal 139,4 poin berhasil diturunkan menjadi 115,90 poin pada tahun 2023, dengan **sasaran pembangunan yaitu meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana, dengan indikator kinerja Indeks Kapasitas Daerah**. Kondisi awal kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebesar 0,55 dan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,65 Point. Sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebesar 0,73 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 112,31%.

Untuk meningkatkan kapasitas dalam penanggulangana bencana, dilakukan intervensi pada 7 (tujuh) prioritas yaitu :

- a. Penguatan Kebijakan dan kelembagaan
- b. Pengakajian risiko dan perencanaan terpadu
- c. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
- d. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
- e. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana
- f. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
- g. Pengembangan sistem pemulihan bencana

Terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu meningkatkan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana, meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta meningkatkan penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Sampai dengan tahun 2023, Persentase perangkat daerah di provinsi NTB yang telah menerapkan kegiatan penanggulangan bencana sudah mencapai 100%, serta tetap meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana di lingkup perangkat daerah provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kota.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana BPBD provinsi NTB memiliki 1 (satu) program kegiatan yaitu program penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana untuk mendukung penanggulangan bencana melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Memfasilitasi Desa Tangguh Bencana
- Memfasilitasi Sekolah / Madrasah Aman Bencana
- Pelatihan Pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA)
- Menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)

- Menyusun dokumen rencana kontijensi.
- Menyiapkan sarana dan prasarana beserta data laporan korban bencana
- Melakukan pemindahan warga/masyarakat dari zona berisiko bencana ke lokasi yang lebih aman
- Melakukan pencarian dan evakuasi korban terdampak bencana
- Penyediaan dan pendistribusian logistik sesuai dengan kebutuhan korban terdampak bencana
- Pengelolaan data dan informasi terkait kebencanaan.

Terdapat 3 Program unggulan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019–2023 yaitu Pembentukan/Fasilitasi Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Sekolah/Madrasah Aman Bencana, dan Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana. Sampai tahun 2023 Pembentukan/Fasilitasi Desa Tangguh Bencana telah mencapai realisasi 100% yaitu sebanyak 434 desa dari target 434 desa pada tahun 2023. Sekolah/Madrasah Aman Bencana sebanyak 204 Sekolah/Madrasah dan Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SiAGA) telah diunduh lebih dari 200 ribu orang dan mendapatkan penilaian dengan rating 4,7 di app store.

Adapun capaian tujuan pembangunan yang kedua dalam misi ini terkait aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan yang diukur dengan Indeks Aksesibilitas juga mengalami peningkatan yang cukup signifikansi dari 74,6 poin pada tahun 2018 meningkat menjadi 84,72 poin pada tahun 2023, dengan sasaran pembangunan yaitu

1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah, dengan indikator kinerja Persentase Kemantapan jalan dan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi.

Sampai pada tahun 2023, Persentase Kemantapan jalan ditargetkan sebesar 85,36% dengan realisasi 79,94%, capaiannya jauh dari yang ditargetkan. Sedangkan Persentase Kemantapan Sistem Irigasi ditargetkan sebesar 52,17% dengan realisasi 56,87%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 104,35%. Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018, ada penurunan sebesar 3,71% tingkat kemantapan jalan, sedangkan tingkat kemantapan system irigasi peningkatan sebesar 3,87%.

Untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan dalam kurun waktu 2019-2023 program percepatan jalan (*Perda* Nomor 12 Tahun 2019. *Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan* Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak) yang berasal dari pembiayaan APBD dan penanganan jalan dengan pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Panjang jalan provinsi yang ditingkatkan dan dipelihara pada tahun 2023 mencapai 540,56 Km, sehingga Panjang jalan dalam kondisi mantap mencapai 1.247,07 Km atau 85,36% dari total Panjang jalan 1.484,43 Km. semntara itu Kemantapan Sistem Irigasi sebagian besar didukung melalui dana alokasi khusus. Pada Tahun 2023, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR No. 14 Tahun 2015 untuk mengelola 35 Daerah Irigasi dengan luasan 1.000 Ha – 3.000 Ha. Secara keseluruhan terdapat 58.105 Ha luasan kewenangan daerah irigasi yang dikelola. Adapun Panjang saluran dari 35 Daerah Irigasi tersebut adalah 721,95 kilometer dengan saluran dalam kondisi baik sepanjang 413,05 Km (57 %), rusak ringan 61,78 km (9 %), rusak sedang 86,05 km (12 %) dan rusak berat 161,03 km (22 %).



2. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan indikator kinerja **Persentase konektivitas transportasi publik.**

Pada akhir periode RPJMD tahun 2023 ditargetkan sebesar 86,86% dengan realisasi 93,14%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 104,49%

dari target akhir 2023 sebesar 89,14%. Jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018, ada peningkatan konektivitas transportasi publik mencapai 17,24%. Pencapaian konektivitas antar di wilayah didukung oleh peningkatan persentase rute angkutan darat dan angkutan laut. Pada tahun 2023, persentase angkutan darat telah mencapai 98,33% dengan rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 122 rute dengan penambahan 2 (dua) rute angkutan yakni 1 (satu) rute angkutan perintis yaitu rute Terminal Mandalika – Leweng dan 1 (satu) rute angkutan KSPN dengan rute BIZAM – Epicentrum Mall – Pantai Senggigi – Pelabuhan Bangsal. Adapun angkutan laut mencapai 84,62% dengan jumlah rute yang terpenuhi sejumlah 22 (dua puluh dua) rute dengan penambahan 1 (satu) rute angkutan Bali – Tawun

3.1.2. CAPAIAN MISI KEDUA: NTB BERSIH DAN MELAYANI

NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi dengan tujuan pembangunan terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel. Indikator kinerja yang dijadikan ukuran keberhasilannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sampai tahun 2023, pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi NTB naik pada level B dengan skor mencapai 68,73 point, jika dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2018 pada level CC. Meskipun belum dapat memenuhi level yang diharapkan pada kategori BB, keberhasilan naik pada level B ditandai oleh keberhasilan pada beberapa sasaran pembangunan daerah yaitu

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, dengan indikator kinerja Opini BPK.

Pada tahun 2023 ditargetkan mempertahankan Opini BPK WTP dengan realisasi WTP, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dengan demikian pemerintah provinsi NTB berhasil mempertahankan status WTP yang kedua belas kali berhasil mempertahankan status WTP yang keduabelas kali

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini

berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, walaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah memenuhi kriteria:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
- Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

Pencapaian WTP Provinsi NTB merupakan Prestasi yang ke-12 secara berturut-turut dari tahun 2011-2023



2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD.

Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 36,97% dengan realisasi 48,32%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 125,02%.

Perkembangan capaian indikator keuangan Daerah Provinsi NTB

No	Indikator Bidang Urusan	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		T	R	T	R	T	R
1	Penerimaan Pendapatan Daerah (Rp. Miliar)	5.739,96	5.326,93	5.655,28	5.302,61	6.125,24	5.765,18

2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	64,86	54,92	93,66	76,13	94,89	93,49
3	Pertumbuhan PAD (%)	14,10	4,01	21,11	21,37	8,89	21,54

Pada tahun 2023, realisasi PAD sebesar Rp 2.785.671.300.360,- dan Pendapatan Daerah Rp 5.765.181.039.649,-, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD (Pendapatan Daerah) adalah 48,32%. Bila dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan sebanyak 5,09 point atau mencapai Rp2.287.653.655.567,-. Peningkatan PAD sebagian besar bersumber dari peningkatan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan BLUD. Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

Dalam upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara continue;
- Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja;
- Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan;
- Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota;
- Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi e-Samsat, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Samsat Nonstop Service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui aplikasi Agent Samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan kepolisian;
- Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui call center 1500-186;

- h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah;
 - i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah;
 - k. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - a. Mengoptimalkan layanan Samsat Delivery, samsat On Call, Samsat Auto Debet ASN dan e-Samsat untuk kenyamanan dan keamanan WP;
 - b. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB;
 - c. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan; dan
 - d. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah
3. **Meningkatnya Profesionalisme ASN, dengan, dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme ASN.**

Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,72 point dengan realisasi 0,77 point atau melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 106,94%. Ketercapaian indikator kinerja ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari dimensi kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Dari capaian diatas, untuk indikator kinerja Penerapan Sistem Merit telah disusun Strategi dan Road Map Penerapan Sistem Merit lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang memuat 8 (delapan) Aspek sebagai berikut :

- a. Ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta diperinci menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan akan pensiun;

- b. Pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, baik yang berasal dari calon PNS, PNS dari instansi lain, dan PPPK;
- c. Pengembangan karir meliputi penetapan standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi, pembangunan *talent pool* dan rencana suksesi, serta peningkatan kompetensi dalam upaya mengatasi kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja;
- d. Pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan mempertimbangkan pola karir dan rencana suksesi;
- e. Manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi serta pendidikan dan pelatihan;
- f. Penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja serta pengangkatan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan ode perilaku pegawai ASN;
- g. Perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melakukan tugas; dan
- h. Ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Adapun pencapaian aspek penilaian sistem merit Pemerintah Provinsi NTB sampai tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Aspek perencanaan kebutuhan pegawai, dari target nilai 40 point baru tercapai 37,5 point (kategori baik). Perlu dioptimalkan pada sub aspek ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
- b. Aspek Pengadaan dari target nilai 40 point, sudah tercapai 40 point. Ini menunjukkan bahwa pada aspek ini telah dilaksanakan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel;
- c. Aspek pengembangan karir dari target nilai 102,5 point baru tercapai 60 point. Ada beberapa sub aspek yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya: (1)

- Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja; (2) Ketersediaan rencana suksesi yang sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi; (3) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja; (4) Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; (5) Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan; (6) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai; (7) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;
- d. Aspek Promosi dan Mutasi dari target nilai 32,5 point baru tercapai 17,5 point. Ada beberapa sub aspek yang perlu ditingkatkan diantaranya (1) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir; (2) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi; (3) Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;
 - e. Aspek Manajemen Kinerja dari target nilai 80 point baru tercapai 62,5 point. Ada beberapa sub aspek yang perlu ditingkatkan diantaranya (1) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi; (2) Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;
 - f. Aspek Perlindungan dan Pelayanan dari target nilai 16 point dan telah mencapai target. Pada aspek ini telah mendapatkan nilai yang sangat baik sehingga perlu dipertahankan;
 - g. Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin dari target nilai 40 point dan tercapai sebesar 35 point. Pada aspek ini telah mendapatkan nilai yang sangat baik sehingga perlu dipertahankan;
 - h. Aspek Sistem Informasi dari target nilai 22 point baru tercapai 16 point. Ada beberapa sub aspek yang perlu ditingkatkan antaranya (1) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem

penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; (2) Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; (3) Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online.

Secara keseluruhan pencapaian nilai sistem merit Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 berada pada indeks 284,5 point atau pada katagori III dengan sebutan "Baik".

4. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik (IPP).**

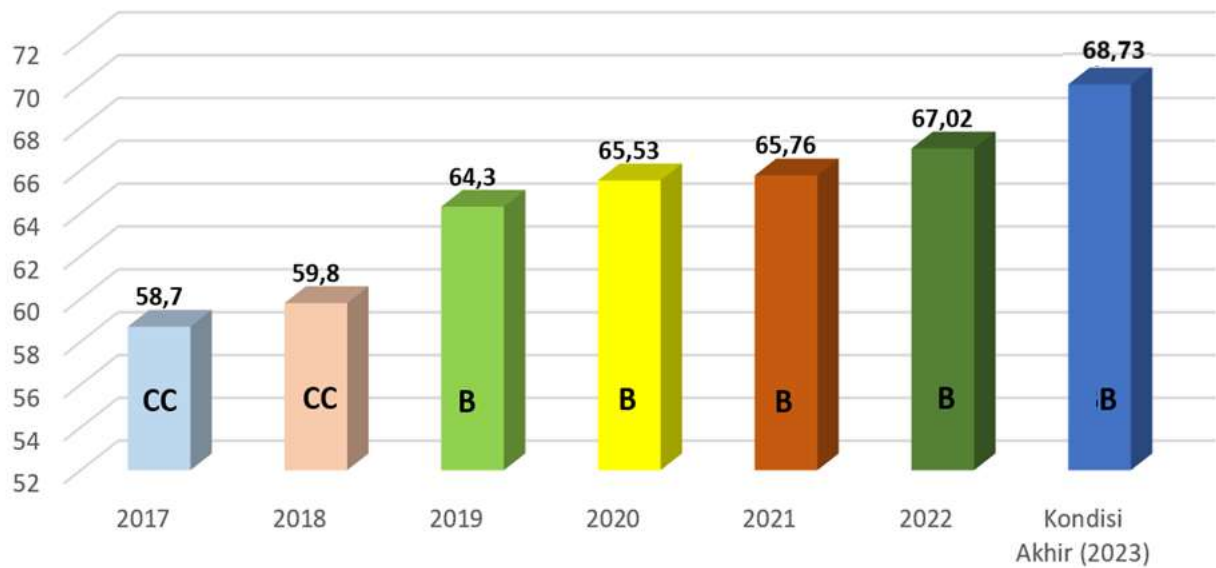
Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,55 point dengan realisasi sebesar 3,97. Meskipun belum memenuhi target, akan tetapi capaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 3,71 point.

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Instansi pemerintah memiliki tugas mendasar untuk memberikan pelayanan prima (*excellent service*) dan harus memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Sesuai dengan klasifikasi dalam penilaian Indeks Pelayanan Publik, nilai IPP NTB sebesar 3,97 berada pada range 3,51-4,00 atau termasuk kategori B dengan makna BAIK.

Keberhasilan Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan. pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal.

Trend Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di NTB



3.1.3. CAPAIAN MISI KETIGA: NTB SEHAT DAN CERDAS

NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah dengan 2 (dua) tujuan pembangunan yaitu terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesehatan dan terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan.

Pencapaian misi ini sesuai dengan target pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan naiknya level Indeks Pembangunan Manusia di NTB dari level sedang ke level tinggi pada tahun 2023 atau dari 67,30 poin tahun 2018 menjadi 72,37 poin tahun 2023. Keberhasilan ini didukung oleh keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup dan Persentase Balita *Stunting*.**

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari awal rencana pembangunan daerah periode 2019-2023 terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan memiliki dampak positif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Peningkatan capaian AHH di tahun awal periode yaitu tahun 2019 adalah 66,28 tahun, bila dibandingkan dengan data tahun dasar yaitu tahun 2018 yaitu 65,75 tahun maka ada peningkatan 59,53 poin, demikian pula dengan capaian tahun 2020 dimana AHH mencapai 71,17 tahun ada peningkatan sebesar

4,89 poin dari capaian tahun 2019, peningkatan capaian dari tahun 2018-2020 sangat signifikan perbedaan poin capaian dengan capaian AHH tahun 2021- 2023 dimana peningkatan capaian per tahun tidak mencapai 0,5 poin yaitu peningkatan AHH dari tahun 2020 ke tahun 2021 peningkatannya cuma 0,16 poin dimana AHH tahun 2021 adalah 71,33 tahun, sedangkan tahun 2020 71,17 tahun, peningkatan AHH dari tahun 2021 ke tahun 2022 adalah 0,33 poin dari 71,33 tahun menjadi 71,66 tahun di tahun 2022 dan pada tahun 2023 AHH di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 72,02 tahun ada peningkatan sebesar 0,36 poin. Perbedaan peningkatan yang cukup signifikan pada AHH dibawah tahun 2020 disebabkan karena ada perbedaan formulasi perhitungan yang dilakukan BPS sejak Tahun 2020, adapun gambaran peningkatan AHH tingkat Provinsi periode 2019-2023 sebagaimana tabel dan grafik berikut ini :

Grafik
Angka Harapan Hidup Tahun 2019-2023



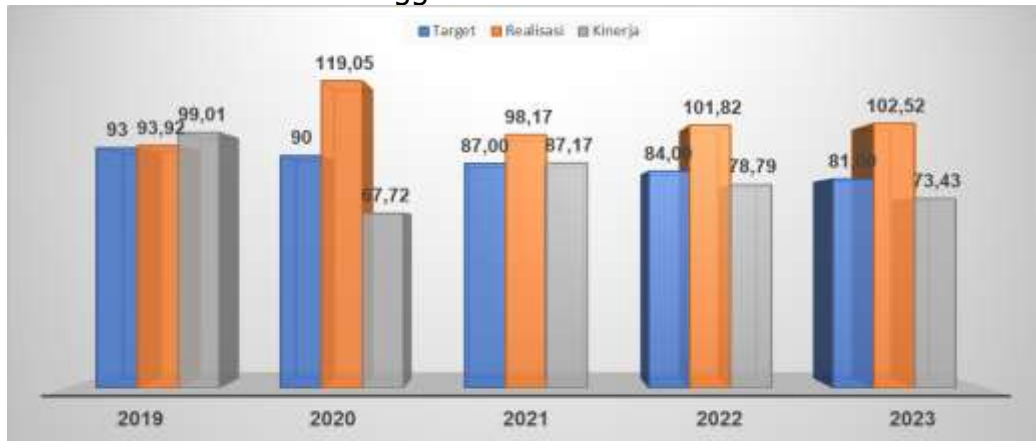
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2023

Keberhasilan dalam mendorong peningkatan angka harapan hidup ini sebagai dampak dari keberhasilan pemerintah dalam menurunkan kasus kematian ibu dan bayi. Pencapaian realisasi Indikator AKI dihitung menggunakan dua formulasi yaitu berdasarkan BPS dan formulasi perhitungan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019-2023. Realisasi dengan perhitungan BPS akan diambil dari data rilis BPS, sedangkan untuk perhitungan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian ibu dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dibagi jumlah kelahiran hidup dalam waktu dan wilayah yang sama dikalikan

100.000. adapun gambaran AKI per 100.000 KH tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik dan Tabel dibawah ini.

Grafik

Target dan Realisasi Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Grafik

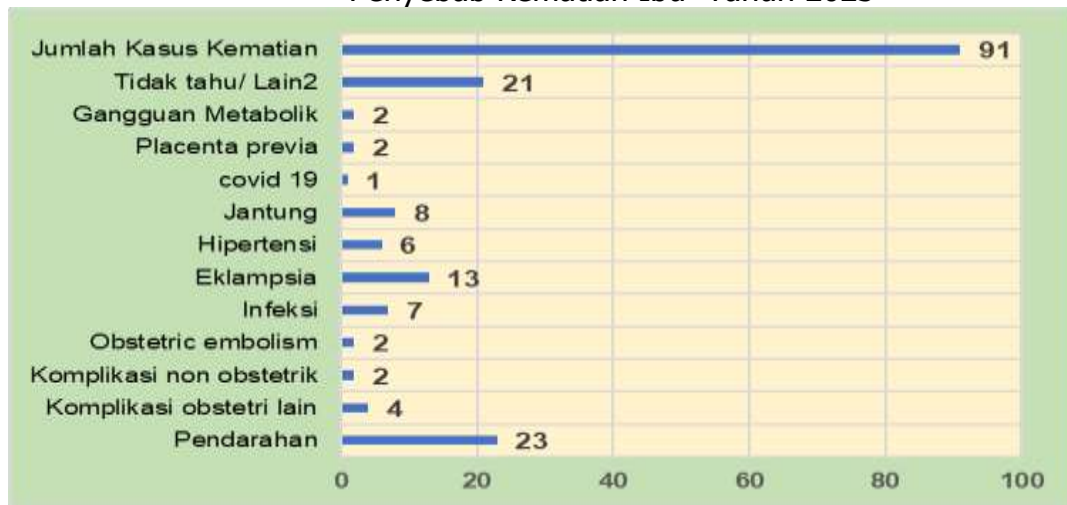
Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH BPS dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Kematian Ibu di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki pengaruh besar bagi kesehatan Ibu dan Anak sehingga dapat menjadi penyebab kematian ibu dan anak. Faktor yang menjadi penyebab kematian ibu lebih dikenal dengan istilah 4 terlalu dan 3 terlambat, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, terlalu banyak, dan terlambat dalam mencapai fasilitas, terlambat mendapatkan pertolongan, dan terlambat mengenali tanda.

Grafik
Penyebab Kematian Ibu Tahun 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Penyebab kematian ibu paling tinggi tahun 2023 adalah Pendarahan 23 kasus, penyebab yang belum diketahui/lain2 sebanyak 21 kasus, Eklampsia atau keracunan kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sebanyak 13 kasus, kematian ibu yang disebabkan oleh infeksi 7 kasus, selain faktor tersebut penyakit tidak menular menjadi salah satu penyebab kematian ibu diantaranya yang disebabkan oleh Jantung sebesar 8 kasus, dan hipertensi 6 kasus.

Jumlah kasus kematian ibu mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir dari 144 tahun 2021, menjadi 97 kasus di tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi 91 kasus, hal ini menunjukkan kinerja positif pelaksanaan pembangunan di sektor kesehatan, walaupun demikian target penurunan kematian ibu belum dapat tercapai.

Grafik
Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Ibu di Provinsi NTB
Tahun 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Upaya penurunan kematian ibu dan Bayi/Anak dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dengan memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Berdasarkan tabel diatas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil belum optimal hal ini dapat dilihat dari persalinan fasyankes baru encapai 81,38%, cakupan K1 79,17% ini menunjukkan bahwa masih ada ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, demikian pula dengan K4 baru mencapai 81% dan K6 sebesar 65,59% yang seharusnya 100%.

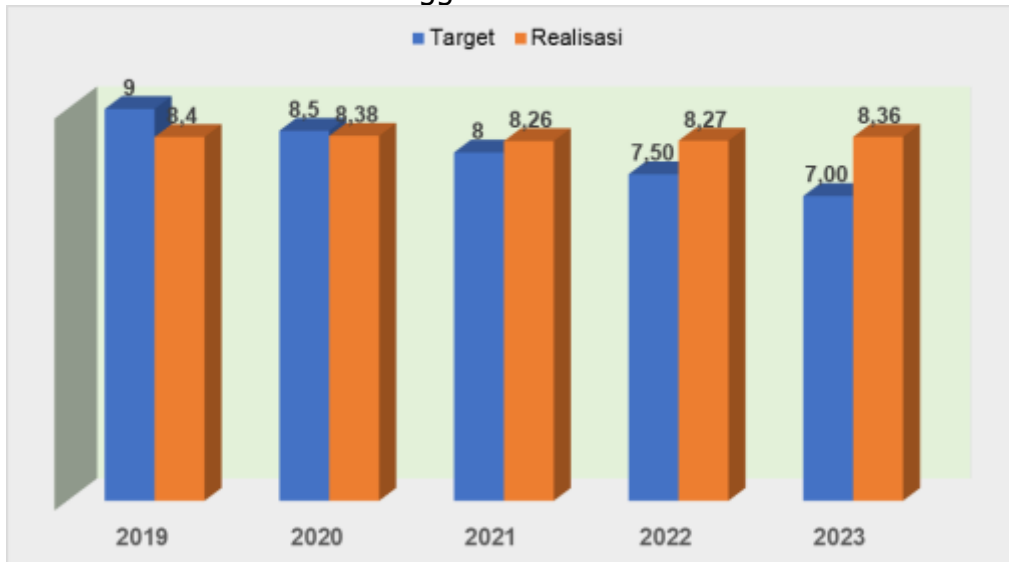
Pemenuhan standar pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai aspek baik internal maupun eksternal yang bersifat koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai sektor. Aspek internal seperti pemenuhan standar atas sarana prasarana, alat kesehatan yang belum mencapai 100%, demikian pula dengan pemenuhan kompetensi SDM sesuai kualifikasinya sebagai pemberi layanan masih rendah.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi (AKB) pada periode 2019-2023 cukup fluktuatif, kondisi tahun 2019-2020 penurunan AKB per 1.000 KH dapat mencapai target, capaian kinerja mencapai 114,56% dari target AKB 9 per 1.000 KH terealisasi 8,36 per 1.000 KH di tahun 2019 dan tahun 2020 capaian kinerja 101,41% dimana target AKB 8,5 per 1.000 KH terealisasi 8,36 per 1.000 KH, walaupun belum mencapai target penurunan AKB, jumlah kasus kematian bayi mengalami penurunan setiap tahun, sama halnya dengan AKI tahun 2021-2023 capaian kinerja realisasi target AKB tidak pernah mencapai 90%, walaupun masih masuk kriteria "tinggi", hal ini disebabkan karena terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) nasional yaitu Covid-19 pada tahun 2019-2022, sehingga segala bentuk layanan kesehatan termasuk pelayanan bagi bayi sangat terbatas karena adanya kebijakan pembatasan jarak antar individu dalam berinteraksi, namun demikian upaya layanan terhadap ibu hamil tetap diupayakan seoptimal mungkin. Berakhirnya masa pandemi covid-19 masih belum berjalan optimal.

Pencapaian realisasi Indikator AKI dan AKB dihitung menggunakan dua formulasi yaitu berdasarkan BPS dan formulasi perhitungan yang digunakan oleh Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2019-2023. Realisasi dengan perhitungan BPS akan diambil dari data rilis BPS, sedangkan untuk perhitungan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dihitung berdasarkan jumlah kasus kematian Bayi dalam wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat dibagi

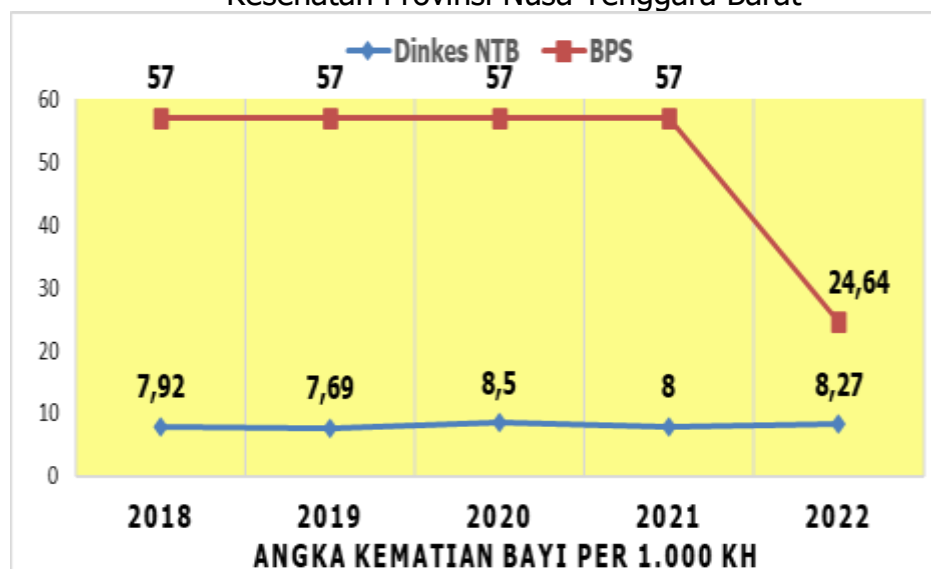
jumlah kelahiran hidup dalam waktu dan wilayah yang sama dikalikan 1.000. Adapun gambaran AKB per 1.000 KH tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik dan Tabel dibawah ini.

Grafik
Target dan Realisasi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023



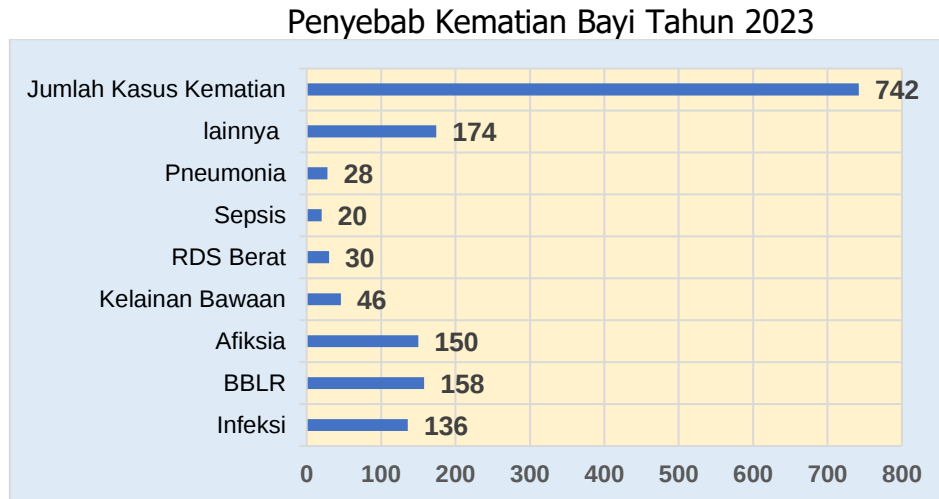
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Grafik
Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH BPS dan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Penyebab masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) di NTB diantaranya disebabkan oleh afiksia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan infeksi. Adapun penyebab selengkapnya seperti disajikan dalam grafik berikut ini:



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Adapun Indikator Persentase Balita Stunting tahun 2023 lebih rendah daripada tahun 2019-2022, hal ini menunjukkan kinerja positif dalam upaya penurunan Stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada indikator ini target yang digunakan sebagai dasar atau data awal perencanaan adalah hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI), sedangkan perhitungan Capaian menggunakan hasil entrian data hasil Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), sehingga realisasi dan target perbedaanya cukup signifikan. E-PPGBM adalah indikator keberhasilan suatu kegiatan yang berisi data dan informasi tentang gizi yang berharga dan bernilai bila menggunakan metode yang tepat dan benar agar semua hasil kegiatan Puskesmas, khususnya program gizi (di dalam dan di luar gedung) dapat dicatat serta dilaporkan ke jenjang selanjutnya sesuai dengan kebutuhan secara benar, berkala, dan teratur guna menunjang pengelolaan upaya kesehatan masyarakat. Persentase Balita stunting dari tahun 2019-2013 terus menurun, dimana tahun 2019 persentase Balita Stunting adalah 25,50% menjadi 13,49 % pada Tahun 2023, adapun gambaran kondisi persentase Balita Stunting tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi dapat dilihat pada Tabel dan Grafik dibawah ini.

Grafik
Target dan Realisasi Penurunan Persentase Balita Stunting Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTB untuk menurunkan persentase balita Stunting antara lain melalui :

- Melakukan sosialisasi Pemberian ASI Eksklusif dan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)
- Pembinaan Keluarga Sehat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok rentan terhadap masalah kurang gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan masalah gizi;
- Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan petugas gizi dan bidan di Puskesmas, bidan desa dan kader posyandu;
- Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti TP PPK, DP3AP2KB, DPMPD Dukcapil, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dll), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti

pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, dan ibu menyusui.

- e. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua kabupaten/kota dengan prinsip dasar pemberian makanan tambahan anak balita adalah untuk memenuhi kecukupan gizi agar mencapai berat badan sesuai umur, sedangkan pada ibu hamil KEK untuk memenuhi kecukupan gizi ibu hamil.

Disamping itu, keberhasilan juga didukung oleh pelaksanaan program unggulan revitalisasi posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat. Salah satu program unggulan daerah adalah revitalisasi posyandu atau pengembangan posyandu konvensional menjadi posyandu keluarga.

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu keluarga di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2019 sebanyak 1050, pada tahun 2020 sebanyak 2223 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebanyak 7.581. adapun tahun 2023 telah mencapai 7.676 posyandu keluarga. Keberhasilan dalam merevitalisasi posyandu ini atas keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah maupun komponen masyarakat melalui kolaborasi dan sinergi yang sistematis antar sektor terkait, para mitra pembangunan (NGO), swasta serta koordinasi yang harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota bahkan sampai pemerintah desa.

2. **Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan Pendidikan, dengan indikator kinerja Harapan Lama Sekolah dan Rata rata Lama Sekolah.**

Pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar 13,79 tahun dengan realisasi 13,97 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,31%. Sedangkan Rata rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 7,07 tahun dengan realisasi 7,74 tahun, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 109,48%

Keberhasilan dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah sebagai indikasi keberhasilan dalam mendorong adanya peningkatan Angka

Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) yang digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap system pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan APS biasanya dikelompokkan menurut kelompok umur sekolah setiap jenjang pendidikan yaitu SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun), dan SMA (16-18 tahun) serta Perguruan Tinggi (19-24 tahun).

Tabel

Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TH	BANYAK SISWA USIA 16-18TH				APS SM
			SMA / SMK / MA / PAKET C	SMP	MTs	TOTAL	
1	Kota Mataram	18.701	18.643	12	14	18669	99,83
2	Kab. Lombok Barat	28.403	28.262	48	78	28388	99,95
3	Kab. Lombok Tengah	29.043	28.039	67	27	28133	96,87
4	Kab. Lombok Timur	54.692	53.721	79	52	53852	98,46
5	Kab. Lombok Utara	10.188	10.092	7	21	10120	99,33
6	Kab. Sumbawa Barat	5.864	5.822	10	18	5850	99,76
7	Kab. Sumbawa	18.806	18.740	21	10	18771	99,81
8	Kab. Dompu	13.332	12.907	67	45	13019	97,65
9	Kab. Bima	20.242	20.060	25	46	20131	99,45
10	Kota Bima	7.594	7.548	5	10	7563	99,59
JUMLAH		206.865	203.834	341	321	204.496	98,85

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2023 sebesar 98,85 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 98,50 persen. Dari data diatas juga tampak bahwa masih ada anak usia 16 sampai 18 tahun yang tidak berada pada jenjang yang seharusnya yaitu jenjang pendidikan menengah sekitar 662 anak atau sebesar 0,32 persen dari total jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 Tahun.

Angka partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Selain itu, APM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan penduduk di luar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian :

Tabel
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB dari Tahun
2017/2018 s.d 2022/2023

No	Tahun	Penduduk Usia 16- 18 Tahun	Siswa Usia 16-18 tahun						APM				Total APM (SM)
			SMA	MA	SMK	Paket C	SMA LB	Jumlah	SMA	MA	SMK	Paket C	
1.	2017/2018	267.651	98.354	66.799	66.509	3.381	254	235.296	36,75	24,96	24,85	1,26	87,91
2.	2018/2019	267.595	97.551	64.887	69.130	4.719	310	236.597	36,45	24,25	25,83	1,76	88,42
3.	2019/2020	269.479	100.863	62.403	75.397	10.358	330	249.351	37.43	23.16	27.98	3.84	92.53
4.	2020/2021	270.370	101.540	70.000	78.854	10.573	346	261.313	37,56	25,89	29,17	3,91	96,65
5.	2021/2022	216.848	98.858	45.618	68.123	68	0	212.667	45,59	21,04	31,42	0,04	98,07
6	2022/2023	206.865	92.893	47.022	57.332	6.587	0	203.834	44,9	22,73	27,71	3,18	98,5

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun Angka Partisipasi Murni (APM) terus mengalami peningkatan meskipun sejak tahun 2022 variabel SMA-LB dianulir karena telah dihitung pada perhitungan APK-SLB. APM tahun 2023 sebesar 98,50 persen meningkat sebesar 0,43 persen jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 98,07 persen, hal ini disebabkan oleh menurunnya angka Drop Out baik SMA maupun SMK. Data APM tingkat SM (SMA, SMK, MA dan Paket C) per kabupaten/kota di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel
Angka Partisipasi Murni tingkat SM (SMA, SMK, Ma dan Paket C) per kabupaten / kota di
Provinsi NTB Tahun 2022/2023

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TH	BANYAK SISWA USIA 16-18TH					APM SM
			SMA	SMK	MA	PAKET C	TOTAL	
1	Kota Mataram	18.701	9.616	6.528	2.210	289	18.643	99,70%
2	Kab. Lombok Barat	28.403	10.510	9.234	7.705	813	28.262	99,50%

3	Kab. Lombok Tengah	29.043	12.169	8.416	6.550	904	28.039	96,50%
4	Kab. Lombok Timur	54.692	19.793	13.833	18.975	1120	53.721	98,20%
5	Kab. Lombok Utara	10.188	5.124	2.288	2.030	650	10.092	99,10%
6	Kab. Sumbawa Barat	5.864	3.419	1.555	772	76	5.822	99,30%
7	Kab. Sumbawa	18.806	9.759	5.924	2.130	927	18.740	99,60%
8	Kab. Dompu	13.332	6.827	3.648	1.602	830	12.907	96,80%
9	Kab. Bima	20.242	12.126	4.089	3.246	599	20.060	99,10%
10	Kota Bima	7.594	3.550	1.817	1.802	379	7.548	99,40%
JUMLAH		206.865	92.893	57.332	47.022	6587	203.834	98,50%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

Dari tabel diatas terlihat bahwa APM tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 98,07 pada tahun 2022 menjadi 98,50 di tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,43% dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh penurunan angka DO baik pada jenjang SMA maupun SMK. Dimana penurunan DO ini merupakan salah satu dampak dari adanya SMA terbuka Terbuka yang menjadi alternatif melanjutkan sekolah bagi siswa Drop Out atau yang tidak melanjutkan sekolah lagi dengan berbagai alasan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan di jenjang tertentu meskipun usianya melebihi atau kurang dari usia pada jenjang tertentu. APK jenjang pendidikan SMA/ sederajat 2018-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2017/2018 s.d 2022/2023

No	Tahun	PENDUDUK USIA 16- 18 TH	Peserta Didik Seluruhnya						APK					Total APK (SM)
			SMA	MA	SMK	SMA LB	Paket C	Jumlah	SMA	MA	SMK	SMA LB	Paket C	
1.	2017/2018	267,651	104.949	70.705	71.571	423	14.454	262.102	39,21	26,42	26,74	0,16	5,4	97,93
2.	2018/2019	267,595	101.066	67.282	72.684	479	22.194	263.705	37,77	25,14	27,16	0,18	8,29	98,55
3.	2019/2020	269479	103,733	64261	78,681	481	28269	275425	38.494	23.85	29.20	0.18	10.49	102.21
4.	2020/2021	270.370	104.552	73.517	82.138	585	27.497	288.289	38,67	27,19	30,38	0,22	10,17	106,63
5.	2021/2022	216.848	99.222	45.899	68.543	0	25.654	239.318	45,76	21,17	31.61	0	11.83	110,36
6.	2022/2023	206.865	102.248	59.892	65.647	0	11.717	239.504	49,42	28,95	31,73	0	5,66	115,78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun 2023 sebanyak 206.865 orang, dan jumlah peserta didik SMA, MA, SMK dan Paket C sebanyak 239.504 orang sehingga APK pada jenjang Sekolah Menengah (SM) pada pada

tahun 2023 sebesar 115,78 persen mengalami peningkatan sebesar 5,42 persen dari tahun 2022 yaitu sebesar 110,36 persen. APK-SM pada tahun 2023 tidak menggunakan data peserta didik SMALB sebagai salah satu variabelnya sesuai dengan arahan Kemenpan-RB pada evaluasi LPPD tahun 2021 mengingat peserta didik SMA-LB telah dihitung sebagai variabel perhitungan APK-SLB.

Tabel
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2022/2023 Menurut Kabupaten/Kota

NO.	KAB/KOTA	PENDUDUK USIA 16-18 TH THN 23	BANYAK SISWA				TOTAL SM	APK SM
			SMA	SMK	MA	PAKET C		
1	Kota Mataram	18.701	9.873	6.825	2.575	474	19.747	105,59
2	Kab. Lombok Barat	28.403	12.311	11.302	10.900	1249	35.762	125,91
3	Kab. Lombok Tengah	29.043	17.324	12.520	12.180	1584	43.608	150,15
4	Kab. Lombok Timur	54.692	20.453	14.604	21.243	2173	58.473	106,91
5	Kab. Lombok Utara	10.188	5.289	2.458	2.387	941	11.075	108,71
6	Kab. Sumbawa Barat	5.864	3.563	1.663	907	132	6.265	106,84
7	Kab. Sumbawa	18.806	9.985	6.172	2.418	1380	19.955	106,11
8	Kab. Dompu	13.332	7.243	3.900	1.834	2021	14.998	112,5
9	Kab. Bima	20.242	12.570	4.334	3.551	1172	21.627	106,84
10	Kota Bima	7.594	3.637	1.869	1.897	591	7.994	105,27
JUMLAH		206.865,00	102.248,00	65.647,00	59.892,00	11.717,00	239.504,00	115,78

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa APK dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Begitu juga halnya di tahun 2023 terdapat peningkatan capaian APK sebesar 5,42 persen yaitu 115,78 persen jika dibandingkan dengan capaian APK tahun 2022 yaitu 110,36 persen. Capaian APK yang melebihi angka seratus persen ini disebabkan adanya warga belajar dari provinsi lain, adanya anak yang belum berusia 16-18 namun sudah berada pada jenjang pendidikan menengah dan adanya peserta didik yang usianya lebih dari 16 – 18 tahun tapi masih berada pada jenjang pendidikan menengah.

Perkembangan terhadap angka melanjutkan sekolah dan angka drop out di Provinsi NTB cenderung membaik yang merupakan alat untuk mengukur kinerja pembangunan

bidang pendidikan yang berimplikasi pada pencapaian rata-rata lama sekolah dan meningkatnya APK, APM dan APS pendidikan menengah.

Tabel
Angka Melanjutkan dari Lulusan SMA ke Perguruan Tinggi
Provinsi NTB Tahun 2023

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Siswa	Angka Melanjutkan	(%)
1.	Kabupaten Lombok Barat	1.682	1.045	62,13
2.	Kabupaten Lombok Tengah	2.941	1.840	62,56
3.	Kabupaten Lombok Timur	2.380	1.806	75,88
4.	Kabupaten Lombok Utara	405	251	61,98
5.	Kabupaten Sumbawa	977	680	69,6
.	Kabupaten Sumbawa Barat	531	303	57,06
7.	Kabupaten Dompu	1.441	989	68,63
8.	Kabupaten Bima	4.371	2.781	63,62
9.	Kota Mataram	2.141	1.692	79,03
10.	Kota Bima	979	629	64,25
JUMLAH		17.848	12.016	67,32

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa angka melanjutkan sekolah dari jenjang SMA ke Perguruan Tinggi sebesar 67,32 persen atau sebanyak 12.016 orang dari total 17.848 orang, mengalami peningkatan sebesar 0,27 persen dari tahun 2022. Hal ini disebabkan telah optimalnya pendataan lulusan yang melanjutkan melalui tracer study yang dilakukan secara online sehingga jangkauannya lebih luas dan lebih cepat dengan hasil yang optimal.

Tabel
Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK Provinsi NTB dari Tahun 2017/2018 s.d
2022/2023

No.	Tahun	Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK			
		SMA	%	SMK	%
1	2017/2018	422	0,4	548	0,81
2.	2018/2019	393	0,37	465	0,65
3.	2019/2020	47	0,05	249	0,34
4.	2000/2021	972	0,92	1.241	1,91
5.	2021/2022	157	0,15	172	0,23
6.	2022/2023	117	0,10	157	0,15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2023

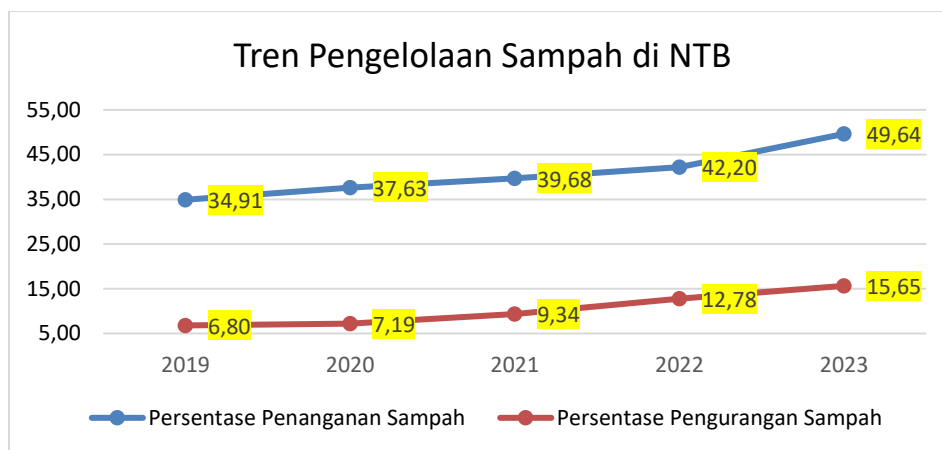
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Drop Out tahun 2023 pada jenjang SMA sebanyak 117 orang atau sebesar 0,10 persen dari total jumlah murid, artinya telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,24 persen. Sedangkan untuk jenjang SMK jumlah Drop Out sebanyak 157 orang atau 0.15 persen dari total jumlah murid, telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,57 persen hal ini disebabkan adanya SMA terbuka yang sebagian besar peserta didiknya berasal dari anak drop out dan putus sekolah.

3.1.4. CAPAIAN MISI KEEMPAT: NTB ASRI DAN LESTARI

NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dengan tujuan pembangunan daerah terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Neraca pengelolaan sampah.

Kualitas lingkungan hidup di NTB terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seperti peningkatan kualitas air dari kondisi awal sebesar 20,25 meningkat menjadi 47,78 poin tahun 2023, kualitas udara juga mengalami peningkatan dr kondisi awal 88,02 menjadi 90,21 poin tahun 2023. Begitu juga halnya kualitas air laut terus meningkat menjadi 82,88 tahun 2023 dan kualitas tutupan lahan dari 61,27 poin meningkat menjadi 66,60.





Keberhasilan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup ini juga didukung dengan semakin membaiknya pengelolaan persampahan. Sampai tahun 2023, pengelolaan persampahan di NTB mencapai 65,29% terdiri atas penanganan sampah telah mencapai 49,64%, sedangkan pengurangan sampah mencapai 15,65%.

Adapun sasaran pembangunan untuk mewujudkan NTB ASRI dan LESTARI sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Sampai tahun 2023, Indeks Kualitas Air ditargetkan sebesar 43,03 point dengan realisasi 47,78 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 111,04%. Indeks Kualitas Udara ditargetkan sebesar 87,59 point dengan realisasi 90,21 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 102,99%. Indeks Kualitas Air Laut ditargetkan sebesar 71,48 point dengan realisasi 82,88 point, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 115,95%. Sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan ditargetkan sebesar 69,70 point dengan realisasi 66,60 point, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 95,55%. Adanya fluktuasi pencapaian ini disebabkan adanya penyesuaian metode perhitungan dan sampling data yang dianalisis setiap tahun yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pencapaian ini didukung oleh beberapa upaya strategis yang dilakukan antara lain:

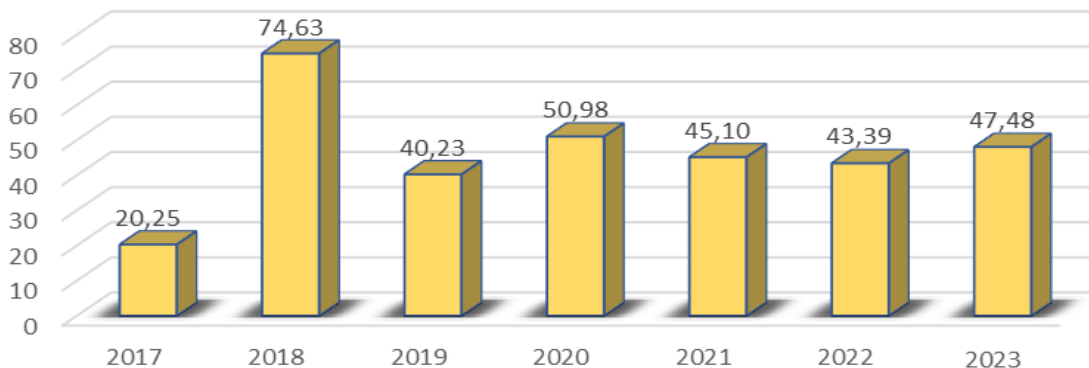
- a. Pengkajian dan penilaian dokumen lingkungan
- b. Verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup, serta mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
- c. Memperkuat monitoring dan evaluasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL kepada para pelaku usaha/kegiatan
- d. Validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- e. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi NTB, dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB
- f. Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
- g. Penghargaan Lingkungan Hidup
- h. Pengelolaan limbah B3
- i. Pemantauan kualitas air laut dan air sungai
- j. Pembinaan, Penilaian dan Evaluasi PROPER
- k. Pemeriksaan, Penilaian Dokumen Kajian/Standar Teknis dan Penerbitan Persetujuan Teknis
- l. Partisipasi masyarakat melalui program Kampung Iklim

Untuk perhitungan Indeks Kualitas Air, dilakukan di 60 titik di setiap sungai pada 10 kabupaten/kota di provinsi NTB. Adapun parameter dari perhitungan IKA ini adalah pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃-N, Total Fosfat dan Fecal Coliform. Jika nilai indeks pencemar semakin tinggi maka semakin buruk kualitas airnya. Data kualitas air diambil dari 60 titik yang tersebar di 10 kabupaten/kota pada provinsi Nusa Tenggara Barat. Data ini diambil dari titik

hilir hingga ke hulu. Pemantauan dilakukan sebanyak 2 periode yaitu pada saat musim hujan dan kemarau.

Capaian Indikator dan Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2017-2023

Indeks Kualitas Air



Berdasarkan grafik dan tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai IKA NTB masih dalam kondisi buruk dan terus mengalami penurunan sejak tahun 2020, hal ini disebabkan sebagian besar sampel memiliki nilai DO yang tidak memenuhi nilai baku mutu dan nilai fecal coliform yang tinggi. Oksigen terlarut atau DO (dissolved oxygen) adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorbs atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air, jika kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Sebanyak 117 dari 120 sampel yang diambil dalam pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2020 memiliki nilai DO diatas 4 mg/L sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021.

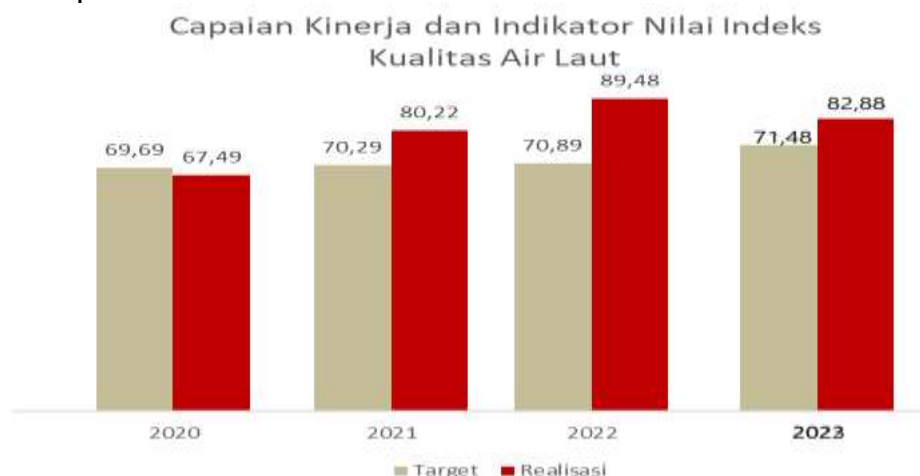
Hal ini berkaitan juga dengan nilai BOD, dimana jika nilai BOD tinggi maka akan mempengaruhi nilai DO dalam air. Biological Oxygen Demand (BOD) adalah ukuran oksigen yang digunakan oleh mikroorganisme untuk menguraikan sampah. Sungai yang memiliki kadar BOD tinggi merupakan indikasi tingginya pencemaran di sungai karena oksigen terlarut yang tersedia di dalam air digunakan oleh bakteri, dan hal ini mengakibatkan berkurangnya oksigen yang tersedia untuk ikan dan makhluk air lainnya. Pada hasil sampling kualitas air sungai pada tahun 2023, terdapat 10 dari

120 sampel yang nilai BOD nya di atas 3 mg/L sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021.

Fecal coliform adalah coliform yang berasal dari feses baik manusia maupun binatang, fecal coliform yang tinggi dapat membahayakan lingkungan, dekomposisi aerobiknya dapat menurunkan oksigen terlarut sehingga menimbulkan kematian pada ikan dan organisme akuatik lainnya. Fecal coliform tinggi juga dapat menekan pertumbuhan bakteri menguntungkan sehingga merusak keseimbangan akuatik secara keseluruhan. Berdasarkan hasil uji lab yang telah dilakukan, nilai Fecal coli di 120 sampel pemantauan, terdapat 117 sampel yang melebihi baku mutu dan memiliki nilai fecal coli >1.000 mg/L , dan ada 3 titik pantau yang memiliki nilai fecal coli <1.000 mg/L. Nilai fecal coli tertinggi terdapat di Sungai Sori Jangka Hilir 2 Kabupaten Bima, dengan nilai fecal coli yaitu 920.000 mg/L. Untuk titik pantau yang memiliki nilai fecal coli terendah terdapat di Sungai Tojang Hulu 1, Kabupaten Lombok Timur. Lokasi pantau juga mempengaruhi nilai fecal coli, dimana titik pantau dengan nilai fecal coli tertinggi berada di bagian hilir sungai dimana hilir sungai merupakan bagian terakhir dari sebuah sungai, karena memang letaknya berdekatan dengan muara sungai, sedangkan nilai terendah berada di bagian hulu, dimana bagian hulu merupakan bagian awal yang biasanya berdekatan dengan sumber mata air.

Sementara itu Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut yang meliputi parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH₃, PO₄-P dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Dinas LHK NTB berperan melakukan pendampingan pemantauan oleh Kementerian LHK sejak Tahun 2021. Di Tahun 2023, pemantauan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada 23 titik sampling.

Capaian Indikator dan Nilai Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan hasil uji pemantauan kualitas air laut di pada titik pantau di atas, hasil ujinya menunjukkan bahwa hasil uji untuk seluruh parameter masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil uji lab kualitas air laut ini akan digunakan untuk menghitung IKAL (Indeks Kualitas Air Laut) yang selanjutnya juga secara komposit untuk menghitung nilai IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). Capaian nilai IKAL tahun 2023 adalah sebesar 82,88 (Kategori Baik) dari target 70,89, dan menempatkan nilai IKAL Provinsi NTB pada peringkat 1 dari 34 Provinsi se-Indonesia.

Adanya peningkatan kualitas air laut dari tahun ke tahun adalah dampak dari upaya mengintegrasikan pemantauan kualitas air laut ke dalam program pengendalian pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh KLHK salah satunya dilakukan identifikasi dan kaji masalah lingkungan penting yang berpengaruh terhadap lingkungan pesisir dan laut (yang berdampak pada perikanan, wisata dan penggunaan pesisir lainnya). Langkah solutif lainnya yang dilakukan ialah peningkatan kualitas air laut antara lain penyusunan dan penertiban ruang darat laut sesuai rencana tata ruang, penerapan baku mutu, daya dukung dan daya tampung, perizinan pembuangan limbah cair ke laut, pengelolaan B3 dan limbah B3, pengelolaan sampah, command and control, koordinasi para pihak dalam

peningkatan kualitas air laut, sosialisasi dan edukasi, pelebagaan masyarakat lokal dan sampai kepada *insentive* dan *disinsentive*.

Adapun Indeks Kualitas udara adalah parameter yang menunjukkan kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat untuk memudahkan masyarakat mengetahui kondisi kualitas udara dengan cara yang sederhana dan satuan-satuan yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Pemantauan dilaksanakan menggunakan metode passive sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi, Industri, Pemukiman dan Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO₂ dan NO₂.

Capaian Indikator dan Indikator Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2020-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2023

Data kualitas udara didapatkan dari 4 wilayah berbeda, yaitu perkantoran, pemukiman, transportasi dan industri. Tempat-tempat tersebut memiliki kriteria berbeda berkaitan dengan sumber polusi yang mempengaruhi kualitas udara. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa nilai IKU Provinsi NTB dalam kondisi baik. Terdapat 2 parameter penilaian IKU, yaitu NO₂ dan SO₂. NO₂ adalah gas coklat kemerahan yang dipancarkan dari semua mesin pembakaran. aparan jangka pendek dan jangka panjang terhadap NO₂ dikaitkan dengan peningkatan risiko masalah pernapasan. Orang yang memiliki penyakit asma, baik anak kecil maupun orang dewasa memiliki sensitivitas yang meningkat terhadap efeknya. Polutan sekunder yang disebabkan oleh adanya NO₂ di atmosfer juga memiliki efek buruk tersendiri. Sedangkan SO₂ atau Sulfur dioksida mempunyai karakteristik bau yang tajam dan

tidak mudah terbakar diudara. Masalah yang ditimbulkan oleh polutan yang dibuat manusia adalah dalam hal distribusinya yang tidak merata sehingga terkonsentrasi pada daerah tertentu, bukan dari jumlah keseluruhannya, sedangkan polusi dari sumber alam biasanya lebih tersebar merata. Transportasi bukan merupakan sumber utama polutan SOx tetapi pembakaran bahan bakar pada sumbernya merupakan sumber utama polutan SOx, misalnya pembakaran batu arang, minyak bakar, gas, kayu dan sebagainya. Pembakaran bahan-bahan yang mengandung sulfur akan menghasilkan kedua bentuk sulfur oksida, tetapi jumlah relative masing-masing tidak dipengaruhi oleh jumlah oksigen yang tersedia. Adapun salah satu faktor yang menyebabkan tercemarnya kualitas udara adalah aktifitas manusia sehari-hari seperti berkendara, pembakaran dan industri yang menghasilkan emisi gas karbon. Emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contoh dari emisi karbon ialah CO₂, gas pembuangan dari pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG, dan bahan bakar lainnya yang mengandung hidrokarbon. Proses-proses pembakaran yang dilakukan selama kegiatan dalam insutri ini menghasilkan emisi gas karbon. Selain dari kegiatan industry, kegiatan berkendara yag dilakukan sehari-hari juga menyumbangkan emisi gas karbon diudara. Emisi karbon hasil dari aktivitas berkendara atau yang dikenal juga sebagai emisi gas buang adalah sisa pembakaran yang terjadi di dalam ruang pembakaran pada kendaraan bermotor. Sisa pembakaran ini terdiri dari beberapa zat berbahaya yang dikeluarkan melalui knalpot.

Indeks kualitas udara NTB masuk dalam kategori “Baik” dan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2023 karena adanya upaya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik penaatan pemantauan, (2) pelaporan, (3) parameter baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, (4) pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Perusahaan juga

diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang pengujian emisi udara manual atau sesuai dengan dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH kab/kota setempat, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian LHK. Upaya peningkatan indeks kualitas air yang telah disebutkan di subbab sebelumnya berdampak sekaligus pada penanganan kualitas udara Provinsi NTB. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara dalam evaluasi PROPER, syarat penerbitan rekomendasi KLHS dan AMDAL/UKL-UPL, serta membangun komitmen dengan masyarakat melalui program adiwiyata/kampung iklim, dan membangun kerjasama penanganan dan pengurangan sampah dengan berbagai pihak lainnya.

Adapun yang terkait dengan Indeks kualitas tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau, mencapai nilai 66,60 tahun 2023 atau mengalami peningkatan jika dibandingkan di tahun 2022 sebesar 65,61 poin. Capaian sampai tahun 2023 masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 69,70 akibat masih maraknya gangguan keamanan hutan dan keterbatasan anggaran untuk penanaman lahan kritis. Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Gangguan keamanan hutan belum terpetakan dengan baik sehingga lokasi dan intensitas gangguan tidak dapat diantisipasi dalam rangka pengendalian dan pengamanan hutan yang efektif dan efisien. Sebagian besar lahan perambahan saat ini telah berubah fungsi menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan lahan yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain, jika tidak ditangani dengan segera.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan, pengembangan HHBK dalam rangka industrialisasi sektor kehutanan,, pengamanan hutan, melakukan monitoting ijin penggunaan kawasan hutan, penyelesaian permasalahan tenurial, dan melakukan verifikasi lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan, serta kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan

2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, dengan indikator kinerja Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Pengurangan Sampah.

Sampai tahun 2023, Persentase Penanganan Sampah ditargetkan sebesar 70% dengan realisasi 49,64%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 70,91%. Sedangkan Persentase Pengurangan Sampah ditargetkan sebesar 30% dengan realisasi 15,65%, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 51,17%. Dengan demikian capaian pengelolaan persampahan samapi akhir RPJMD sebesar 65,29% atau jauh dari yang ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2023. Angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD karena adanya beberapa kendala terkait minimnya sarpras pengangkutan sampah, reaktivasi TPS 3R, dan pembangunan serta pengembangan pusat-pusat pengolahan sampah skala desa, belum optimalnya pencatatan data pengurangan sampah di sebagian besar Kab/Kota dan masih banyaknya timbunan sampah illegal di sungai, pantai, hutan dll akibat rendahnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun sampai tahun 2023, nilai neraca pengelolaan sampah terus mengalami peningkatan karena beberapa upaya yang dilakukan melalui implementasi 8 pilar zero waste, antara lain :

- a. Membangun regulasi
- b. Penyediaan sarpras
- c. Revitalisasi gotong royong
- d. Sosialisasi pilah olah sampah dari sumbernya
- e. Diversifikasi usaha bank sampah
- f. Edukasi dan kampanye
- g. Pelibatan para pihak
- h. Industrialisasi pengelolaan sampah

Sampai tahun 2023, terdapat 21 peraturan yang telah ditetapkan dalam mengoptimalkan pengelolaan persampahan di NTB antara lain sebagai berikut:

No.	Regulasi	Tentang
1.	Perda No.5 tahun 2019	Pengelolaan Sampah
2.	Pergub No. 14 tahun 2020	Jakstrada Pengelolaan Sampah
3.	Pergub No. 54 tahun 2019	Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi NTB
4.	Pergub No. 64 tahun 2020	Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri
5.	SE Gubernur NTB Nomor 660/060/DLHK/2019	Pengelolaan Sampah Menuju NTB <i>Zero Waste Province</i> 2023
6.	SE Gubernur NTB Nomor 451/249/Kesra/2019	Himbauan Pelaksanaan Program <i>Zero Waste</i> (Bebas Sampah) Tempat Ibadah
7.	SE Gubernur NTB No. 660/10/Kum/2021	Pengangkutan dan pengolahan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dari Kegiatan Komersil
8.	SE Gubernur NTB No. 660/131/PSPPL-DLHK/2021	Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemprov NTB
9.	SE Gubernur NTB No. 660/6168/DLHK/2021	Revitalisasi Gotong Royong Melalui Kegiatan Jumat Bersih
10.	Keputusan Gubernur NTB Nomor 660.1-479 Tahun 2019	Pembentukan Tim Percepatan Pengurangan dan Penanganan Sampah Provinsi NTB
11.	Keputusan Gubernur NTB Nomor 660-942 Tahun 2019	Penetapan Bank Sampah Induk Regional di Provinsi NTB
12.	Perda Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2019	Pengelolaan Sampah
13.	Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 18 Tahun 2019	Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga Kabupaten Lombok Timur
14.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2019	Perizinan Pengelolaan Sampah
15.	Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 41 Tahun 2019	Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga Kabupaten Lombok Utara
16.	Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 46 Tahun 2019	Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
17.	Peraturan Walikota Bima Nomor 28 Tahun 2019	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah
18.	Peraturan Walikota Mataram Nomor 31 Tahun 2019	Kebijakan dan Strategi Kota Mataram dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
	Instruksi Gubernur Pengelolaan Sampah Nomor No.660/03/Kum/Tahun 2022	Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan Sekolah
	Surat Edaran Gubernur NTB No. 660/06/Kum/Tahun 2022	Pengurangan Potensi Sampah pada Kegiatan Seremonial
	Surat Edaran Sekretaris Daerah NTB No. 660/37/PDASRPM/2022	Penggantian Karangan Bunga Menjadi Tanaman Bunga/Buah Dalam Pot

Dalam penyediaan sarana dan prasarana, sampai tahun 2023 telah terbentuk Bank Sampah sebanyak 492 unit di NTB dan didorong untuk mengolah sampah 73ndicat. Sampai saat ini sudah ada 53 unit Bank Sampah yang mengelola sampah organik dan 73ndicat dengan Pemkab/Pemkot, terus berusaha mendorong agar pada setiap Desa/Kelurahan bisa terbangun paling tidak 1 unit Bank Sampah/Usaha pengelolaan sampah. Sedangkan kerjasama pengelolaan sampah yang dilakukan untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah dengan para pihak diantaranya :

- a. Kerjasama DLHK NTB dengan PT. CPE Cell terkait Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPAR Kebon Kongok
- b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste dengan 10 Kab/Kota
- c. Perjanjian Kerjasama dengan 6 Universitas (UNRAM, UNU, STP Mataram, UNIZAR, Univ. HAMZANWADI, UMMAT), yang sudah ada Kerjasama Universitas 45 dan UIN Mataram
- d. Kerjasama Pemerintah Provinsi NTB dengan Universitas Bakrie dalam Memorandum of Understanding yang mengintegrasikan Zero Waste dan Agrowisata Dalam Pertanian Berkelanjutan Melalui Budidaya Larva Black Soldier Fly (BSF)
- e. Pelibatan Kementerian dan UPT Kementerian terkait (KLHK dan BPPW NTB)
- f. Kerjasama dengan NGO dan Komunitas (GIZ, Mitra SAMIYA, Forest For Life, Kalbe, LCC, LOC, TCC, Komunitas Nol sampah, Ddoro Care, BOFA Denmark)
- g. Kerjasama Pengelolaan Incinerator Limbah Medis
- h. Kerjasama Litbang RDF dengan PLN
- i. Kerjasama Komersialisasi Produk RDF dengan PLN
- j. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam aksi World Clean Up Day (WCD)

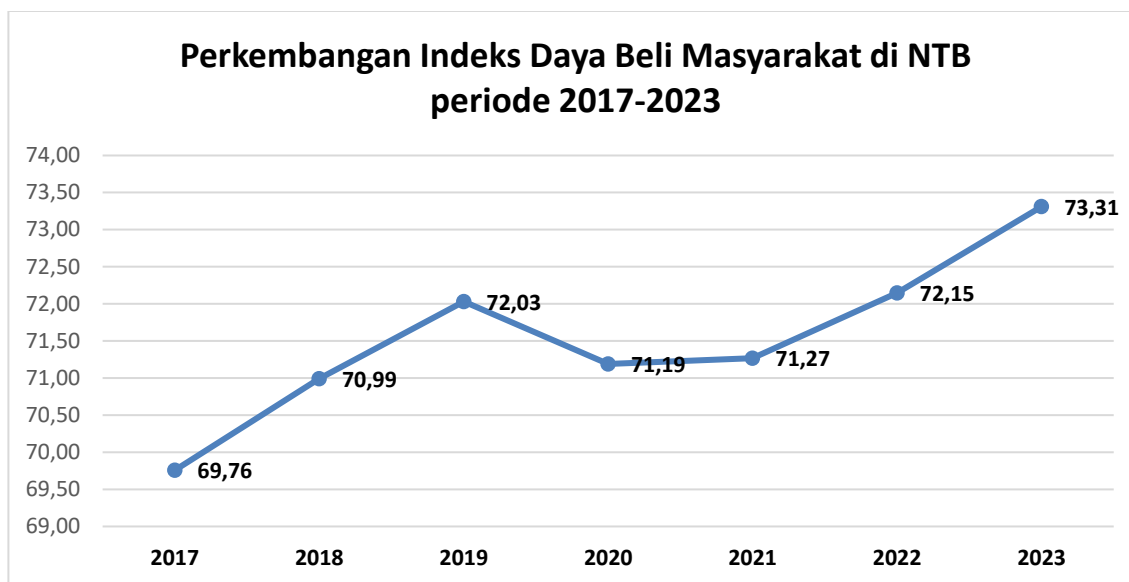
Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah yang telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pelaksanaan Eco Office.** Kegiatan Eco Office terdiri dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim penilai dengan melakukan pembinaan dan penilaian kepada 47 OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB

- b. Penanganan Timbulan Sampah Ilegal.** Kegiatan penanganan ini secara rutin, terutama di Jalan Nasional, jalur Senggigi – Mandalika.
- c. Penanganan Sampah Sungai.** Kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu sosialisasi, pembinaan, pengawasan/monitoring, evaluasi, gotong royong/clean up, pemberian bantuan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti bak sampah dorong, karung, composter bag, dan kendaraan roda 3 pengangkut sampah.
- d. Kegiatan PILSADAR (Pilah Sampah Dari Rumah).** Program Pilah Sampah Dari Rumah merupakan program untuk menangani masalah sampah disumbernya. Pengolahan sampah disumbernya menjadi sangat penting untuk mengurangi beban pengelolaan di hilir. Program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengelolaan sampah dengan memilah sampah yang ada di rumah. Kegiatan pilah sampah dari rumah terutama sampah akan mengurangi jumlah sampah lingkungan yang berakhir di TPA, disamping itu juga bantuan masyarakat dalam memisahkan sampah di rumah memiliki nilai ekonomi.

3.1.5. CAPAIAN MISI KELIMA: NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI

NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi dengan 4 (empat) tujuan pembangunan yaitu terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Daya Beli, terwujudnya penanggulangan kemiskinan dengan indikator kinerja Tingkat Kemiskinan, terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan dengan indikator kinerja Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), serta terwujudnya perindustrian yang unggul dengan indikator kinerja Pertumbuhan Industri.



Sampai dengan tahun 2023, pencapaian pada misi ini terus mengalami kemajuan meskipun blm sesuai dengan target yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari progress peningkatan indeks daya beli masyarakat yang terus tumbuh positif dari 65,76 poin pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,31 poin pada tahun 2023. Peningkatan daya beli masyarakat ini didukung oleh meningkatnya nilai investasi di NTB dalam 5 tahun terakhir mencapai Rp.98 triliun, jauh melampaui dari target RPJMD 2019-2023 sebesar Rp.68,2 triliun. Sementara dari sisi produksi, semakin meningkatnya kontribusi sektor pertanian sebagai sector basis perekonomian di NTB yang telah mencapai 26,15% (tanpa tambang).

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, meskipun tingkat kemiskinan di NTB mengalami fluaktuasi dan belum sesuai yang ditargetkan akibat adanya bencana gempa dan bencana covid-19 serta adanya kebijakan kenaikan BBM, namun dalam 5 tahun terakhir pemerintah provinsi NTB telah berhasil mengurangi angka kemiskinan 0,78% dari kondisi awal pada tahun 2018 sebesar 14,63% menjadi 13,85% pada tahun 2023, serta mampu mengurangi kemiskinan ekstrem sebesar 0,65% sehingga masih tersisa 2,64% dan diharapkan menuju nol persen pada tahun 2024 sesuai dengan target pemerintah pusat. Keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan ini dengan menerapkan 3 (tiga) strategi kebijakan yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengurangan kantong-

kantong kemiskinan. Berdasarkan ketiga strategi tersebut, upaya yang telah dilakukan yaitu menjamin ketersediaan jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, meningkatkan ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, penemuan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dengan peningkatan cakupan Air Minum, peningkatan cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan peningkatan akses listrik, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan daya saing pariwisata dan industri terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan, hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan dari kedua sector tersebut, dimana pada tahun 2018 pertumbuhan sektor kepariwisataan mengalami kontraksi sebesar 4,59%, dan terus tumbuh positif menjadi 8,97% tahun 2023, sedangkan pertumbuhan sektor industri sebesar 2 % tahun 2018 meningkat menjadi 9,02% pada tahun 2023. Keberhasilan mendorong pertumbuhan pada kedua sektor tersebut didukung oleh upaya untuk meningkatkan nilai tambah pada kedua sektor tersebut dengan terus mengembangkan destinasi pariwisata melalui pembentukan desa-desa wisata serta mendorong semangat industrialisasi. Nilai tambah PDRB sektor kepariwisataan yang diukur dengan pendekatan sektor penyediaan akomodasi makan minum pada tahun 2018 sebesar Rp.76,13 miliar meningkat menjadi Rp. 128,10 miliar pada tahun 2023, sedangkan di sektor industri olahan dari Rp. 56,23 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp. 113,70 miliar pada tahun 2023.

Adapun sasaran pembangunan daerah pada misi ini sebagai berikut:

1. Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha), dengan indikator kinerja Nilai Realisasi Investasi.

Pada tahun 2021 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB sebesar Rp. 14.879.279.663.896 melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu Rp. 13.362.851.642.245 atau 111,35%. Selanjutnya pada tahun 2022 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB sebesar Rp. 21.606.673.873.316 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 15.428.818.751.352 atau 140,04%. Kemudian

pada tahun 2023, Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB sebesar Rp. 39.896.928.511.784 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.17.814.195.235.806 atau 223,96%. Capaian Nilai Realisasi Investasi selama kurun waktu tiga tahun terakhir tersebut selalu meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk menarik investor yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas:

Tabel
Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Penanaman Modal pada
DPMPTSP Provinsi NTB Tahun 2021 - 2023

Indikator Bidang Urusan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Realisasi Investasi (Rp.T)	13,362	14,879	15,428	21,606	17,814	39,896

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Bila diukur dari capaian indikator bidang urusan dalam kurun waktu pelaksanaan Rencana Strategis, terjadi pertumbuhan sebesar 185% dari tahun 2018, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp. 14.000 Miliar menjadi Rp. 39.896 Miliar

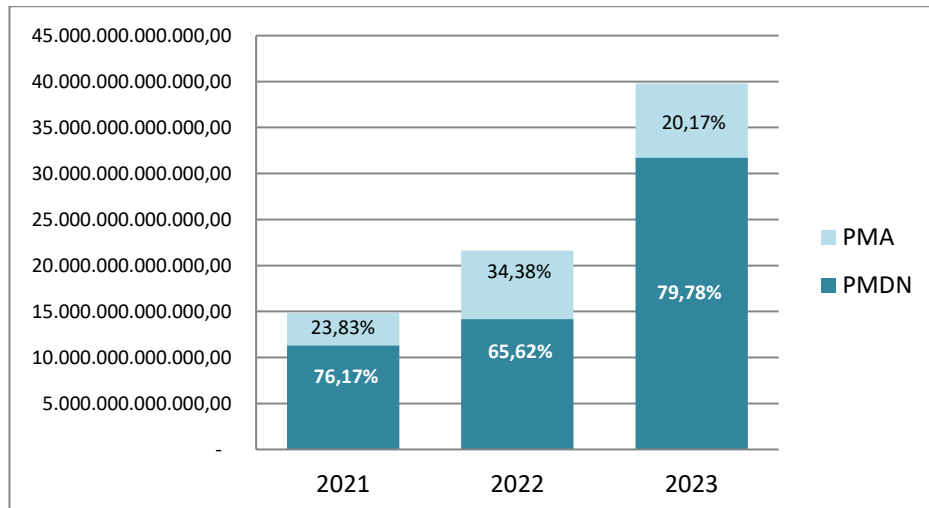
Investasi atau penanaman modal dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan investasi PMDN dan PMA Provinsi NTB tahun 2021-2023, sebagaimana tabel dan grafik berikut ini.

Tabel
Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jenis Investasi (Rupiah)				Total (Rupiah)
	PMDN		PMA		
2021	11.334.069.286.351	76,17%	3.545.204.377.544	23,83%	14.879.273.663.895
2022	14.177.661.576.421	65,62%	7.429.012.296.895	34,38%	21.606.673.873.316
2023	31.849.653.936.049	79,78%	8.047.274.575.735	20,17%	39.896.928.511.784

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Grafik
Persentase Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2021-2023



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Nilai Realisasi Investasi kategori PMDN lebih tinggi dari PMA. Tahun 2021 yaitu PMDN sebesar Rp. 11.334.069.286.351 atau 76,17%, sedangkan kategori PMA sebesar Rp. 3.545.204.377.544 atau 23,83% dari nilai total keseluruhan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 14.879.273.663.895. Kemudian pada tahun 2022, Nilai Realisasi Investasi kategori PMDN sebesar Rp. 14.177.661.576.421 atau 65,62%, sedangkan kategori PMA sebesar Rp. 7.429.012.296.895 atau 34,38% dari nilai total keseluruhan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 21.606.673.873.316. Selanjutnya di tahun 2023 Nilai Realisasi Investasi kategori PMDN sebesar Rp. 31.849.653.936.049 atau 79,78%, sedangkan kategori PMA sebesar Rp. 8.047.274.575.735 atau 20,17% dari nilai total keseluruhan nilai realisasi investasi sebesar Rp. 39.896.928.511.784 dan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB melalui DPMPTS perlu meningkatkan daya tarik yang ditentukan oleh regulasi, iklim investasi yang kondusif, sarana dan prasarana yang memadai, lembaga yang berkualitas, dan promosi yang semakin gencar, agar PMA lebih mengambil peran dalam pembangunan daerah.

Untuk sebaran capaian Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA menurut Kabupaten/Kota se-NTB periode tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2023

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi PMDN						
		2021		2022		2023		Rata- Rata (%)
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Kota Mataram	706.535.042.988	6,23	1.195.125.116.786	8,43	1.035.389.606.990	3,25	5,97
2	Lombok Utara	1.161.749.559.554	10,25	202.009.346.030	1,42	574.834.893.370	1,80	4,49
3	Lombok Barat	1.500.268.505.882	13,24	252.985.623.373	1,78	620.358.305.798	1,95	5,66
4	Lombok Tengah	4.337.920.366.830	38,27	360.856.618.894	2,55	2.723.642.685.710	8,55	16,46
5	Lombok Timur	1.441.285.552.380	12,72	78.636.909.746	0,55	663.616.052.796	2,08	5,12
6	Sumbawa Barat	1.687.904.651.737	14,89	11.577.027.797.735	81,66	24.031.792.120.302	75,45	57,33
7	Sumbawa	201.988.977.881	1,78	255.933.672.361	1,81	1.778.454.774.295	5,58	3,06
8	Dompu	53.214.365.895	0,47	64.681.893.780	0,46	96.787.448.528	0,3	0,41
9	Bima	154.416.195.962	1,36	10.076.103.488	0,07	241.892.094.838	0,76	0,73
10	Kota Bima	88.786.067.242	0,78	180.328.494.228	1,27	82.885.953.422	0,26	0,77
J u m l a h		11.334.069.286.351	100	14.177.661.576.421	100	31.849.653.936.049	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Realisasi PMDN Tahun 2023 terbesar berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan kontribusi Rp. 4.031.792.120.302 (75,45%). Dalam kurun waktu tahun 2021-2023 juga menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat masih mendominasi daya tarik PMDN di Provinsi NTB dengan rata-rata 57,33%. Hal ini disebabkan adanya pertambangan tembaga dan emas oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang berdampak pada berkembangnya sektor-sektor lainnya, misalnya sektor perdagangan, Pertanian/perkebunan dan peternakandan lain sebagainya. Kemudian menyusul Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2023, sebesar Rp. 2.723.642.685.710 (8,55%) maupun rata-rata 3 tahun terakhir (16,46%) menjadi kabupaten dengan kontribusi terbesar setelah Kabupaten Sumbawa Barat. Ini terjadi sebagai efek lanjutan dari terbangunnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dan penyelenggaraan Moto GP. Berikutnya berturut-turut disusul oleh Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 1.778.454.774.295 (5,58%), Kota Mataram Rp. 1.035.389.606.990 (3,25%), Kabupaten Lombok Timur Rp. 663.616.052.796 (2,08%), Kabupaten Lombok Barat Rp. 620.358.305.798 (1,95%), Kabupaten Lombok Utara Rp. 574.834.893.370 (1,8%), Kabupaten Bima Rp. 241.892.094.838 (0,76%), Kabupaten Dompu Rp. 96.787.448.528 (0,30%), dan Kota Bima Rp. 82.885.953.422 (0,26%). Khusus 3 Kabupaten/Kota terakhir,

baik realisasi pada tahun 2023 maupun rata-rata 3 tahun terakhir, masih menjadi yang paling rendah realisasi investasi PMDN-nya. Tentunya ke depan, akan terus dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait dalam rangka peningkatan realisasi PMDN.

Sementara itu, untuk realisasi PMA terbesar tahun 2023, Kabupaten Sumbawa Barat juga masih mendominasi, sama halnya dengan realisasi PMDN, yaitu sebesar Rp. 4.551.547.520.144 (56,56%). Kemudian pada posisi berikutnya adalah Kabupaten Dompu dengan realisasi PMA sebesar Rp. 6.180.566.870.476 (23,35%). Hal ini seiring dengan pelaksanaan kegiatan PT. Sumbawa Timur Mining selaku pemegang kontrak karya pertambangan tembaga dan emas. Baik untuk realisasi tahun 2023 maupun 3 tahun terakhir, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu menjadi 2 teratas Kabupaten dengan realisasi PMA terbesar di Provinsi NTB. Berturut-turut kontribusi kabupaten/kota menyusul Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu untuk realisasi PMA tahun 2023 adalah sebagai berikut: Kabupaten Lombok Utara Rp. 534.911.850.655 (6,65%), Kabupaten Lombok Tengah Rp. 481.418.234.696 (5,98%), Kabupaten Lombok Barat Rp. 333.110.878.161 (4,14%), Kota Mataram Rp. 163.537.604.712 (2,03%), Kabupaten Lombok Timur Rp. 56.461.531.527 (0,70%), Kabupaten Sumbawa Rp. 31.324.944.864 (0,39%), Kabupaten Bima Rp. 14.454.862.440 (0,18%), dan Kota Bima Rp. 1.534.838.773 (0,02%).

Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel
Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2021- 2023

No.	Kabupaten/Kota	Realisasi PMA						
		2021		2022		2023		Rata-Rata (%)
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	
1	Kota Mataram	99.950.475.623	2,82	406.345.552.226	5,47	163.573.604.712	2,03	3,44
2	Lombok Utara	221.598.732.590	6,25	19.063.460.385	0,26	534.911.850.655	6,65	4,38
3	Lombok Barat	244.792.935.564	6,90	342.036.723.365	4,6	333.110.878.161	4,14	5,22
4	Lombok Tengah	330.809.588.846	9,33	16.474.289.329	0,22	481.418.234.695	5,98	5,18
5	Lombok Timur	11.713.993.826	0,33	336.127.975.355	4,52	56.461.531.527	0,70	1,85
6	Sumbawa Barat	1.521.475.035.708	42,92	3.042.832.321.780	40,96	4.551.547.520.144	56,56	46,81
7	Sumbawa	30.017.194.987	0,85	17.411.038.217	0,23	31.324.944.864	0,39	0,49
8	Dompu	1.083.382.078.616	30,56	3.218.212.482.097	43,32	1.878.972.309.763	23,35	32,41
9	Bima	168.292.087	0,005	29.508.454.141	0,4	14.454.862.440	0,18	0,19
10	Kota Bima	1.296.049.697	0,04	1.000.000.000	0,01	1.534.838.773	0,02	0,02
Jumlah		3.545.204.377.544	100	7.429.012.296.895	100	8.047.274.575.735	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Meningkatnya investasi PMDN dan PMA dipengaruhi oleh investor (perusahaan) yang melakukan investasi di daerah dengan berbagai kemudahan dan fasilitasi yang diberikan kepada pelaku usaha sehingga memberikan kenyamanan dalam berinvestasi. Berdasarkan sektor, baik kategori PMDN dan PMA untuk seluruh sektor tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Untuk kategori PMDN secara keseluruhan capaian nilai realisasi investasi dari tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 total realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 11.334.069.286.351 meningkat menjadi Rp. 31.849.653.936.049 atau 181,008%. Sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar (rata-rata 51,69%) dari capaian realisasi investasi dan diikuti oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (rata-rata 13,99%) dan kemudian diikuti oleh sektor perindustrian (rata-rata 11,41%). Hal ini mengindikasikan bahwa potensi sektor pertambangan, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor yang menjadi potensi dan unggulan di Provinsi NTB, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2021 – 2023

No	Sektor	Realisasi PMDN					
		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pariwisata & ekonomi kreatif	2.361.030.370.153	20,83	1.265.742.863.001	8,93	3.892.397.973.760	12,22
2	Perhubungan Transportasi	2.263.446.554.370	19,97	290.799.027.478	2,05	373.174.710.482	1,17
3	Perdagangan	702.687.757.693	6,20	618.002.124.865	4,36	1.338.051.726.623	4,20
4	Pertanian/perkebunan dan peternakan	134.164.106.288	1,18	48.756.835.797	0,34	219.580.369.653	0,69
5	Perkebunan	-	-	-	-	-	-
6	Kehutanan dan Ling. Hidup	895.000.000	0,01	-	-	-	-
7	Perikanan	160.121.623.460	1,41	125.149.198.758	0,88	77.190.391.440	0,24
8	Peternakan	-	-	-	-	-	-
9	Ketenagalistrikan	-	-	-	-	-	-
10	PUPR	2.602.788.875.013	22,96	73.107.528.605	0,52	161.125.315.744	0,51
11	Kesehatan, Obat & Makanan	48.244.587.322	0,43	36.474.472.135	0,26	62.322.370.943	0,20
12	Pertambangan, Energi (ESDM)	2.851.273.829.390	25,16	10.336.530.634.918	72,91	18.155.590.191.264	57,00
13	Industri/Perindustrian	189.096.308.958	1,67	1.309.342.587.322	9,24	7.430.573.302.124	23,33
14	Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
15	Ketenagakerjaan	14.814.950.922	0,13	71.526.044.440	0,50	134.187.923.498	0,42
16	Pos Telekomunikasi, sistem dan transaksi elektronik	4.493.320.762	0,04	2.198.579.102	0,02	4.179.436.611	0,01
17	Pendidikan	962.002.020	0,01	-	-	-	-
18	Keuangan/ koperasi	50.000.000	0,0004	31.680.000	0,0002	1.280.223.907	0,0040
	J u m l a h	11.334.069.286.351	100	14.177.661.576.421	100	31.849.653.936.049	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Pada kategori PMA selama kurun waktu tiga tahun terakhir sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, secara total nilai realisasi investasi mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, realisasi PMA sebesar Rp. 3.545.204.377.544 atau meningkat 126,99% menjadi Rp. 8.047.274.575.735 pada tahun 2023. Sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai realisasi investasi adalah pertambangan (rata-rata 72,78%). Untuk lebih jelasnya berikut disajikan perkembangan nilai realisasi investasi PMA menurut sektor kurun waktu tahun 2021 – 2023 :

Tabel 3. 1
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2021 – 2023

No.	Sektor	Realisasi PMA					
		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	652.896.873.144	18,42	738.393.638.403	9,94	2.233.628.220.039	27,76
2	Perhubungan Transportasi	-		-		95.000.000	0,0012
3	Perdagangan	4.487.505.844	0,13	107.345.605.496	1,44	37.501.021.048	0,47
4	Pertanian/Perkebunan & peternakan	1.333.600.000	0,04	-		19.769.966.466	0,25
5	Perkebunan	-		-		-	
6	Ketenagalistrikan	-		-		-	
7	PUPR	231.271.777.967	6,52	10.479.091.432	0,14	8.150.805.566	0,10
8	Kesehatan, Obat dan Makanan	2.962.733.347	0,08	7.655.000	0,0001	-	
9	Lingk. Hidup & Kehutanan	1.208.523.999	0,03	-		-	
10	Perikanan	2.572.568.666	0,07	17.300.775.765	0,23	13.357.980.027	0,17
11	Peternakan	-		-		-	
12	Pertambangan, Energi (ESDM)	2.574.011.901.192	72,61	6.151.978.369.559	82,81	5.063.063.080.562	62,92
13	Industri/ Perindustrian	1.474.000.000	0,04	5.151.183.592	0,07	548.456.914.842	6,82
14	Pos Telekomunikasi sistem dan transaksi elektronik	72.984.893.385	2,06	398.355.977.648	5,36	122.890.575.785	1,53
15	Ketenagakerjaan	-		-		10.000.000	0,0001
16	Jasa Lainnya	-		-		-	
17	Pendidikan	-		-		351.011.400	0,0001
18	Keuangan	-		-		-	
J u m l a h		3.545.204.377.544	100	7.429.012.296.895	100	8.047.274.575.735	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Perkembangan positif dari Nilai Realisasi Investasi tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus melakukan berbagai terobosan di antaranya penetapan NTB sebagai daerah Ramah Investasi sebagai salah satu program unggulan dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif dan berbagai kemudahan penanaman modal dan fasilitas investasi hingga pemasaran. Dimulai regulasi terkait insentif/kemudahan penanaman modal sampai

kebijakan penyederhanaan prosedur dan regulasi perizinan, kemudahan persyaratan, waktu pemberian izin hingga penyediaan fasilitas lainnya. Tahun 2023 Kontribusi Sektor Pertambangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Perindustrian menduduki tiga besar realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat baik itu PMDN maupun PMA, dengan perincian bahwa sektor Pertambangan/Energi atau Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp. 23.218.653.271.826; posisi kedua Sektor Perindustrian sebesar Rp. 7.979.030.216.966; disusul sektor Pariwisata sebesar Rp. 6.126.193.799.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya di Layanan Perizinan, sejak tahun 2017 sampai dengan 2023 telah menggunakan aplikasi dan terus dikembangkan baik yang merupakan produk dari daerah maupun dari pusat, dimana saat ini aplikasi yang digunakan adalah OSS (online single Submission). Aplikasi ini lebih memberikan kemudahan kepada pengusaha/investor untuk membuat izin usaha investasinya di daerah. Sistem ini mewajibkan pengusaha untuk melakukan pendaftaran ulang (registrasi) perusahaannya pada aplikasi OSS dengan membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). Kelebihan aplikasi ini adalah mampu memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang ada pada OSS yang dilaksanakan sesuai dengan standar perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaian yang diberikan, setelah NIB dikeluarkan namun belum berlaku efektif jika belum memenuhi komitmen artinya bahwa perusahaan diharuskan untuk mengurus izin utama dan izin penunjang yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Jumlah bidang perizinan (izin dan non izin) pada tahun 2023 sebanyak 5178, terdiri dari 5155 izin dan 23 non izin. Terjadi peningkatan izin sebanyak 43,23% dari tahun 2021 ke tahun 2023, sedangkan untuk non izin sebanyak 9,52%. Jumlah Bidang Perizinan Tahun 2021-2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel
Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2021-2023

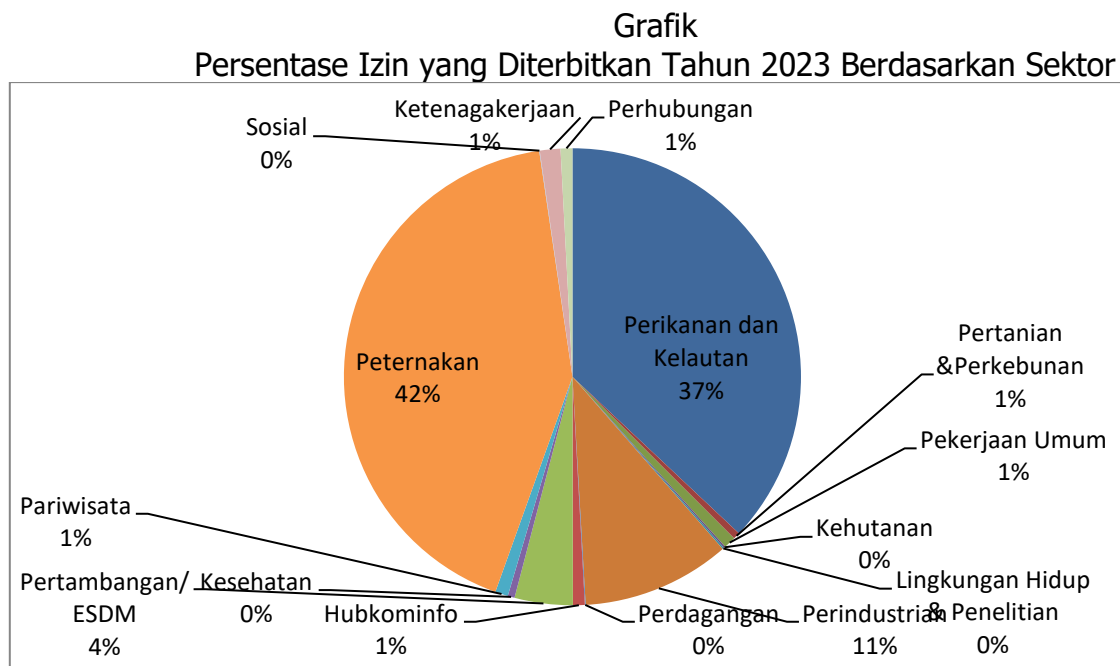
No	Bidang Perizinan	Izin			Non Izin			Jumlah 2023
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0
1	Perikanan dan Kelautan	610	617	1908	0	2332	0	1908
2	Pertanian & Perkebunan	3	0	25	0	23	0	25

No	Bidang Perizinan	Izin			Non Izin			Jumlah 2023
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	
3	Koperasi & Umkm	1	0	0	0	6	0	0
4	Pekerjaan Umum	36	18	44	0	29	0	44
5	Kehutanan	11	19	6	2	19	6	12
6	Lingkungan Hidup & Penelitian	51	4	6	0	4	0	6
7	Perindustrian	0	0	541	0	277	0	541
8	Perdagangan	1	4	3	3	5	2	5
9	Perkebunan	0	0	0	0	0	0	0
10	Hubkominfo	59	0	43	0	2	0	43
11	Pertambangan/ ESDM (2021)	195	242	212	0	350	0	212
12	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	0
13	Kesehatan	16	1	25	0	19	0	25
14	Pariwisata	0	0	47	0	56	0	47
15	Pertanahan	0	0	0	0	0	0	0
16	Peternakan	2612	1273	2175	0	1273	0	2175
17	Sosial	4	22	2	16	22	15	17
18	Pendidikan	0	0	0	0	0	0	0
19	Ketenagakerjaan		0	75	0	72	0	75
20	Perhubungan		7	43	0	82	0	43
Jumlah		3599	2207	5155	21	4571	23	5178

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan penerbitan izin dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu sebesar 2207 izin menjadi 5155 izin atau peningkatan sebesar 133,57%. Izin yang terbit paling banyak pada bidang peternakan (2.175 izin), berturut-turut disusul bidang perikanan dan kelautan (1.908 izin), perindustrian (541 izin), pertambangan (212 izin), ketenagakerjaan (75 izin), pariwisata (47 izin), pekerjaan umum (44 izin), perhubungan dan kominfotik (43 izin), Perhubungan (43 izin), pertanian dan perkebunan (25 izin), kesehatan (25 izin), kehutanan (6 izin), lingkungan hidup dan penelitian (6 izin), perdagangan (3 izin), dan sosial 2 izin. Untuk bidang koperasi dan UMKM, perkebunan, perencanaan pembangunan daerah, pertanahan, pendidikan masih belum mendapat perhatian dari para pengusaha. Tentunya ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih meningkatkan daya tarik pada bidang-bidang tersebut. Sementara itu, untuk kategori non izin, hanya ada 3 sektor yang diterbitkan, yaitu social 915), kehutanan (6), dan perdagangan (2).

Persentase Izin yang Diterbitkan Tahun 2023 Berdasarkan Sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2023

DPMPTSP merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab untuk membuka layanan perizinan yang menjadi kewenangan gubernur, berkoordinasi dengan instansi lain untuk memastikan semua layanan publik yang dibutuhkan masyarakat bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di MPP, termasuk standar pelayanan, profesionalisme petugas, dan transparansi. Sejak tahun 2023, DPMPTSP berhasil mewujudkan pelaksanaan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota, yaitu Kota Mataram yang berlokasi di Mataram Mall, Jl. Majapahit No. 67 dan Kabupaten Lombok Tengah berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 107, Leneng, Praya. Mall Pelayanan Publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tujuan DPMPTSP untuk meningkatkan kemudahan berusaha, investasi, dan kualitas pelayanan publik di NTB. Dengan terus meningkatkan kualitas dan jangkauan layanannya, Mall Pelayanan Publik dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB. Mall Pelayanan Publik (MPP) di NTB merupakan sebuah tempat terpadu yang menyediakan berbagai layanan publik dari berbagai instansi pemerintah, baik

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik yang dibutuhkan dalam satu tempat.

2. Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas, dengan indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan.

Sektor Pertanian dalam arti luas memberikan kontribusi sangat besar dalam perekonomian NTB. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 23,88% dengan realisasi sebesar 26,15% (tidak memperhitungkan pertambangan bijih logam), melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 109,51%. Pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Sektor ini masih paling dominan dengan nilai PDRB harga berlaku mencapai Rp. 33,57 triliun sedangkan harga konstan mencapai Rp. 22,19 Triliun. Sub sector tanaman pangan masih dominan dengan kontribusi mencapai 53,29% atau Rp. 13,91 Triliun. Disusul peternakan mencapai 22,02%, sub sector perikanan mencapai 21,88%.

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas dipengaruhi oleh meningkatnya produktivitas sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, komoditi yang masih menjadi andalan produksi pertanian dan banyak diminati oleh para petani adalah padi dan jagung dengan produksi padi mencapai 1.543.738 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan jagung pipilan kering sebesar 2.328.930 ton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB
Tahun 2019-2023

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (Ton)					
		2019	2020	2021	2022	2023	
						TARGET	REALISASI *)
1.	Padi (GKG)	1.420.182	1.317.190	1.419.560	1.452.945	1.323.117	1.543.738
2.	Jagung (Pipilan Kering)	2.374.245	1.730.459	2.005.573	2.531.492	1.752.479	2.328.930
3.	Kedelai (Biji Kering)	80.925	32.415	19.412	9.713	32.658	24.858

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2023

*) Potensi Data Produksi Tanaman Pangan 2023

Data produksi tanaman pangan, produksi padi mencapai 1.543.738 ton Gabah Kering Giling/GKG berdasarkan Data Asem Produksi Tanaman Pangan tahun 2023, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022 meningkat 5,88 persen atau sebesar 90.793 ton. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya luas panen dan produktivitas padi selama tahun 2023. Disamping itu, menurut data UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian bahwa persentase luas pertanaman yang aman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) adalah sebesar 98,02 persen dari target sebesar 96,5% Tanaman aman dari gangguan OPT dan DPI.

Produksi Jagung

Komoditas jagung telah terbukti memberikan andil yang besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Komoditi jagung dapat menjadi penggerak perekonomian rakyat, dan mampu sebagai salah satu program strategis dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB. Capaian produksi jagung tahun 2023 sebesar 2.328.930 ton pipilan kering (Angka Sementara 2023), naik sebesar 1.005.813 ton (76,02%) dari target PK tahun 2023 sebesar 1.323.117 ton. Peningkatan produksi jagung tersebut disebabkan 1). Meningkatnya minat petani dalam usahatani jagung karena produksinya lebih tinggi dari produksi kedelai, 2). Pendapatan petani jagung jauh lebih besar dari pendapatan petani kedelai meskipun biaya usahatani lebih besar, 3). Jaminan harga pasar jagung sudah pasti.

Tabel
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung
Tahun 2020-2023

No	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023
1.	Luas Tanam	Ha	389.819	344.098	329.953	210.542,20
2.	Luas Panen	Ha	282.893	288.769	333.876	320.462
3.	Produksi	Ton	1.730.459	1.811.119	2.531.492	2.328.930*)
4.	Produktivitas	Kw/Ha	61,17	62,72	69,44	72,67

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, ATAP 2020, ATAP 2021, ATAP 2022, ASEM (Angka Sementara) 2023*)

Produksi Kedelai

Komoditi kedelai merupakan komoditi tanaman pangan utama ketiga setelah padi dan jagung, baik di tingkat provinsi maupun ditingkat nasional. Kedelai masih menjadi komoditas impor dikarenakan banyaknya permintaan akan komoditi tersebut sebagai olahan pangan. Capaian produksi kedelai Tahun 2023 sebesar 24.858 ton biji kering (Data Angka ASEM tahun 2023). Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2022, kedelai naik sebesar 15.145 (60,93 %). Akan tetapi jika dibandingkan dengan target PK tahun 2023 sebesar 32.658 ton biji kering tidak dapat tercapai. Penurunan produksi kedelai sejak 5 (lima) tahun terakhir disebabkan karena petani kurang berminat menanam kedelai. Hal ini dikarenakan (1) Tidak adanya jaminan pasar terhadap harga kedelai petani lokal. Petani juga resah dengan serbuan kedelai impor yang harganya bisa lebih murah dengan kedelai local, (2) Kurangnya perlindungan pemerintah terhadap petani kedelai lokal. Hal ini ditandai dengan diterapkannya kebijakan tarif impor kedelai sebesar nol persen. Sehingga Petani kedelai mengalami kerugian karena harga produksi kedelai mereka lebih mahal dari pada harga kedelai impor.

Produksi Tanaman Hortikultura

Cabai dan bawang merah merupakan komoditas unggulan hortikultura di Provinsi NTB dengan bentuk produksi untuk tanaman Cabai adalah buah segar dan bawang merah dalam bentuk umbi basah. Tahun 2023 produksi buah cabai segar mencapai 83.864 ton, dibandingkan produksi tahun 2022 yaitu 71.738 ton naik 14,46 persen atau 12.126 ton.

Peningkatan produksi maupun produktivitas komoditas cabe di Prov. NTB pada tahun 2023 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya peningkatan luas tanam/minat petani untuk menanam cabe yang disebabkan karena harga relatif stabil dan menguntungkan petani sehingga banyak petani yang semula tidak menanam cabe beralih menanam cabe secara swadaya. Selain itu peningkatan luas tanam juga didukung juga dengan adanya program pemerintah baik itu bersumber dari anggaran APBN dari Kementerian Pertanian maupun APBD di masing-masing Kab/Kota.

Produksi bawang merah dalam bentuk umbi basah pada tahun 2023 produksi 212.618 naik 5,39 persen dibandingkan produksi tahun 2022 sebesar 201.155 ton. Jika dibandingkan target PK 2023 sebesar 191.571 ton naik 21.047 ton.

Peningkatan produksi maupun produktifitas bawang merah di provinsi NTB terutama di Kab. Bima sebagai sentra bawang merah dikarenakan peningkatan luas tanam yang ditandai dengan adanya beberapa kecamatan yang semula tidak menanam, namun ditahun 2023 mulai menanam bawang merah walaupun harga berfluktuasi namun masih menguntungkan petani. Selain itu peningkatan luas tanam juga didukung dengan adanya beberapa program pemerintah terutama yang bersumber dari anggaran APBN seperti UPLand yang di peruntukkan untuk beberapa Kab/Kota.

Secara umum Produksi maupun luas panen Manggis di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan produksi tahun 2022. Jika dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya meningkat 12,06% atau sebesar 2.300 ton. Kenaikan produksi tertinggi terjadi di Kabupa ten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara karena intensitas hujan yang rendah yang berdampak pada pembungaan yang akan berkembang menjadi buah, penambahan luas tanam dan panen yang meningkat di Kabupaten Lombok Utara, permintaan pasar yg tinggi dan harga yg stabil sehingga ada kesadaran petani untuk melakukan perawatan/pemeliharaan seperti pemberian pupuk organik supaya hasil produksi serta provitasnya lebih maksimal dan serangan OPT yang bisa dikendalikan.

Tabel
Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB
Tahun 2019-2023

NO	JENIS TANAMAN	2019	2020	2021	2022	PRODUKSI (Ton) 2023	
						TARGET	REALISASI *)
1.	Cabai (buah segar)	119.926	119.082	78.624,50	71.738	119.975	83.864
2.	Bawang merah (umbi basah)	161.411	188.740	222.619,70	201.155	191.571	212.618
3	Manggis (buah segar)	11.556	20.644	24.850,20	16.778	20.799	19.078

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, ATAP 2019, ATAP 2020, ATAP 2021, ATAP 2022 dan Angka Sementara 2023 *)

Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditi unggulan Provinsi NTB di bidang perkebunan adalah jambu mete, kopi, tembakau, kakao, dan kelapa. Produksi perkebunan tersebar di kabupaten/kota. Adapun produksi komoditi perkebunan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel
Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB
Tahun 2019-2023

NO	KOMODITI	PRODUKSI (TON)				PRODUKSI (TON) 2023	
		2019	2020	2021	2022	TARGET	REALISASI *)
1	Kopi	6.566,36	5.616	6.327,70	6.384,35	5.658	6.481
2	Kelapa	48.766,08	47.646	48.851,24	48.892,38	48.003	48.854
3	Kakao	2.219,35	2.566	2.638,63	2.520,26	2.585	2.549
4	Jambu Mete	10.410,72	11.313	11.616,70	10.850,09	11.398	10.824
5	Tembakau	43.068,47	57.065	52.631,98	59.786,26	57.623	60.568

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2023 *) ASEM (Angka Sementara) Tahun 2023

Dilihat dari data angka sementara produksi perkebunan Nusa Tenggara Barat tahun 2023, komoditi perkebunan yang mencapai target yang telah ditetapkan adalah komoditi kopi, tembakau dan komoditi kelapa, sedangkan kakao, jambu mete tidak mencapai target. Pada tahun 2023 produksi kopi mencapai 6.481 ton naik sebesar 1,49% dibandingkan produksi tahun 2022 atau sekitar 96,65 ton. Produksi kelapa pada tahun 2023 sebesar 48.854 ton turun sebesar 0,08% atau 38 ton dibandingkan produksi tahun 2022. Bila disandingkan dengan target PK tahun 2023, yaitu 48.003 ton meningkat sebesar 1,74%. Produksi jambu mete tahun 2023 menurun 0,24 persen dibandingkan produksi tahun 2022 bila dibandingkan target PK tahun 2023 menurun 5,04 persen atau sebesar 574 ton. Produksi tembakau tahun 2023 sebesar 60.568 ton naik mencapai 8,02% dibandingkan produksi tahun 2022 atau sebesar 4.855,22 ton. Peningkatan/penurunan beberapa komoditi perkebunan disebabkan antara lain yaitu :

1. Peningkatan produksi kopi meningkat karena adanya intensifikasi tanaman yang dilakukan dengan dana yang bersumber dari anggaran APBD kabupaten dan swadaya yang dilakukan petani, disamping itu cuaca yang mendukung juga salah satu faktor yang mendukung produksi kopi tahun 2021;

2. Produksi kelapa mengalami penurunan disebabkan karena kurangnya pemeliharaan yang mengakibatkan serangan hama, curah hujan rendah dan panen muda karena harga jualnya lebih tinggi terutama di bulan puasa.
3. Produksi kakao mengalami penurunan terutama karena meningkatnya serangan hama Jamur Akar Coklat (JAC) dan iklim rendah (curah hujan kurang).
4. Produksi jambu mete mengalami penurunan karena kurangnya pemeliharaan oleh petani yang mengakibatkan tanaman jambu mete lebih mudah terserang OPT, iklim yang kurang mendukung dan banyaknya tanaman yang tua dan rusak

Komoditas Tembakau

Produksi tembakau virginia pada tahun 2023 sebesar 45.716,43 ton mengalami kenaikan sebesar 4.136,14 ton dibandingkan produksi tahun 2022, sedangkan tembakau rakyat juga mengalami kenaikan dari 14.686,57 ton di tahun 2022 menjadi 14.851,48 ton di tahun 2023. Kenaikan produksi tembakau Virginia dan tembakau Rakyat disebabkan karena DPI/iklim yang mendukung.

Tembakau Virginia dan tembakau rakyat merupakan jenis tembakau yang diproduksi petani di NTB. Provinsi NTB saat ini terkenal dengan tembakau virginia karena merupakan salah satu daerah penghasil terbesar di Indonesia. Adapun Luas areal, produksi dan jumlah petani tembakau di Provinsi NTB tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Pada Komoditi Tembakau
Tahun 2019-2023

KOMODITI	2019		2020		2021		2022		2023	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Tembakau Virginia	27.521,25	51.381,31	25.577,29	43.923,99	22.162,78	37.751,03	23.709,18	45.099,69	23.572,70	45.716,43
Tembakau Rakyat	8.660,05	11.377,25	9.236,44	13.140,92	10.556,45	14.880,95	10.469,45	14.686,57	10.721,57	14.851,48

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2019-2022 (angka Tetap)

*) Dinas Pertanian Provinsi NTB Produksi 2023 berdasarkan ASEM (Angka Sementara)

Dalam mensukseskan program swasembada pangan di NTB. Pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan memfasilitasi ketersediaan pupuk yang memadai diharapkan dapat menunjang dan menentukan keberhasilan produksi pertanian para petani. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun 2023 ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. Alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel
Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB
Tahun 2019-2023

NO	JENIS PUPUK	TAHUN	ALOKASI (Ton)	REALISASI	
				(Ton)	(%)
1	UREA	2019	161.234,00	161.029,35	99,87
		2020	189.553,00	189.087,20	99,75
		2021	188.547,00	172.890,46	91,70
		2022	225.993,00	215.965,36	95,56
		2023	177.021,29	170.594,61	96,37
2	SP-36	2019	19.280,00	19.060,05	98,86
		2020	17.547,00	17.099,65	97,45
		2021	12.179,00	7.482,44	61,44
		2022	7.476,00	7.457,83	99,76
		2023	0	0	0
3	ZA	2019	18.640,00	18.122,05	97,22
		2020	20.112,00	19.574,63	97,33
		2021	19.745,00	18.901,44	97,05
		2022	6.734,00	6.683,56	99,25
		2023	0	0	0
4	NPK	2019	47.620,00	47.571,35	99,90
		2020	53.135,00	52.716,62	99,21
		2021	56.868,00	55.812,59	98,14
		2022	89.041,00	85.499,28	96,02
		2023	106.836,00	100.552,29	94,12
5	ORGANIK	2019	11.010,00	7.511,20	68,22
		2020	8.400,00	6.817,24	81,16
		2021	21.624,00	6.144,20	28,41
		2022	3.309,00	3.264,00	98,64
		2023	0	0	0

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2023

Faktor utama dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, adalah ketersediaan benih unggul bersertifikat yang tepat jumlah dan waktunya menjadi prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB. Hasil sertifikasi luas lulus lapangan tanaman pangan (padi, jagung dan

kedelai) yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (BPSB-P) sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Hasil sertifikasi luas lulus lapangan tanaman pangan Ptoinsi NTB
Tahun 2019-2023

NO	KOMODITI	LUAS LULUS LAPANGAN (Ha)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Padi	3.932,85	4.975,88	5.250,42	2.037,29
2.	Jagung	95,63	329,90	186,18	270,70
3.	Kedelai	3.403,41	1.663,10	866,02	50,70

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2023

Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPT-P) Provinsi NTB mengambil peran penting dalam perlindungan tanaman terhadap gangguan organisme pengganggu Tanaman. UPTD BPTP terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian serangan berbagai OPT serta mengantisipasi dampak perubahan iklim yang saat ini mulai memperlihatkan siklus yang bersahabat untuk petani. Pada tahun 2023 komoditi padi mengalami penurunan luas serangan OPT, Luas serangan OPT dan DPI pada tanaman pangan sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2019-2023

NO	KOMODITI	LUAS SERANGAN OPT (Ha)					Peningkatan/ Penurunan luas serangan OPT 2022vs 2023 (Ha)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Padi	3.294,93	9.228,67	11.530,10	7.691,98	9.132,99	-1.441,01
2.	Jagung	1.328,92	13.093,90	5.316,05	2.925,43	6.483,73	-3.558,30
3.	Kedelai	187,85	238,80	311,50	130,00	116,30	13,70

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2023

UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P) Provinsi NTB, selaku unit penyediaan benih unggul bermutu yang bersertifikat bertugas memproduksi benih padi untuk penangkar. Jumlah perbanyakan benih padi seluas 32 ha pada tahun 2023, dengan target 51 ton. Untuk perbanyakan benih seluas 30 ha hasil produksi benih 46.320 ton. Hasil perbanyakan benih padi, UPT BBI-P, sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Perbanyakan Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2019-2023

NO	KOMODITI	JUMLAH PRODUKSI (Ton)					KETERANGAN
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Padi	83.700	4.550	40.610	71.360	46.320	gagal panen seluas 1,5 Ha karena serangan tungro
2.	Jagung	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	
3.	Kedelai	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2023

Peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan perkebunan di Provinsi NTB tidak lepas dari dukungan beberapa alat dan mesin pertanian pra tanam. Demikian juga untuk peningkatan nilai tambah pada komoditas pertanian yang dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) di beberapa kelompok mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa alat pengolahan hasil. Adapun beberapa bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana tabel berikut:

Tabel
Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan, Kelembagaan Petani, Kelompok Penangkar Benih dan Regu Pengendali Hama Tahun 2019-2023

NO	URAIAN	JUMLAH (Unit)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Alat dan Mesin Pertanian					
1	Hand Traktor Roda Dua	16.443	16.434	14.553	16.387	14.576
2	Hand Traktor Roda Empat	162	232	223	273	198
3	Transplanter (Alat Tanam Padi)	267	278	253	399	257
4	Seeder (Alat Tanam Biji-bijian)	5.745	7.826	7.845	7.703	5.797
5	Hand Sprayer dan Power Sprayer (Penyemprot)	82.358	94.755	73.114	100.708	83.319
6	Swing Fog (Pengabut Pestisida)	114	118	68	137	1.471
7	Emposan Tikus	140	130	891	838	253
8	Pembersih Gulma	3.418	3.328	3.519	3.593	3.351
9	Pompa Air	32.192	15.038	10.014	7.939	8.708
	a. <4 inci	8.120	7.231	0	6.005	4.977
	b. 4 inci	5.039	5.028	0	6.216	3.731
	c. >4 inci	19.033	2.778	0	6.811	531
10	Sabit Bergerigi	857.052	1.045.694	891.601	808.594	762.791
11	Reaper (Pemotong Padi Tipe Gunting)	82.408	6.767	9.439	253	24
12	Paddy Mower (Pemotong Padi Tipe Gendong)	804	753	752	770	681
13	Stripper (Pemotong Padi Sistem Sisir)	262	63	266	80	137
14	Rice Combine Harvester	569	608	472	181	599
	a. Combine Harvester Kecil	208	198	0	262	195
	b. Combine Harvester Menengah	181	225	0	170	139
	c. Combine Harvester Besar	180	185	0	193	265

NO	URAIAN	JUMLAH (Unit)				
		2019	2020	2021	2022	2023
15	Corn Combine Harvester	41	47	34	30	25
16	Pengungkit Ubi Kayu/Ubi Jalar	63	49	63	49	187
17	Paddy Thresher	12.533	12.523	11.269	11.877	13.618
18	Corn Sheller	1.229	1.341	1.357	1.656	1.286
19	Power Thresher Multiguna (Padi, Jagung, Kedelai)	1.134	1.187	740	535	817
20	Perajang Mekanis	23	13	189	0	0
21	Winower	56	53	52	55	50
22	Flat Bed Dryer	77	85	74	78	49
23	Continuous Dryer	54	39	9	39	41
24	Small Rice Mill	974	1.015	914	921	779
25	Medium Rice Mill	591	582	578	533	570
26	Large Rice Mill	246	284	123	335	228
27	Silo	31	85	28	94	47
28	Alat Pembuat Pupuk Organik	178	193	220	201	236
	Kelembagaan Petani, Kelompok Penangkar Benih dan Regu Pengendali Hama					
29	Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	1.474	1.523	1.042	1.123	1.040
30	Kelompok Tani (POKTAN)	14.995	18.100	15.670	19.207	16.156
31	Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	1.211	1.059	982	1.032	887
32	Koperasi Unit Desa (KUD)	150	165	91	135	111
33	Kios Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN)	1.251	1.279	1.192	1.256	1.202
34	Kelompok Penangkar Benih	154	157	122	154	105
35	Regu Pengendali Hama	0	0	67	87	55

Sumber : Data SP Alsintan dan Kelembagaan Pertanian BPS

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, untuk 2023 yang belum terkumpul Data SP Alsintan dan Kelembagaan Pertanian, yaitu Kabupaten Bima

Keterangan : Data Alsintan 2019 – 2023 (Dalam Keadaan Baik dan Rusak Berat)

Dalam rangka mempertahankan produksi tanaman pertanian di Provinsi NTB, ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi lahan pertanian,
2. Pembangunan embung serta pengembangan jaringan irigasi;
3. Peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, penggunaan benih bermutu dan varietas unggul, pemupukan berimbang serta penggunaan pupuk organik;
4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan antisipasi dampak perubahan iklim;
5. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pembiayaan.

Pada sub sektor Peternakan, capaian ketersediaan produksi daging pada tahun 2023 sebesar 70.275,4 ton atau meningkat 13,82% dari tahun 2022 yaitu sebesar 61.744,3 ton. Ketersediaan Produksi telur tahun 2023 sebesar 55.758,4 ton tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu produksi telur sebesar 55.758,5 ton. Hal ini disebabkan karena banyak peternak yang mengurangi populasi ternak unggasnya akibat tingginya harga pakan, yang dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga BBM sehingga menyebabkan biaya produksi meningkat. Sedangkan bila dilihat dari tingkat konsumsi daging dan telur, pada tahun 2023 tingkat konsumsi daging masyarakat NTB sebesar 55.096,5 ton atau naik sebesar 19,72% dari tahun 2022 yaitu 46.021,2 ton. Dan tingkat konsumsi telur pada tahun 2023 sebesar 58.510,3 ton atau turun 0,03% dari tahun 2022 sebesar 58.530,5 ton.

Tabel 3. 2
Data Ketersediaan Produksi Daging dan Telur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Produksi (ton)					% Peningkatan (2022-2023)
		2019	2020	2021	2022	2023*)	Produksi
I	Daging						
1	Kuda	391.0	606.0	74.6	48.3	49.1	1.66
2	Sapi	22,684.0	13,801.0	12,517.5	9,983.0	10,083.2	1.00
3	Kerbau	1,502.9	1,426.0	831.7	712.9	712.9	0.00
4	Kambing	1,319.7	663.0	393.0	356.7	360.2	0.98
5	Domba	140.1	28.0	2,5	0.9	1.1	22.22
6	Babi	115.9	144.0	133.7	94.5	99.2	4.97
7	Ayam Ras	65,430.8	46,281.9	45,016.7	37,365.0	45,687.0	22.27
8	Ayam Buras	8,236.6	10,565.0	12,465.0	12,473.0	12,597.7	1.00
9	Itik	1,036.0	762.0	759.7	710.0	685.0	-3.52
	Jumlah I	100,857.0	74,276.9	72,191.9	61,744.3	70,275.4	13.82
II	Telur						
1	Ayam Ras	21,288.8	43,374.1	44,587.0	46,065.0	46,065.0	0.00
2	Ayam Buras	23,771.6	32,330.9	3,865.0	3,866.9	3,866.9	0.00
3	Itik	11,334.6	7,192.6	6,241.0	5,826.6	5,826.6	0.00
	Jumlah II	56,395.0	82,897.6	54,693.0	55,758.5	55,758.4	0.00

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2023

Tabel
Perkembangan Konsumsi Daging dan Telur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Konsumsi (ton)					% Peningkatan (2022-2023)
		2019	2020	2021	2022	2023*)	Konsumsi
I	Daging						
1	Kuda	312.8	484.8	60.0	38.7	39.3	1.50

No	Uraian	Konsumsi (ton)					% Peningkatan (2022-2023)
		2019	2020	2021	2022	2023*)	Konsumsi
2	Sapi	18,205.8	11,083.8	10,057.0	8,239.4	8,264.6	0.31
3	Kerbau	1,127.1	1,069.5	623.7	534.7	542.7	1.49
4	Kambing	989.7	497.3	294.8	276.5	274.2	-0.85
5	Domba	102.3	20.4	1.8	0.6	0.8	33.83
6	Babi	100.5	116.4	108.2	76.3	79.6	4.27
7	Ayam Ras	49,162.7	34,747.8	33,799.0	28,944.6	37,925.3	31.03
8	Ayam Buras	4,942.0	6,339.0	7,479.0	7,483.8	7,558.6	1.00
9	Itik	626.4	458.8	457.4	426.6	411.6	-3.52
	Jumlah I	75,569.3	54,817.8	52,880.9	46,021.2	55,096.5	19.72
II	Telur						
1	Ayam Ras	21,287.3	43,374.0	44,586.9	48,817.0	48,816.9	0.00
2	Ayam Buras	23,771.6	32,330.9	3,865.0	3,886.9	3,866.9	-0.52
3	Itik	11,334.6	7,192.6	6,241.0	5,826.6	5,826.6	0.00
	Jumlah II	56,393.5	82,897.5	54,692.9	58,530.5	58,510.3	-0.03

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2023

Adanya peningkatan produksi daging didukung oleh adanya peningkatan populasi. Peningkatan populasi dimaksud merupakan kontribusi dari Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan kewenangan provinsi. Penjaminan peredaran benih/bibit ternak dan HPT dengan melakukan pemeriksaan uji kualitas semen segar dan semen beku yang diproduksi.

Tabel
paian Kinerja Subsektor Peternakan (Ternak Sapi) Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023*	
							TARGET	CAPAIAN
1	Populasi	Ekor	1,234,640	1,285,746	1,320,551	1,219,784	1,231,923	1,231,992
2	Induk Produktif	Ekor	555,588	578,586	597,345	548,903	554,365	554,396
		%	45	45	45	45	45	45
3	Kelahiran Pedet	Ekon	444,470	462,869	477,876	411,677	443,492	415,797
		%	80	80	80	75	80	75
4	Kematian Pedet	Ekon	44,447	46,287	47,788	41,168	44,349	41,580
		%	10	10	10	10	10	10
5	Pemotongan Betina Produktif	Ekor	50	60	10	-	-	-
		%	0,54	1	0.19	-	-	.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023*	
							TARGET	CAPAIAN
6	Pengeluaran Bibit	Ekor	685	318	1,101	160	8,500	2,543
7	Pengeluaran Ternak Potong	Ekor	11,835	9,222	13,979	17,330	44,000	42,533
8	Serapan Tenaga Kerja	Orang	308,660	321,437	330,138	304,946	307,981	307,998
9	NTP Peternakan	Point	130,98	107,04	107,51	106,98	115	105,02

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Data Sementara 2023

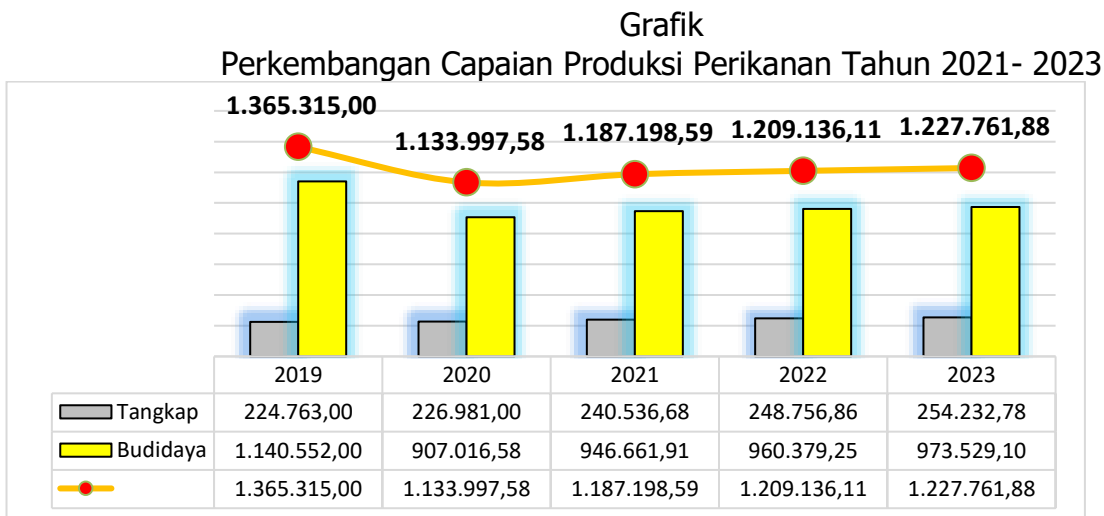
Berdasarkan tabel kinerja diatas terlihat progres pembangunan sub sektor peternakan 5 Tahun Terakhir untuk pengembangan ternak Sapi (2019 - 2023) adalah:

1. Populasi ternak sapi rata-rata dapat tercapai 88,90 persen atau rata-rata tumbuh 1 Persen/ tahun,,
2. Peningkatan indukan dewasa pada Sapi rata-rata pertahun sebanyak 45 persen dari populasi betina.
3. Mampu meningkatkan kelahiran pedet pada ternak sapi rata-rata 80 % pertahun
4. Menurunkan dan mempertahankan kematian pedet sebesar kurang 10 % dari populasi pedet yang lahir.
5. Menurunnya tingkat kejadian kasus penyakit pada ternak sebesar kurang dari 1 persen pertahun.
6. Terkendalinya pemotongan betina produktif pada ternak sapi dan kerbau sebesar kurang dari 1 persen dari populasi betina produktif.
7. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja untuk usaha peternakan sapi rata-rata sebesar 7.985 orang pertahun

Pada sub sektor Perikanan, capaian kinerja produksi perikanan tahun selama 2019-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 tercatat angka produksi sebesar 1.227.761,88 ton atau tercapai sebesar 100,93% dari target 1.262.159 ton dan jika dibandingkan dengan periode akhir renstra tercapai 81,85 %. Produksi perikanan merupakan kompilasi dari produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya, dimana produksi perikanan tangkap menyumbang angka produksi sebesar 254.232,78 ton atau 20,56 % dari total produksi perikanan dan

produksi perikanan budidaya menyumbang sebesar 973.529,10 ton atau 79,29% dari total produksi perikanan.

Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, produksi tahun 2023 ini meningkat sebesar 1,54 % dari realisasi tahun 2022 yaitu 1.209.136,11 ton dan naik 3,42 % dari realisasi tahun 2021 sebesar 1.187.198,59 ton. Akan tetapi capaian produksi tahun 2023 ini merupakan angka sementara yang dirilis, sampai dengan dilaksanakannya penghitungan angka produksi hasil validasi yang dilakukan oleh provinsi bersama dengan kabupaten/kota. Akan tetapi ditengah fluktuasi yang terjadi pada sektor produksi, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB menunjukkan trend peningkatan selama kurun waktu 4 tahun ini, yang menggambarkan terjadinya peningkatan nilai tambah pada produksi komoditas perikanan.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2023

Sementara itu pada sub sektor kehutanan, terdapat 29 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimonitoring oleh Dinas LHK NTB, antara lain 7 Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) seluas 1.685,86 hektar, 5 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 104.216 ha, dan 17 Kerjasama Pemanfaatan Hutan seluas 4.813,11 hektar. Upaya lainnya terkait pengolahan hasil hutan telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengelolaan hutan melalui Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan,

Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, dan Monitoring Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GanisPH).

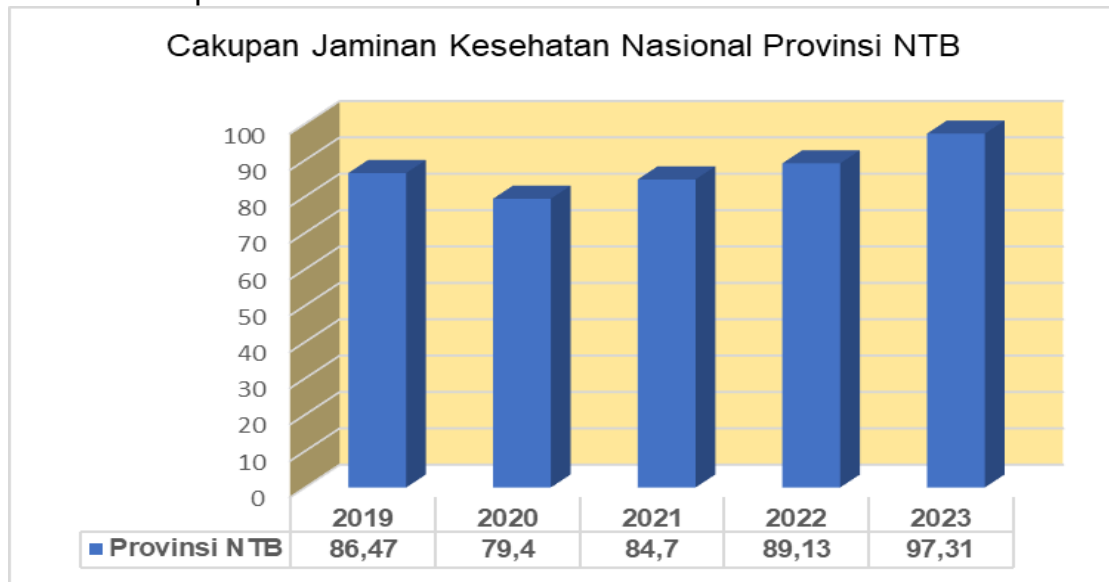
3. **Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan.**

Pada tahun 2023 seluruh penduduk miskin di NTB ditargetkan mendapat jaminan kesehatan dan sosial sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan seluruh penduduk NTB khususnya penduduk miskin mendapat jaminan kesehatan dilakukan dengan mendorong Cakupan Universal Health Coverage (UHC). UNIVERSAL Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta, merupakan target Pemerintah Indonesia untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Nusa Tenggara tahun 2020 mengalami penurunan cakupan dibandingkan dengan cakupan tahun 2019, namun pada tahun 2021 sampai tahun 2023 terus mengalami peningkatan cakupan, sehingga tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan 97,31% dimana kriteria UHC ketika cakupan sudah mencapai 95%, adapun gambaran cakupan UHC Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Grafik
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi NTB Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Grafik 3. 1
Cakupan Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

No	Kab/Kota	Jumlah Penduduk sampai tahun 2023	Segmen Peserta						Cakupan Peserta UHC	%
			PBI APBN	PBI APBD	PPU BU	PPU PN	PBPU	BP		
1	Lombok Barat	737.647	448.558	74.643	66.032	51.238	53.680	7.153	701.304	95,07
2	Lombok Utara	262.419	190.782	33.964	14.447	16.103	3.287	1.278	259.861	99,03
3	Mataram	452.812	163.312	70.009	75.522	69.916	46.927	18.391	444.077	98,07
4	Lombok Tengah	1.091.564	677.737	170.633	77.340	67.826	45.236	10.832	1.049.604	96,16
5	Lombok Timur	1.404.343	955.874	137.096	92.430	77.949	59.400	13.887	1.336.636	95,18
6	Kab. Bima	535.631	345.134	77.948	25.530	41.931	32.305	8.506	531.354	99,2
7	Dompu	262.933	150.385	51.355	12.071	24.992	13.935	6.213	258.951	98,49
8	Sumbawa Barat	148.585	75.788	31.483	23.059	16.273	2.639	1.416	150.660	101,4
9	Sumbawa	521.861	282.608	115.292	33.943	48.195	37.458	8.413	525.909	100,78
10	Kota Bima	158.197	79.699	32.924	14.304	27.567	7.132	7.012	168.638	105,93
NTB		5.576.992	3.369.877	795.347	434.678	441.990	301.999	83.103	5.426.994	97,31

Pada tahun 2023, Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional telah mencapai 5.426.994 orang atau 97,31% dari perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2023 sebanyak 5.576.992 orang, dengan rincian Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN sebanyak 3.369.877 orang, PBI dari APBD Provinsi NTB dan kabupaten/Kota sebanyak 795.347 orang, dan PBI dari APBD Kabupaten/Kota sebanyak 458.738 orang, sedangkan non PBI sebanyak 1.261.770 orang.

Sementara itu, Cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial diintervensi melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rastra, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB). Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapat pelayanan jaminan sosial mencapai 1.066.651 jiwa. Adapun cakupannya sebagai berikut:

Tabel
Data Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai Tahun 2023

NO	JENIS PMKS	JUMLAH		YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN		%
1	Keluarga Fakir Miskin	1.066.651	KK	1.066.651	KK	100
	JUMLAH	1.066.651	KK	1.066.651	KK	100

Sumber : Dinas Sosial Provinsi NTB, 2023

4. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan, dengan indikator kinerja Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 87,20 poin dengan realisasi sebesar 106,99%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 123,40%.

PPH Konsumsi merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Situasi konsumsi pangan penduduk diukur dari kondisi kecukupan konsumsi energi dan kecukupan konsumsi protein. Situasi Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2023

Pencapaian skor PPH Konsumsi yang melampaui target didukung oleh berbagai upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yang perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui :

- a) Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Program Pekarangan Pangan Lestari;
- b) Gerakan Tanam Mendukung Ketahanan Pangan;
- c) Pengembangan Pangan Lokal;
- d) Peningkatan produksi dalam negeri (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi maupun rehabilitasi) dan impor;
- e) Pengembangan komoditas sayuran dan buah hendaknya diarahkan pada pola jenis buah dan sayuran yang berbasis sumber daya lokal seperti pisang, jeruk, pepaya serta sayuran hijau dan kacang-kacangan serta kelompok sayuran yang relatif tidak tergantung musim, mudah dibudidayakan dan daya terima masyarakat cukup tinggi terhadap komoditas tersebut;
- f) Pengembangan komoditas umbi-umbian perlu dilakukan melalui penyiapan teknologi budidaya (panen dan pasca panen) serta upaya promosi dan sosialisasi teknologi industri pengolahan;
- g) Peningkatan konsumsi pangan hewani asal ikan yang mempunyai kandungan protein dan berbagai mineral mikro yang cukup tinggi melalui program/kegiatan Gemar Makan Ikan;
- h) Peningkatan konsumsi telur dan daging unggas melalui program/kegiatan Gemar Makan Telur;
- i) Sosialisasi dan kampanye menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) secara massif;
- j) Meningkatkan Kerjasama dengan organisasi/Lembaga/institusi terkait;

5. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin, dengan indikator kinerja Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, dan Cakupan Rumah Layak Huni (RLH).

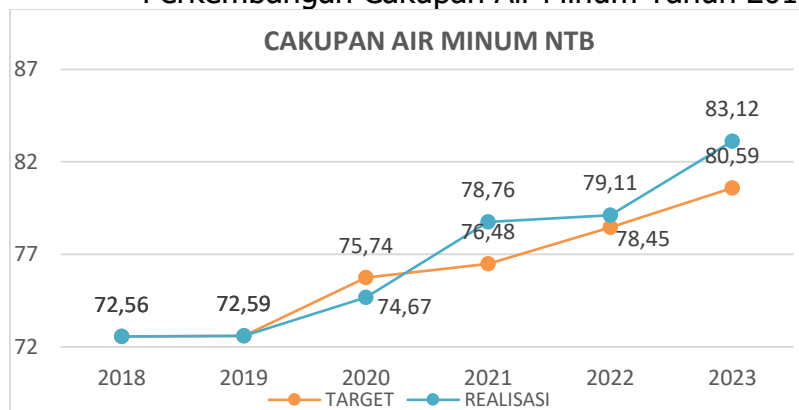
Pada akhir periode RPJMD tahun 2023, Cakupan Air Minum ditargetkan sebesar 80,95% dengan realisasi sebesar 83,12%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 103,14%. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak ditargetkan sebesar 82,46% dengan realisasi sebesar 83,12%, melampaui target dengan tingkat

capaian sebesar 100,80%. Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,99% dengan realisasi sebesar 99,99%, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100,00%. Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) ditargetkan sebesar 68,95% dengan realisasi sebesar 66,31%, tidak memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 96,17%.

Untuk memenuhi cakupan akses air minum, telah dilakukan dan menyediakan fasilitas air minum yang layak dapat bersumber yakni dari air keran ledeng (PDAM), keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Akses air minum untuk masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum yang aman yaitu berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi standar kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Sampai tahun 2023, total Penduduk di Nusa Tenggara Barat yang sudah mendapatkan Akses Air minum sebanyak 4,635,578 Jiwa setara dengan 83.12% dan telah melampaui target RPJMD untuk tahun 2023, yaitu sebesar 80,59% dengan tingkat capaian sebesar 103,14% dari jumlah penduduk sebanyak 5,576,992 dan yang Belum Mendapatkan Akses Air Minum Sekitar 941,414 Jiwa setara dengan 16.88%.

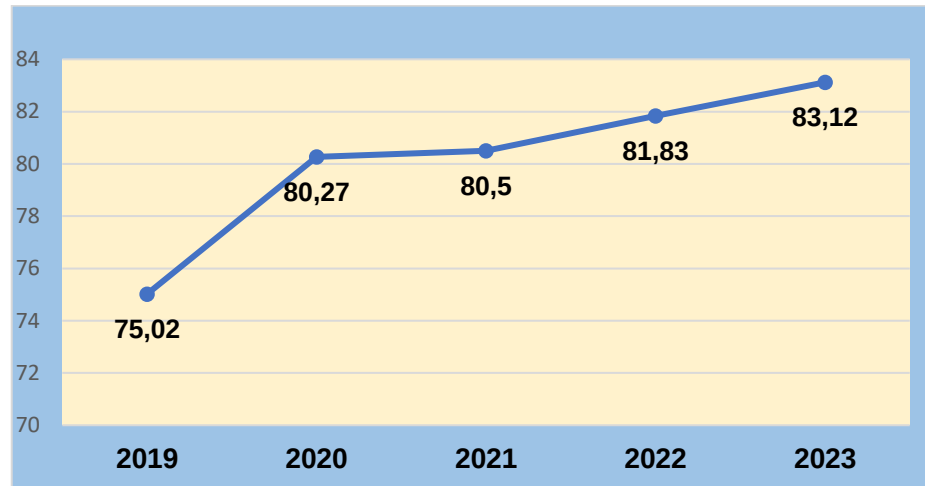
Grafik
Perkembangan Cakupan Air Minum Tahun 2018-2023



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2023

Sementara itu, proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami peningkatan kinerja dari 75,02% di tahun 2019 telah mencapai 83,12% di tahun 2023.

Grafik
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Grafik
Perbandingan Cakupan Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2023

Adapun upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi ditargetkan sebesar 99,99% dengan realisasi sebesar 99,99%, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100,00%. Tercapainya target tersebut didukung oleh ketersediaan daya listrik PLN yang semakin baik dan handal, distribusi jaringan PLN yang semakin luas dan rasio desa berlistrik sudah mencapai 100%. Intervensi Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan persentase masyarakat yang mendapatkan layanan listrik saat ini masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat kurang mampu, baik pada daerah yang sudah dilalui jaringan listrik PLN maupun yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Pada tahun 2023 Dinas ESDM Provinsi NTB hanya mengalokasikan penyambungan bagi 60 RTS. Dalam rangka meningkatkan akses listrik di seluruh Indonesia, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga memberikan bantuan pemasangan listrik gratis kepada masyarakat kurang mampu melalui program Bantuan Pasang baru Listrik (BPBL) dimana untuk tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan alokasi sebanyak 1.500 Rumah Tangga Sasaran. Berdasarkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) per Januari 2023 sebanyak 87.494 rumah tangga belum memiliki kWh meter listrik PLN. Akses dari sejumlah masyarakat tsb di atas masih menggunakan listrik secara bersama, menggunakan genset/sel tenaga surya dan tidak berlistrik sama sekali. Hal tersebut masih jauh dari kemampuan keuangan Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk mengalokasikan anggaran pemasangan listrik bagi masyarakat miskin. Disamping itu, dilakukan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan realisasi bauran energi sampai tahun 2023 telah mencapai 22,43%.

Untuk meningkatkan cakupan Rumah Layak Huni (RLH), telah dilakukan penanganan melalui sumber dana APBD Provinsi NTB. Untuk tahun 2023 capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 149 unit. Data penanganan RTLH yang bersumber dari APBD provinsi kurun waktu tahun 2018-2023 di kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB Tahun 2018–2023

NO.	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN						TOTAL
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	KOTA MATARAM	110	0	66	2	6	0	184
2	LOMBOK BARAT	291	25	105	18	3	30	472
3	LOMBOK TENGAH	444	15	137	30	80	26	732
4	LOMBOK TIMUR	651	98	327	76	20	42	1214
5	LOMBOK UTARA	108	12	2	6	4	5	137
6	SUMBAWA	156	52	151	50	1	18	428
7	SUMBAWA BARAT	61	0	91	9	0	6	167
8	DOMPU	81	0	38	5	10	14	148
9	BIMA	176	10	45	1	6	4	242
10	KOTA BIMA	93	0	11	2	2	4	112
TOTAL		2.171	212	973	199	132	149	3836

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2023

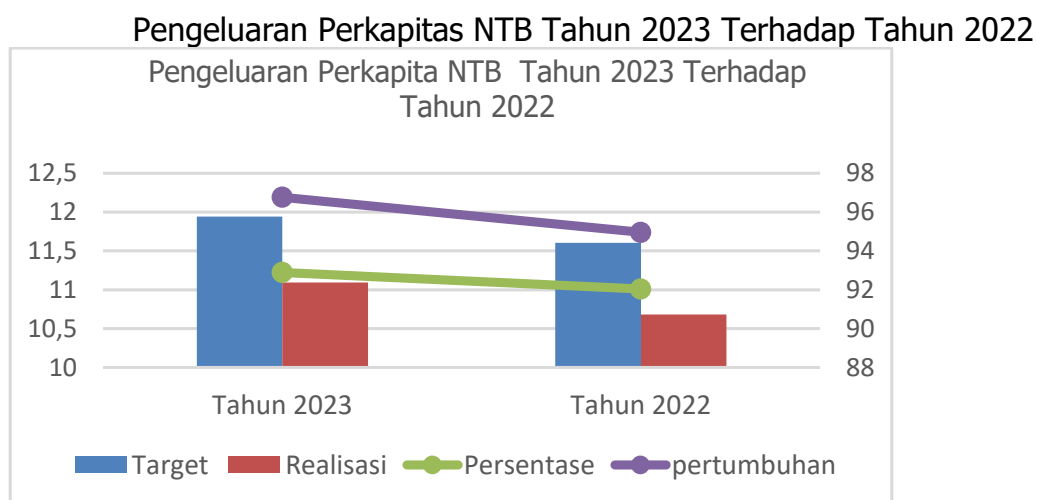
6. Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok, dengan indikator kinerja Inflasi.

Untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, telah ditetapkan dalam 5 tahun pelaksanaan RPJMD 2019-2023 rentang toleransi inflasi sebesar 3,0 - 4,0%. Dalam 5 tahun terakhir inflasi yang terjadi di NTB relatif stabil berada pada kisaran 2-4%, namun pada tahun 2022 ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,23%. Inflasi terjadi karena adanya kebijakan kenaikan harga BBM yang menyebabkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Transportasi sebesar 22,36 persen; Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 6,62 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 3,92 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 3,81 persen; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 3,66 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 3,13 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,94 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 2,47 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,89 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,89 persen. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,76 persen.

7. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan indikator kinerja Pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2023, Pengeluaran per kapita penduduk NTB ditargetkan sebesar Rp. 11,94 juta dengan realisasi sebesar Rp. 11,1 juta, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 92,89%.

Tingkat Pengeluaran Perkapita yang terjaga menjamin penduduk mampu untuk memenuhi kebutuhannya meskipun masih dalam tingkat minimum. Peningkatan nilai tambah dari berbagai sektor usaha yang dilakukan masyarakat juga dapat memicu meningkatnya pengeluaran per kapita. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Akhir tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat NTB mencapai Rp.10,681 juta per tahun, meningkat 2,92 persen dibandingkan tahun 2021. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi NTB tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,72 persen dibanding tahun 2019 dan merupakan kali pertama sejak IPM dihitung dengan metode baru. Inflasi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi lainnya, terutama terhadap pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita yang terjaga menjamin penduduk mampu untuk memenuhi kebutuhannya meskipun standar minimum dan dimungkinkan untuk meningkat bila nilai tambah dari berbagai usaha yang dilakukan masyarakat juga meningkat.



Sumber : Dinas Perdagangan Tahun 2023

Komoditas acuan dalam menentukan Pengeluaran Perkapita merupakan hasil Survei Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD-1995) antara lain: beras lokal, tepung terigu, ketela pohon, ikan tongkol/tuna/cakalang, ikan teri, daging sapi, daging ayam kampung, telur ayam, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah, tempe, jeruk, papaya, kelapa, gula pasir, kopi bubuk, garam, merica/lada, mi instant, rokok kretek/filter, listrik, air minum, bensin, minyak tanah dan sewa rumah, yang bertujuan mengetahui komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kalori per kapita sebanyak 2.100 kalori/hari.

8. Meningkatnya daya saing pariwisata, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum).

Pada tahun 2023, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) ditargetkan sebesar Rp. 137,24 miliar dengan realisasi sebesar Rp. 128,10 miliar atau mengalami penurunan jika dibandingkan pertambahan nilai pada tahun 2022 sebesar Rp. 282,70 miliar, sehingga tidak memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 93,34%. Hal ini disebabkan karena lebih banyak wisatawan yang menginap di Home Stay dan Sarhunta sehingga mempengaruhi pengeluaran wisatawan dibidang akomodasi dan makan minum. Dari sisi angka kunjungan ada peningkatan yang signifikansi setiap tahunnya angka kunjungan wisatawan di NTB. Pada Tahun 2023 kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mengalami peningkatan yang sangat pesat dibandingkan Tahun 2022, pada akhir Tahun 2023 mencapai 2.119.927. Target Realisasi ini melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu dalam hal lama menginap, ada penurunan yang sangat signifikan terutama yang menginap di hotel berbintang dari rata-rata 2,31 hari menurun menjadi 1,83 hari sedangkan pada hotel non bintang ada peningkatan 0,01 dari 1,37 hari tahun 2022 menjadi 1,38 hari pada tahun 2023.

Tabel
Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2021-2023

INDIKATOR KINERJA	2021		2022		2023	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Kunjungan Wisatawan	1,000,000	964,036	2,000,000	1,376,295	2.000.000	2.119.927
Nusantara	900,200	952,146	1,400,000	1,249,756	1.400.000	1.441.549
Mancanegara	99,800	11,890	600,000	126,539	600,000	678.378

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2023

Tingkat Penghunian Kamar Dan Lama Menginap Di Provinsi NTB
Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	HOTEL BINTANG				HOTEL NON BINTANG			
		UNIT	KAMAR	TPK (%)	LAMA MENGINAP (HARI)	UNIT	KAMAR	TPK (%)	LAMA MENGINAP (HARI)
1	2019	93	4,537	58.25	3.25	1,278	8,984	57.8	3.15
2	2020	90	4,986	25.01	1.88	1,109	13,841	15.13	1.32
3	2021	88	7,675	33.62	2.23	1,244	11,678	14.37	1.43
4	2022	86	8,002	34.06	2.31	1,390	9,511	19.14	1.37
5	2023	274	8,837	37.94	1.89	1,089	9,621	38.80	1.38

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2023

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan disebabkan karena adanya beberapa event nasional dan internasional yang dilaksanakan di Provinsi NTB seperti MotoGP, MXGP, dan event-event lainnya.



Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2023

Upaya lain yang telah dilakukan adalah pengembangan destinasi pariwisata khususnya pengembangan 99 desa wisata yang menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

9. Meningkatnya daya saing industri, dengan indikator kinerja Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan.

Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.179,91 miliar dengan realisasi sebesar Rp.113,70 miliar, belum memenuhi target dengan tingkat capaian sebesar 63,20%. Dalam upaya untuk meningkatkan daya saing industri, terdapat 3 (tiga) sasaran yang dilakukan yaitu Pertambahan SDM Industri yang Memiliki Sertifikat Kompetensi, Nilai Investasi Pelaku Industri, dan pertumbuhan industri. Sampai dengan tahun 2023, Realisasi indikator persentase pertambahan SDM yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2023 ini sebesar 95,16%, yang berarti ini sudah melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2023 yaitu sebesar 50%. Berbagai pelatihan dan pendidikan telah dilaksanakan di tahun 2023 guna meningkatkan target pada indikator ini, baik itu dari penyiapan kualitas produk yang dihasilkan IKM serta kualitas sumberdaya manusia IKM. Pada tahun 2023 jumlah IKM yang telah memiliki sertifikat kompetensi bertambah sebanyak 295 orang, sehingga jumlah keseluruhan IKM yang telah memiliki sertifikat kompetensi sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 605 orang.

Disamping itu, didorong untuk meningkatkan nilai investasi investasi pelaku industri mengalami kenaikan sebesar Rp.180,4 Milyar serta peningkatan Pertumbuhan industri pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 8,97% atau setara dengan 9.928 IKM yang terdiri dari IKM formal dan non formal, sehingga data keseluruhan IKM pada tahun 2023 adalah 120.592 IKM. Untuk menghasilkan data yang valid Dinas Perindustrian membangun aplikasi online Simanis (Sistem Informasi Manajemen Industri), dengan aplikasi tersebut bisa melihat data IKM by name by address. Aplikasi tersebut diujicobakan untuk mempermudah perhitungan data pertumbuhan IKM dan Peningkatan Industri kecil ke industri menengah serta untuk validasi pendataan pelaku industri dan link and match dengan dunia usaha industri

Data IKM Provinsi NTB Tahun 2023 Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kota/ Kabupaten	Total Kumulatif IKM Formal + IKM Informal				
		s/d Tahun 2023				
		UU	TK	Nilai (Rp. 000,-)		
		(Unit)	(Orang)	Nilai Investasi	(Unit)	(Orang)
1	Kota Mataram	9.336	48.546	1.142.929.344	2.542.316.749	1.206.646.911
2	Lombok Barat	10.763	36.924	781.247.748	1.059.272.027	649.777.137
3	Lombok Utara	4.657	15.829	163.813.022	198.076.033	87.638.503
4	Lombok Tengah	39.835	83.246	145.490.319	955.913.813	377.214.821
5	Lombok Timur	26.784	111.431	8.947.561.183	1.679.455.681	1.514.857.530
6	Sumbawa Barat	2.910	9.711	69.071.020	181.609.057	121.043.296
7	Sumbawa	6.206	23.967	2.426.626.600	374.355.009	142.796.030
8	Dompu	4.723	12.654	2.123.387.938	3.175.137.549	2.660.540.405
9	Bima	8.619	26.172	70.372.875	241.807.737	115.713.941
10	Kota Bima	6.759	19.776	4.656.761.216	1.093.387.977	645.879.807
	Jumlah	120.592	388.256	20.527.261.265	11.501.331.632	7.522.108.381

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2023

Unit Usaha pada tahun 2023 sebanyak 120.592, mengalami peningkatan sebesar 8,97% dari tahun 2022. Seiring dengan meningkatnya unit usaha, terjadi pula peningkatan jumlah tenaga kerja dari 363.754 orang pada tahun 2022 menjadi 388.256 orang pada tahun 2023 atau peningkatan 6,74%. Nilai investasi pada tahun 2022 sebanyak Rp. 20.346.840.960 meningkat sebesar 0,89% menjadi 20.527.261.265 di tahun 2023.

Dengan semangat program industrialisasi, produk unggulan terus dikembangkan, penguatan dan peningkatan kapasitas IKM, serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi dan asosiasi yang ada dalam rangka memperkuat industrialisasi. Penguatan berupa amati, tiru dan modifikasi mesin-mesin yang mampu diproduksi oleh anak NTB, harapannya dapat dimanfaatkan guna mendukung pencapaian produksi hulu. Program industrialisasi diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya potensial terlatih yang dihasilkan oleh SMK maupun BLK sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Terkait pemasaran produk industrialisasi yang telah dihasilkan, dilakukan melalui kegiatan pameran pada event-event yang berskala local dan nasional,

bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi NTB dan Asosiasi IKM yang ada di NTB. Sedangkan untuk akses permodalan, dengan mendorong IKM memiliki ijin usaha yang merupakan syarat dalam memperoleh permodalan dari perbankan. Pada beberapa kegiatan, Dinas Perindustrian selalu menggandeng Perbankan untuk ikut andil dalam pengembangan industrialisasi di NTB

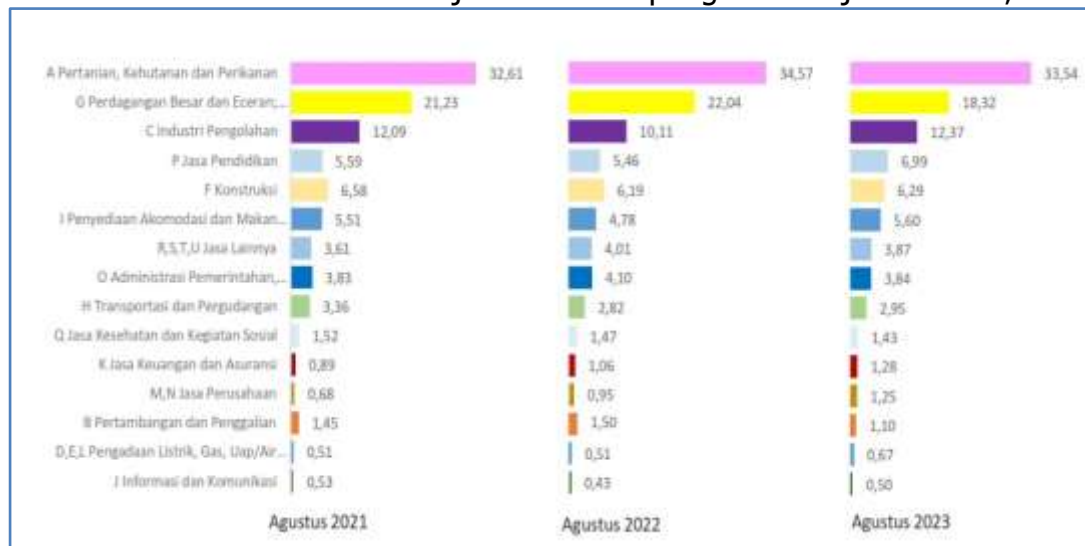
10. Menurunnya pengangguran terbuka, dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode RPJMD Tahun 2023 ditargetkan 3,17 persen, dan terealisasi sebesar 2,8 persen (tingkat capaian 113,21%). Berdasarkan BPS NTB (2023), jumlah angkatan kerja tahun 2023 sebanyak 2,98 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 177,05 ribu orang dibandingkan tahun 2022. Peningkatan jumlah Angkatan kerja sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Komposisi Angkatan kerja pada tahun 2023 terdiri dari 2,89 juta orang penduduk yang bekerja dan 83,24 ribu orang pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat seiring dengan peningkatan jumlah Angkatan kerja. TPAK laki-laki sebesar 84,18 persen lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 62,54 persen. TPAK perempuan mengalami peningkatan 3,38 persen poin dibandingkan TPAK laki-laki yang hanya mengalami peningkatan 0,92 persen. Peningkatan TPAK Perempuan yang signifikan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk pemberdayaan perempuan agar mendapat akses, partisipasi, manfaat dan control terhadap pembangunan yang sama dengan laki-laki telah memberikan outcome yang cukup baik.

Karakteristik penduduk yang bekerja dapat dilihat dari lapangan pekerjaan utama, status pekerjaan utama, Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jumlah jam kerja selama seminggu. Menurut Sakernas (2023), tiga lapangan pekerjaan yang menyerap lapangan pekerjaan paling banyak adalah pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 33,54 persen; perdagangan besar dan eceran sebesar 18,32 persen; dan industry pengolahan sebesar 12,37 persen. Tiga lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja terbesar jika dibandingkan tahun 2022 adalah industry pengolahan (2,27 persen), jasa

Pendidikan (1,53 persen) dan penyediaan akomodasi dan makan minum (0,82 persen). Sementara tiga lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah perdagangan besar dan eceran (3,73 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (1,03 persen) dan pertambangan dan penggalian (0,40 persen) :

Grafik
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2023



Sumber : BPS NTB, Keadaan Angkatan Kerja NTB, 2023

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Tahun 2023, penduduk yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 2,09 juta orang (72,30 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan formal sebanyak 801,31 ribu orang (27,70 persen). Jika dibandingkan dengan tahun 2022, penduduk yang bekerja di kegiatan formal naik sebesar 3,05 persen.

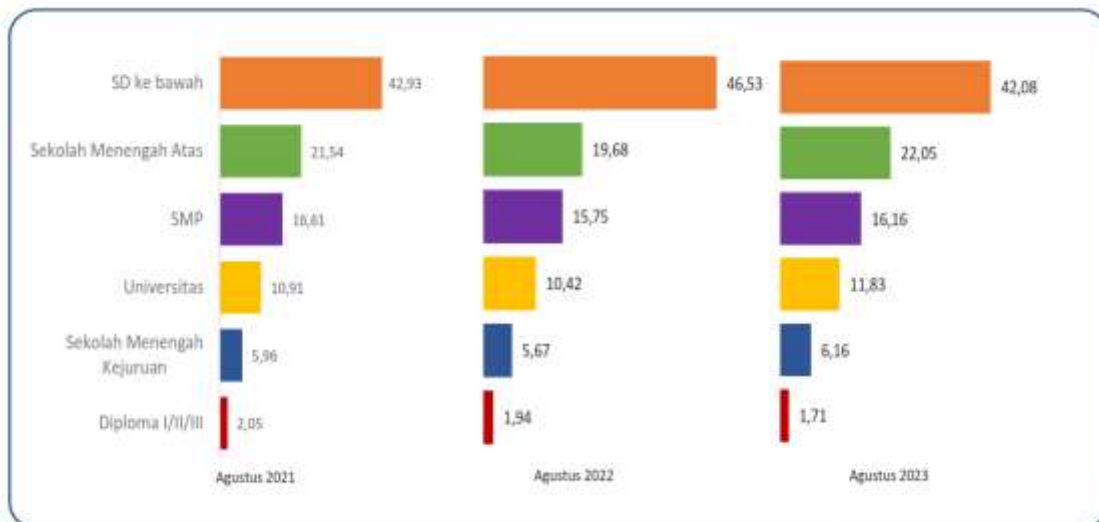
Grafik
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal, 2023



Sumber : BPS NTB, Keadaan Angkatan Kerja NTB, 2023

Produktivitas tenaga kerja dapat diindikasikan dari tingkat Pendidikan, skill yang dimiliki dan jam kerja. Tahun 2023, penduduk yang bekerja masih didominasi oleh penduduk berpendidikan SD kebawah yaitu sebanyak 42,08 persen, sementara penduduk bekerja berpendidikan diploma dan universitas sebesar 13,54 persen.

Grafik
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2023



Sumber : BPS NTB, Keadaan Angkatan Kerja NTB, 2023

3.1.6. CAPAIAN MISI KEENAM: NTB AMAN DAN BERKAH

NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan tujuan pembangunan terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia) yang diukur dengan indikator kinerja Indeks Kriminalitas, Partisipasi politik masyarakat, dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Sampai tahun 2023, indeks kriminalitas di NTB terus mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 17,25 poin tahun 2018 menurun menjadi 9,61 poin tahun 2023. Sementara itu, terkait tingkat partisipasi masyarakat NTB dalam pemilihan umum terus mengalami peningkatan, di pemilu 2014 partisipasi hanya 77 persen, sedangkan pemilu 2019 berhasil melampaui partisipasi pemilu pada tahun 2014 di NTB. Pemilu 2019 dengan tingkat partisipasi pemilu mencapai 82 persen. Adapun Pemilu Tahun 2024 mencapai 84,85%. hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berpolitik masyarakat NTB semakin meningkat.

Dalam hal pemberdayaan gender, Indeks pemberdayaan gender di NTB mengalami penurunan dari 60,06 poin tahun 2018 menurun menjadi 54,23 poin tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena salah satu komponen yang dihitung terkait keterwakilan anggota DPRD dari kalangan perempuan. Jika dibandingkan dengan periode 2014-2019 dimana tingkat proporsi anggota legislatif perempuan dari 9,23 persen sedangkan periode 2019-2024 mengalami penurunan menjadi 1,54 persen. Keterwakilan anggota DPRD dari kalangan perempuan di DPRD NTB itu hanya ada 1 orang dari total anggota sebanyak 65 orang. Namun dari komponen partisipasi perempuan dalam pembangunan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2018 persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan mencapai 17,93% dan terus meningkat menjadi 27,62% pada tahun 2023.

Untuk mewujudkan Misi NTB AMAN DAN BERKAH, dapat dilihat dari pencapaian sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase penurunan konflik sosial.**

Pada akhir RPJMD tahun 2023 ditargetkan tidak terjadi konflik sosial (nol persen) dengan realisasi sebesar 2,96%. Pencapaian yang tidak mencapai target ini disebabkan oleh karena munculnya kembali 2 (dua) kasus lama/tahun sebelumnya sehingga total kasus yang terjadi di tahun 2023 menjadi 8 kasus dari 6 kasus tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya; dampak covid 19 yang masih dirasakan masyarakat terutama dalam sektor ekonomi dan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh data tipe konflik di masyarakat yang menunjukkan terjadinya konflik sosial sebanyak 5 kasus dan konflik ekonomi sebanyak 3 kasus.

Upaya menurunkan konflik sosial sebagai wujud dari keberhasilan dalam deteksi dini dan cegah potensi konflik sosial sehingga stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keberhasilan deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial yang mencapai angka capaian 87,50 persen dan angka ini sudah melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Daerah untuk tahun 2023 yaitu sebesar 75 persen. Keberhasilan ini juga didukung melalui pelaksanaan Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Disamping itu, meningkatnya kesiapan dan kerjasama antara Pimpinan Daerah baik di tingkat Provinsi (Forkopimda NTB) maupun pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota (Forkopimda Kab/Kota se NTB) dalam mengatasi dan menindaklanjuti berbagai isu konflik sosial. Terjalannya sinergitas dengan mitra Bakesbangpoldagri NTB seperti FKDM, Jejaring Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) NTB, FPK, FKUB, Bale Mediasi, dan PPWK dan kesiapan lintas OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) baik instansi vertikal maupun daerah.

2. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah, dengan indikator kinerja Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah.

Pada tahun 2023, penurunan pelanggaran produk hukum daerah ditargetkan menurun sebesar 6,07% dengan realisasi menurun sebesar 19,44%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 320,26%.

Terdapat kasus khusus yang terjadi pada periode RPJMD ini yaitu Perda Penanganan Penyakit Menular atas wabah COVID-19 yang terjadi pada Tahun 2020 sampai 2022 dan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi pada Tahun 2023, sehingga perlunya ada pembentukan Satuan Tugas oleh Pemerintah Daerah dan penyusunan Peraturan Daerah yang ditetapkan segera dalam penanggulangan wabah penyakit menular tersebut. Selama periode 2019-2023 terdapat beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang selalu terjadi dan dilakukan penanganan baik secara penertiban atau dengan memberikan surat teguran dan pengawasan melalui Bidang Penegakan Peraturan dan Perundang-undangan Daerah diantara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jalan, yakni pelanggaran yang sering ditemukan adalah kegiatan dagang yang dilakukan di jalur pejalan kaki, penertiban yang dilakukan setiap tahun bukan berarti tidak efektif, namun Satpol PP Kabupaten/Kota juga memiliki kewenangan yang sama atau bahkan khusus dalam penegakan Perda tersebut, maka langkah yang paling efektif untuk dilakukan yakni melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terhadap penegakan Perda tersebut dan melaksanakan penertiban tersebut hanya berdasarkan aduan atau laporan dari warga atau kegiatan preventif dengan memberikan himbauan untuk tidak melakukan kegiatan lain atau mendirikan bangunan di jalur yang seharusnya digunakan sebagai pejalan kaki.
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelanggaran yang sering terjadi yakni terdapat masyarakat pelanggar yang menggunakan lahan dan atau bangunan milik Pemerintah Daerah untuk dijadikan tempat tinggal atau usaha dagang, hal ini dikarenakan area atau lahan tersebut kosong, penertiban dilakukan atas dasar permintaan atau aduan dari Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ketika akan melakukan pemanfaatan atas lahan tersebut, hal ini merupakan bentuk humanis yang dilakukan.

- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, merupakan perda dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didalamnya berisikan 10 tertib yakni tertib tata ruang; tertib jalan Provinsi dan transportasi pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; tertib daerah aliran sungai; tertib wilayah pesisir, pantai, dan pulau-pulau kecil; tertib kawasan kehutanan; tertib kawasan tanpa rokok; tertib pelayanan kesehatan; tertib tempat usaha pariwisata; tertib bangunan; dan tertib perizinan usaha.
- d. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2022 tentang Disiplin Kerja ASN Provinsi NTB, merupakan salah satu tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki dasar yang diatur dalam Pergub tersebut, sehingga Satpol PP memiliki wewenang pengawasan terhadap ASN lingkup Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

3. Meningkatnya kesadaran politik masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik.

Pada tahun 2023, persentase keterlibatan masyarakat dalam politik ditargetkan sebesar 1,00% dengan realisasi sebesar 1,70%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 170%. Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Politik diukur dengan persentase masyarakat yang terlibat secara langsung dalam berorganisasi (pengurus), hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun dari 12 (dua belas) Parpol dan sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas/LSM) baik yang melaporkan keberadaannya ataupun yang mendapat fasilitasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dalam pengurusan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada Kementerian Dalam Negeri maupun yang berstatus Badan Hukum yang proses penerbitannya melalui Kementerian Hukum dan HAM.

4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak.

Pada tahun 2023, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan ditargetkan sebesar 20,17% dengan realisasi sebesar 27,62%, melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 134,93%. Sedangkan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, sesuai target dengan tingkat capaian sebesar 100%, dengan demikian seluruh kabupaten/kota se NTB sudah mendapat predikat Kabupaten/Kota layak anak.

Upaya pemerintah provinsi NTB untuk terus meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dan menjamin adanya kesetaraan gender pada tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat Indeks pembangunan Gender (IPG) NTB yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. IPG merupakan perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki dan IPM perempuan dilihat dari kualitas dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dimensi pendidikan menggunakan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan menggunakan umur harapan hidup, serta dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran per kapita. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2020, angka IPG NTB mencapai 90,45, meningkat menjadi 90,53 pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2023, meningkat menjadi 91,39. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa pembangunan perempuan hampir sama pembangunan laki-laki di Provinsi NTB. Meskipun ada peningkatan IPG, namun indeks Pemberdayaan Gender (IDG) NTB masih dibawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan pemberdayaan gender di Provinsi NTB jauh dibawah rata-rata nasional. Rendahnya IDG Provinsi NTB dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang mencakup keterlibatan perempuan di parlemen yang hanya

sebesar 1,59%, perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 47,46%, serta sumbangan pendapatan perempuan dalam perekonomian keluarga sebesar 33,09%.

Sementara itu, Capaian indikator cakupan kabupaten/kota yang mendapatkan predikat kabupaten/kota layak anak (KLA) sampai dengan tahun 2023 mencapai 100 persen (10 Kabupaten/Kota), sedangkan cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan tahun 2023 sebesar 100 persen, melampaui target 2023 (75,52%), hal ini disebabkan karena jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak melampaui target dan semua laporan tersebut telah tertangani.

Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), didukung oleh berbagai bentuk kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

- Bimbingan teknis percepatan KLA oleh kementerian PPPA RI;
- Melakukan pembinaan kepada 10 Kab/Kota se-NTB terutama bagi kabupaten yang belum mendapatkan predikat KLA;
- Advokasi percepatan Kab/Kota Layak Anak bagi OPD/Lembaga yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA;
- Mendorong Kab/Kota untuk menyusun draft Perda, Perbub tentang Kabupaten Kota Layak Anak;
- Mengadakan webinar sosialisasi Sekolah Ramah Anak (SRA) bagi satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Dikbud Provinsi NTB, Kemenag, Provinsi dan Kab/Kota;
- Melakukan kegiatan temu forum anak tingkat Provinsi NTB untuk menyusun suara anak NTB;
- Menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi NTB untuk menyampaikan aspirasi atau suara anak kepada pemerintah daerah;
- Melakukan Pendampingan kepada operator penilaian KLA kepada dua Kab/Kota (KSB dan Kabupaten Sumbawa).

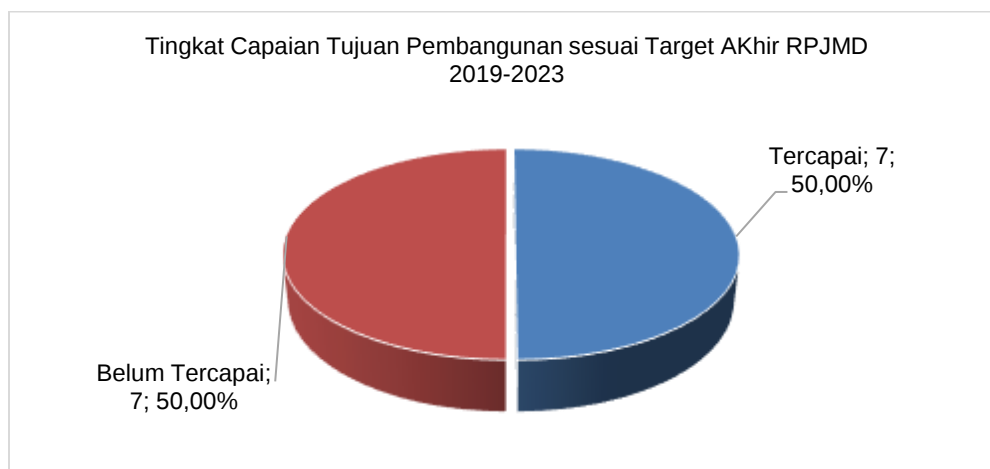
Capaian KLA Provinsi NTB 2020-2023

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023
Kota Mataram	Madya	Madya	Madya	Madya
Lombok Barat	Pratama	Madya	Madya	Nindya
Lombok Utara	-	-	-	Pratama

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023
Lombok Tengah	-	-	-	Pratama
Lombok Timur	-	-	Pratama	Pratama
Sumbawa Barat	-	-	-	Pratama
Sumbawa	-	-	Pratama	Pratama
Dompu	Pratama	Madya	Madya	Madya
Kota Bima	Pratama	Pratama	Madya	Nindya
Bima	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama

Sumber : KemenPPPA RI (SK Menteri PPPA Nomor 160 Tahun 2023)

Secara umum, tingkat capaian Visi dan Misi Pembangunan daerah Provinsi NTB yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan target akhir periode RPJMD Tahun 2019-2023 pada tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Tujuan pembangunan daerah yang memenuhi bahkan melampaui target akhir RPJMD 2019-2023 yaitu Indeks Aksesibilitas, Indeks Kesehatan, Indeks Kriminalitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Pendidikan, Pertumbuhan Industri, dan Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), sedangkan yang tidak tercapai sesuai target akhir adalah Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, Neraca pengelolaan sampah, Indeks Daya Beli, Tingkat Kemiskinan (%), Partisipasi politik masyarakat, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).



Adapun sasaran pembangunan daerah yang memenuhi bahkan melampaui target akhir RPJMD 2019-2023 yaitu Indeks Kapasitas Daerah, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase konektivitas transportasi publik, Opini BPK, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Indeks Profesionalisme ASN, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita *Stunting*, Harapan Lama Sekolah, Rata rata Lama Sekolah, Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan Air Minum, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Rasio Elektrifikasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penurunan konflik social, Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, dan Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Sedangkan sasaran pembangunan yang tidak tercapai adalah persentase kemantapan jalan, cakupan rumah layak huni (RLH), indeks kualitas tutupan lahan, pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum), pengeluaran per kapita, nilai SAKIP, indeks pelayanan publik, persentase penanganan sampah, pertambahan nilai PDRB sektor industri pengolahan, persentase pengurangan sampah, serta persentase penurunan konflik sosial

Capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2023 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel: Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (Point)			Point	142,90	139,4	129,02	128,05	122,33	119,83	115,90	115,83	Belum Tercapai
				Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,53	0,55	0,57	0,63	0,63	0,72	0,72	0,65	Melampaui
		Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas			Point	73,69	74,6	76,02	77,77	78,81	81,31	84,62	81,17	Melampaui
				Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kemantapan jalan	%	77,16	83,65	80,28	80,05	84,01	84,52	84,52	86,60	Belum Tercapai
					Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,54	50,63	50,76	57,07	50,88	52,17	56,87	54,50	Melampaui
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	73,72	74,76	78,64	90,29	88,00	92,00	93,14	89,14	Melampaui
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			Point	CC	CC	B	B	B	B	B	BB	Belum Tercapai
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
				Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	32,15	33,77	34,77	35,09	35,46	43,18	48,32	38,65	Melampaui

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	B	BB	BB	BB	A (80,01 - 90,00)	Belum Tercapai
				Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,57	0,60	0,54	0,59	0,69	0,64	0,77	0,72	Melampaui
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	3,42	4,56	3,63	3,56	3,54	3,71	3,97	4,55	Belum Tercapai
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan			Point	70,08	70,57	71,20	71,55	71,83	72,42	80,03	73,05	Melampaui
				Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,75	66,28	66,51	66,69	67,07	72,02	67,48	Melampaui
					Persentase Balita <i>Stunting</i>	%	37,20	33,49	25,50	23,33	19,23	16,84	13,49	30,49	Melampaui
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan			Point	60,39	60,85	61,68	62,42	63,21	64,14	64,61	63,10	Melampaui
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,51	13,57	13,7	13,90	13,96	13,97	13,79	Melampaui
					Rata rata Lama Sekolah	Tahun	6,90	6,93	7,27	7,31	7,38	7,61	7,74	7,07	Melampaui
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan	Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Point	56,99	75,16	64,56	70,83	69,89	70,56	71,92	68,46	Melampaui
				Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung	Indeks Kualitas Air	Point	20,25	74,63	40,23	50,98	45,10	43,39	47,78	43,03	Melampaui
					Indeks Kualitas Udara	Point	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52	89,30	90,21	87,59	Melampaui

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	lingkungan yang berkelanjutan	dan berkelanjutan		Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Point	-	-	-	67,49	80,22	89,48	82,88	71,48	Melampaui
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	61,27	66,56	65,67	44,82	65,59	65,61	66,60	69,70	Belum Tercapai
			Neraca pengelolaan sampah			%	-	-	41,71	44,82	49,02	54,98	65,29	100,00	Belum Tercapai
				Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	-	-	34,91	37,63	39,68	42,20	49,64	70,00	Belum Tercapai
					Persentase Pengurangan Sampah	%	-	-	6,80	7,19	9,34	12,78	15,65	30,00	Belum Tercapai
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulang an kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli			Point	69,76	70,99	72,03	71,19	71,27	72,15	73,31	75,56	Belum Tercapai
				Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Mily ar	11.280	14.000	10.024	11.600	14.879	21.607	39.896	68.202	Melampaui
				Meningkatnya kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	22,03	23,51	23,06	23,229 40156	26,4	26,14	26,15	23,88	Melampaui
			Tingkat Kemiskinan			%	15,05	14,63	13,88	14,23	13,83	13,82	13,85	11,92	Belum Tercapai
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	Sesuai

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
				penduduk miskin	jaminan sosial dan kesehatan										
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	77,80	78,30	85,30	91,30	90,40	94,40	94,70	87,20	Melampaui
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	-	70,48	72,59	74,88	78,76	79,11	83,12	80,59	Melampaui
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69,25	69,53	78,8	91,36	87,78	81,83	83,12	82,46	Melampaui
					Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	Sesuai
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	53,04	56,75	56,35	62,53	63,47	62,30	66,31	68,95	Belum Tercapai
				Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,70	3,16	1,87	0,68	2,12	6,23	3,02	3,0 - 4,0	Sesuai
				Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	10.640	10.351	10.377	10.681	11.095	11.944	Belum Tercapai
						%	7,27	-4,59	-0,08	-28,24	1,35	24,68	8,97	4,50	Melampaui

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	Rp. Miliar	112,36	76,13	117,21	- 444,54	15,20	282,70	128,10	137,24	Belum Tercapai
		Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan Industri			%	2,00	2,00	4,57	7,08	6,75	7,40	9,02	9,00	Melampaui
				Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	Rp. Miliar	240,99	56,28	164,96	- 110,55	94,66	87,99	113,70	179,91	Belum Tercapai
				Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,42	4,22	3,01	2,89	2,80	3,17	Melampaui
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakhlak dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	Indeks Kriminalitas			Point	18,05	17,25	12,71	13,09	10,67	8,77	9,61	13,25	Melampaui
				Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	8,70	38,10	46,15	57,14	25	50,00	2,96	0,00	Belum Tercapai
				Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	4,45	4,65	4,88	52,78	31,21	22,53	19,44	6,07	Melampaui
			Partisipasi politik masyarakat			%	78,44	77,50	82,80	80	NA	80,00	84,85	85,2	Belum Tercapai
				Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	0,40	0,50	0,60	0,65	0,61	1,26	1,70	1,00	Melampaui

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja							Target Akhir RPJMD pada Tahun 2023	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
							2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Point	59,95	60,06	55,81	51,96	52,01	53,47	54,23	61,40	Belum Tercapai
				Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	17,79	17,93	18,60	26,87	27,24	27,37	27,62	20,47	Melampaui
					Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	%	0	10	40	40	50	70,00	100,00	100	Sesuai

3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

Deskripsi capaian indikator kinerja daerah berdasarkan aspek dapat dijelaskan sebagai berikut.

4. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan 5 indikator kinerja meliputi indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Gini Ratio dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel ... Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi									
	- Dengan Pertambangan Bijih Logam	0,09	-4,5	3,90	-0,62	2,3	6,95	1,80		
	- Tanpa Pertambangan Bijih Logam	7,10	3,20	4,74	-5,17	2,86	3,42	4,89	4,5-5,5	Sesuai
2	Inflasi	3,70	3,16	1,87	0,6	2,12	6,23	3,02	3,0 - 4,0	Sesuai
3	Tingkat Kemiskinan	15,05	14,63	13,88	14,23	13,83	13,82	13,85	11,92	Belum Tercapai
4	Gini Ratio	0,378	0,372	0,379	0,386	0,384	0,374	0,375	0,297	Belum Tercapai
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,58	67,3	68,14	68,25	68,65	69,46	72,37	70,09	Melampaui

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggunjawab Indikator, 2024

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, tingkat capaiannya sebesar 60,0%. Terdapat 3 indikator yang sesuai bahkan melampaui target yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan indikator yang belum tercapai yaitu penurunan kemiskinan dengan target akhir sebesar 11,92% dengan capaian 13,85%. sedangkan untuk pengurangan tingkat

ketimpangan pengeluaran (gini ratio) ditarget akhir sebesar 0,297 dengan capaian sampai 2023 sebesar 0,375.

5. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah diukur dengan 7 indikator kinerja meliputi indikator Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesibilitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.. Capaian aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 7 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

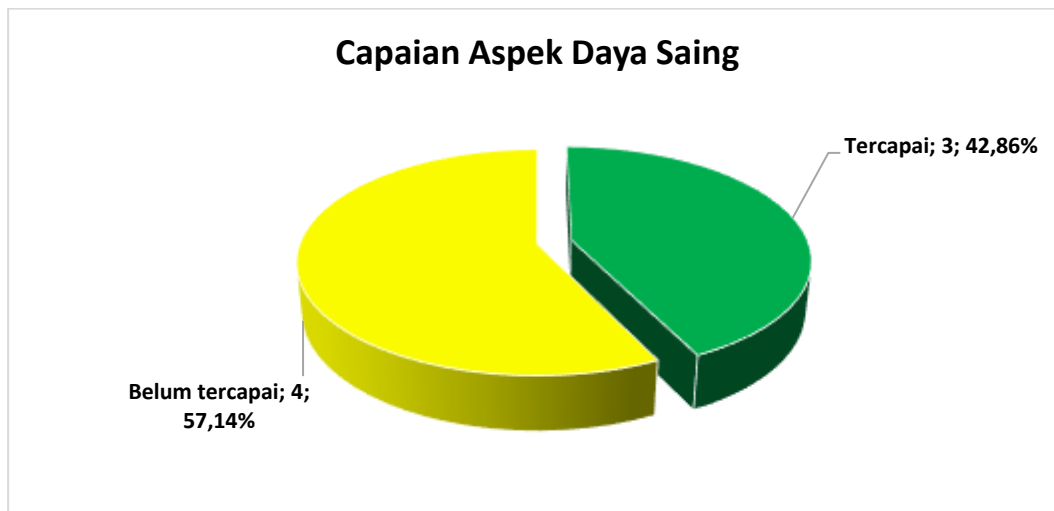
No	Aspek/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Kriminalitas	18,05	17,25	12,71	13,09	10,67	8,77	9,61	13,25	Melampaui
2	Indeks Aksesibilitas	73,69	74,6	76,02	77,77	78,81	81,31	84,62	81,17	Melampaui
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,99	75,16	64,56	70,83	69,89	70,56	71,92	68,46	Melampaui
4	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana	-	-	-	78	76,38	80,00	76,38	90,31	Belum Tercapai
5	Indeks Risiko Bencana	145,08	136,78	128,05	128,05	122,33	119,83	115,90	115,83	Belum Tercapai
6	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	B	B	B	B	B	BB	Belum Tercapai
7	Indeks Pelayanan Publik	3,42	4,56	3,63	3,56	3,54	3,71	3,97	4,55	Belum Tercapai

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2024

Dari 7 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 3 indikator tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Aksesabilitas, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sedangkan 4 indikator yang tidak

memenuhi target yaitu Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana, Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Indeks Pelayanan Publik

Gambar: Proporsi tingkat capaian Aspek Daya Saing Daerah



Dalam mewujudkan kondusivitas daerah, kondisi keamanan di NTB semakin kondusif, hal ini ditandai dengan semakin menurunnya indeks kriminalitas dari 17,25 poin pada tahun 2018 menurun menjadi 9,61 poin pada tahun 2023. Menurunnya indeks kriminalitas ini mengindikasikan bahwa NTB semakin kondusif dan menjadi tolok ukur keberhasilan masyarakat bersama aparat yang bergotong-royong menjaga wilayah. Adanya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat yang mantap.

Dalam menyiapkan infrastruktur dan konektivitas di daerah yang memadai, pemerintah provinsi NTB terus mendorong untuk meningkatkan kemantapan jalan terutama yang memiliki potensial terhadap sentral produksi pangan, kawasan industri smelter, kawasan menuju geopark Tambora, kawasan terisolir, potensial ketahanan pangan seperti komoditas kopi dan lain-lain serta kawasan menuju destinasi pariwisata, mewujudkan konektivitas transportasi publik, mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, membangun perumahan yang layak dan aman, menguatkan sistem irigasi yang mantap untuk meningkatkan produksi pangan, serta meningkatkan aksesibilitas terhadap air minum bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan dalam mewujudkan infrastruktur daerah

yang memadai ditandai dengan terus meningkatnya indeks aksesibilitas di NTB sebesar 74,6 poin pada tahun 2018 meningkat menjadi 84,71 poin pada tahun 2023.

Aspek daya saing daerah yang lain adalah kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks kualitas lingkungan hidup adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Berdasarkan metode perhitungan yang baru dengan menambah komponen kualitas air laut, IKLH Provinsi NTB sampai tahun 2023 telah mencapai 71,92 poin. Tingginya angka IKLH Provinsi NTB menunjukkan semakin baiknya kualitas kualitas air, udara, lahan dan air laut di Provinsi NTB.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, juga perlu didukung oleh birokrasi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat mengambil keputusan dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Peningkatan kualitas birokrasi dilakukan dengan dua cara, yakni penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya juga perlu didukung oleh peningkatan kualitas aparatur sipil negara sebagai SDM pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di NTB terus mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai indeks reformasi birokrasi Provinsi NTB berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB dari level CC pada tahun 2018 naik menjadi level B pada tahun 2023. Peningkatan nilai indeks ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja dari level B ke level BB serta berhasil mempertahankan Opini BPK dengan predikat WTP 12 kali berturut-turut.

6. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan Umum merupakan salah satu aspek yang dapat diukur untuk mengetahui pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 91 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 32 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 20 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 18 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan.

Aspek Pelayanan Umum ini sebagai bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun tingkat capaian kinerja aspek pelayanan umum disajikan dalam tabel berikut:

Tabel ... Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Aspek/Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1.01	Pendidikan									
1	Indeks Pendidikan	60,39	60,85	61,68	62,42	63,21	64,14	64,61	63,10	Melampaui
2	Harapan Lama Sekolah	13,46	13,51	13,57	13,7	13,9	13,96	13,97	13,79	Melampaui
3	Rata-rata Lama Sekolah	6,90	6,93	7,27	7,31	7,38	7,61	7,74	7,07	Melampaui
1.02	Kesehatan									
1	Indeks Kesehatan	70,08	70,57	71,20	71,55	71,83	72,42	80,03	73,05	Melampaui
2	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	66,74	70,35	86,47	90,3	83,22	89,13	97,31	83,00	Melampaui
3	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	69,25	69,53	78,80	91,36	87,78	81,83	83,12	82,46	Melampaui

No	Aspek/Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4	Angka Harapan Hidup	65,55	65,75	66,28	66,51	66,69	67,07	72,02	67,48	Melampaui
5	Persentase Balita <i>Stunting</i>	37,20	33,49	25,50	23,33	19,23	16,84	13,49	30,49	Melampaui
6	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	Sesuai
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Kemantapan jalan	77,16	83,65	80,28	80,05	84,01	84,52	84,52	86,60	Belum Tercapai
2	Cakupan Air Minum	-	70,48	72,59	74,88	78,76	79,11	83,12	80,59	Melampaui
3	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	50,54	50,63	50,76	57,07	50,88	52,17	56,87	54,50	Melampaui
4	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	0	0	0,00	-	9,09	14,54	25,00	27,20	Belum Tercapai
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
1	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	53,04	56,75	56,35	62,53	63,47	62,30	66,31	68,95	Belum Tercapai
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	4,45	4,65	4,88	52,78	31,21	22,53	19,44	6,07	Melampaui
2	Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
3	Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
4	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	5,07	7,14	11,75	12,21	51,38	69,35	100,00	30,18	Melampaui
5	Indeks Kapasitas Daerah	0,53	0,55	0,57	0,63	0,63	0,72	0,73	0,65	Melampaui
1.06	Sosial									
1	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai

No	Aspek/Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Persentase PMKS yang tertangani	5,07	22,42	5,29	27,22	13,21	25,74	46,36	5,37	Melampaui
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
2.01	Tenaga Kerja									
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,32	3,72	3,42	4,22	3,01	2,89	2,8	3,17	Melampaui
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,56	55,81	51,96	52,54	53,47	54,23	61,40	Belum Tercapai
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,36	90,37	90,4	90,45	90,5	91,08	91,22	90,52	Melampaui
3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	20,27	20,23	20,21	20,35	20,39	20,43	20,80	21,00	Belum Tercapai
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	17,79	17,93	18,60	26,87	27,13	27,37	27,62	20,47	Melampaui
5	Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	0	10,00	40,00	40,00	50,00	70,00	100,00	100,00	Sesuai
2.03	Pangan									
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	77,80	78,30	85,30	91,3	93,30	94,40	94,70	87,20	Melampaui
2.04	Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Air	20,25	74,63	40,23	50,98	45,10	43,39	47,78	43,03	Melampaui
2	Indeks Kualitas Udara	88,02	87,17	87,40	88,63	88,52	89,30	90,21	87,59	Melampaui
3	Indeks Kualitas Air Laut	-	-	-	67,49	80,22	89,48	82,88	71,48	Melampaui
4	Neraca Pengelolaan Sampah	-	-	41,71	44,82	49,02	54,98	65,29	100,00	Belum Tercapai
5	Persentase Penanganan Sampah	-	-	34,91	37,63	39,68	42,20	49,64	70,00	Belum Tercapai
6	Persentase Pengurangan Sampah	-	-	6,80	7,19	9,34	12,78	15,65	30,00	Belum Tercapai

No	Aspek/Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.05	Pertanahan									
1	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	0,84	0,94	0,99	1,03	1,08	0,98	0,98	0,88	Melampaui
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa									
1	Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan	14,17	20,86	33,29	38,87	43,44	36,26	36,26	33,69	Melampaui
2	Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri	-	78,00	82,00	91,74	92,74	94,53	99,31	91,00	Melampaui
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Pertumbuhan Penduduk	1,21	1,17	1,13	1,82	1,39	1,55	1,62	0,95	Belum Tercapai
2.09	Perhubungan									
1	Persentase konektivitas transportasi publik	73,72	74,76	78,64	90,29	88	92	93,14	89,14	Melampaui
2.10	Komunikasi dan Informatika									
1	Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah	N/A	N/A	Informatif	Informatif	Transaksi	Kolaborasi	Kolaborasi	Kolaborasi	Sesuai
2	Persentase Perangkat Daerah yang Informatif	N/A	N/A	5	15,00	59,09	68,20	55,56	75	Belum Tercapai
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase Koperasi Aktif	61,91	60,00	76,11	71,25	75,74	69,58	72,52	70,00	Melampaui
2.12	Penanaman Modal									
1	Nilai Realisasi Investasi	11.280	14.000	10.024	11.600	14.879,3	Rp 21.607	39.896	68.202	Melampaui
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga									

No	Aspek/Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	40	30	35	0	41	87	140	210	Melampaui
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	15	15	23	26	6	21	15	15	Sesuai
3	Proporsi wirausaha muda	67,78	67,86	68	68,07	68,07	68,35	68,56	68,39	Melampaui
2.14	Statistik									
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas	N/A	N/A	10,00	15,00	98,74	100,00	92,07	65,00	Melampaui
2.15	Persandian									
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	I	I	I+	III	II	II	III	III+	Belum Tercapai
2.16	Kebudayaan									
1	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	-	8,70	17,39	17,74	20,00	33,24	33,24	33,04	Melampaui
2.17	Perpustakaan									
1	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	47,46	47,46	100,00	100	100,00	95,57	100,00	100,00	Sesuai
2	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	17,27	19,93	26,57	27,9	32,76	36,49	42,75	39,86	Melampaui
2.18	Kearsipan									
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	16,55	16,67	33,33	50	67,45	85,26	100,00	100,00	Sesuai
C	URUSAN PILIHAN									
3.01	Kelautan dan Perikanan									
1	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	4,77	4,76	4,57	4,78	5,02	4,96	4,72	4,74	Belum Tercapai
2	Produksi Perikanan	1.207.076	1.297.325	1.370.346	1.132.017	1.237.411	1.201.455	1.227.762	1.499.957	Belum Tercapai
3	Nilai Tukar Nelayan	112,25	118,00	108,89	104,89	116,58	106,06	108,25	>110	Melampaui
3.02	Pariwisata									
1	Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	7,27	-4,59	-0,08	-28,24	1,35	24,68	8,97	4,50	Melampaui

No	Aspek/Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	0,00	0,00	20,00	40,00	67,68	91,92	100,00	100,00	Sesuai
3	Rata-rata Lama Menginap	2,64	1,50	2,05	1,98	2,23	2,31	1,89	3,35	Belum Tercapai
4	Angka kunjungan wisatawan	3.508.903	2.812.379	3.706.352	400.595	964.036	1.376.295	2.119.927	23.100.000	Belum Tercapai
5	Persentase Geosites yang Tertata	0,03	0,06	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	50,00	Belum Tercapai
6	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum)	112,36	76,13	117,21	(444,54)	15,28	282,70	128,1	137,24	Belum Tercapai
3.03	Pertanian									
1	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	22,03	23,51	23,06	23,19	26,40	26,14	26,15	23,88	Melampaui
2	Nilai Tukar Petani	107,63	111,21	115,27	109,22	105,73	107,98	120,39	>105	Melampaui
3.04	Kehutanan									
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	61,27	66,56	65,67	66,14	65,59	65,61	66,60	69,70	Belum Tercapai
2	Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya	0,08	0,08	2,13	0,19	7,29	9,22	11,09	20,08	Belum Tercapai
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral									
1	Rasio Elektrifikasi	85,10	93,83	99,55	99,98	99,98	99,98	99,99	99,99	Sesuai
3.06	Perdagangan									
1	Indeks Daya Beli	69,76	70,99	72,03	71,19	71,27	72,15	73,31	75,56	Belum Tercapai
2	Pengeluaran per kapita	9.877	9.917	10.640	10.351	10.377	10.681	11.095	11.944	Belum Tercapai
3.07	Perindustrian									
1	Pertumbuhan Industri	2,00	2,00	4,57	7,08	6,75	7,40	9,02	9,00	Melampaui
2	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan	240,99	56,28	174,60	-107,35	91,30	87,99	113,70	179,91	Belum Tercapai
3	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	240,99	1,13	1,90	7,08	3,45	3,33	4,84	3,55	Melampaui

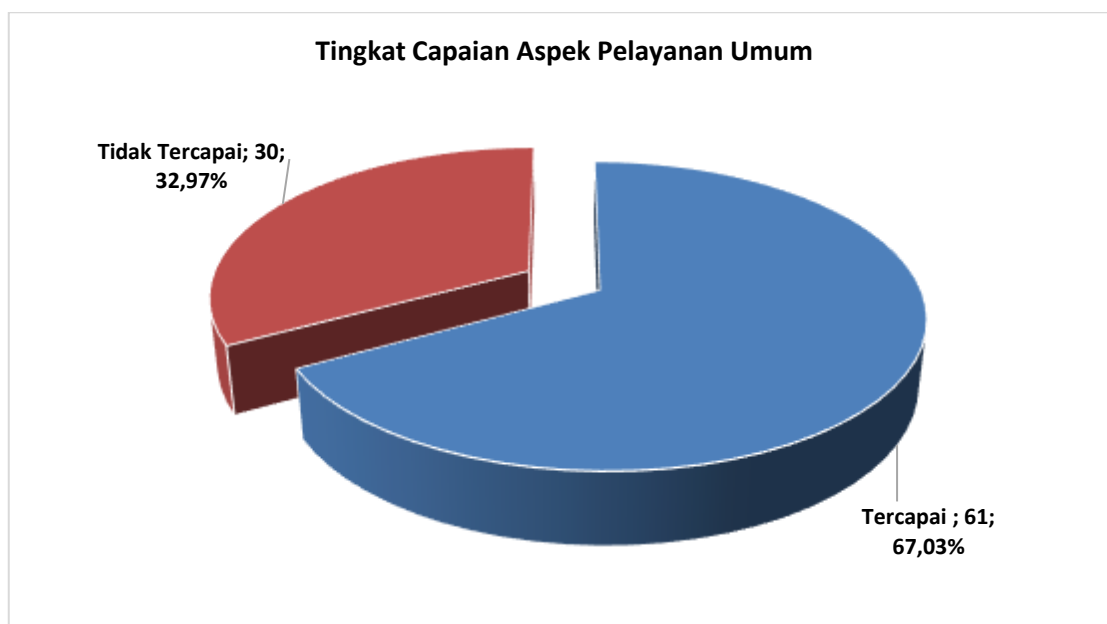
No	Aspek/Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.08	Transmigrasi									
1	Cakupan Penempatan Transmigran	75	75	80	85,00	97,57	84,63	100	100	Sesuai
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4.01	Administrasi Pemerintahan									
1	Ranking Nasional LPPD	10	3	3	3	NA	NA	3,0439	3,0747	Belum Tercapai
2	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas	100,00	100,00	100,00	136,86	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
3	Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
4	Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	-	-	25,00	0,00	28,00	34,00	100,00	45,00	Melampaui
5	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1	1	2	2	3	3,00	3	4	Belum Tercapai
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.01	Perencanaan									
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	100,00	100,00	95,09	95,56	100,00	100,00	100,00	100,00	Sesuai
5.02	Keuangan									
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,46	0,45	0,50	0,51	0,51	0,53	0,57	0,54	Melampaui
3	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	32,15	33,77	34,77	35,09	35,46	43,18	48,32	38,65	Melampaui
5.03	Kepegawaian									
1	Indeks Profesionalisme ASN	0,57	0,60	0,54	0,59	0,69	0,64	0,77	0,72	Melampaui

No	Aspek/Urusan Pemerintahan/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Capaian Kinerja					Standar (Target Akhir RPJMD)	Interpretasi > Melampaui = sesuai > Belum tercapai
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
5.04	Pendidikan dan Pelatihan									
1	Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi	NA	NA	0,16	0,16	0,25	0,25	0,26	0,28	Belum Tercapai
5.05	Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	12,00	15,00	21,00	23,33	100,00	89,00	100,00	30,00	Melampaui
5.06	Penghubung									
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01	Pengawasan									
1	Nilai SAKIP	B (>60 - 70)	B (62,53)	BB	B	BB	BB	BB	A (80,01 - 90,00)	Belum Tercapai
G	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
7.01	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	0,00	0,00	1,98	0	NA	3,63	4,00	4,89	Belum Tercapai
2	Partisipasi Politik Masyarakat	78,44	77,5	82,80	80,00	80,00	80,00	84,85	85,20	Melampaui
3	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	0	0,41	10,00	0	NA	10,00	40,00	50,00	Belum Tercapai
4	Persentase penurunan konflik sosial	8,70	38,10	46,15	57,14	25,00	50,00	2,96	0,00	Belum Tercapai
5	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	0,40	0,50	0,60	0,65	0,61	1,26	1,70	1,00	Melampaui

Sumber: BPS Provinsi NTB, OPD Penanggungjawab Indikator, 2023

* Angka Sementara

Gambar : Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum



Dari 91 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 61 indikator tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 30 indikator tidak mencapai target. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Persentase PMKS yang tertangani, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB), Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana), Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Nilai Realisasi Investasi, Persentase unit pelayan publik perangkat daerah yang menerapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pertumbuhan sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik, Persentase Balita Stunting, Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Data yang Berkualitas, Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah, Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Indeks Kualitas Air Laut, Indeks Kapasitas Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Indeks Kualitas Air, Indeks Kesehatan, Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan, Rata-rata Lama Sekolah, Persentase Desa dengan status berkembang, maju, dan mandiri, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Cakupan desa pesisir, dan lingkaran hutan yang diberdayakan, Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Indeks Profesionalisme

ASN, Angka Harapan Hidup, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Persentase konektivitas transportasi public, Persentase Kemantapan Sistem Irigasi, Persentase Koperasi Aktif, Cakupan Air Minum, Indeks Kualitas Udara, Indeks Pendidikan, Ranking Nasional LPPD, Harapan Lama Sekolah, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, Proporsi wirausaha muda, Pertumbuhan Industri, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan, Tingkat Penanganan Pelanggaran Gangguan Trantibmas, Tingkat Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan social, Cakupan Kabupaten/Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi, Kualifikasi Layanan Perangkat Daerah, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Nilai Tukar Petani, Rasio Elektrifikasi, Cakupan Penempatan Transmigran, Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas, Persentase Fasilitasi Pelayanan Keagamaan, Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, dan Opini BPK.

Adapun indikator yang tidak tercapai meliputi: Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB, Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan, Nilai Tukar Nelayan, Persentase Kemantapan jalan, Indeks Daya Beli, Partisipasi Politik Masyarakat, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH), Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum). Indeks Kematangan Keamanan Informasi , Pengeluaran per kapita, Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi, Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR), Nilai SAKIP, Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Produksi Perikanan, Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih, Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter, Persentase Perangkat Daerah yang Informatif, Persentase Penanganan Sampah, Neraca Pengelolaan Sampah (%), Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan, Rata-rata Lama

Menginap, Cakupan Luas Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya, Persentase Pengurangan Sampah, Angka kunjungan wisatawan, Persentase penurunan konflik social, Pertumbuhan Penduduk, dan Persentase Geosites yang Tertata.

6.3. CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2019-2023

Dalam RPJMD periode 2019-2023 terdapat 146 Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dipetakan kedalam 26 sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan capaian indikator kinerja program prioritas, rata-rata capaian program prioritas terhadap target akhir pada tahun 2023 mencapai 98,03% atau kategori sangat tinggi. Meskipun rata-rata capaian program sangat tinggi, namun masih terdapat beberapa program prioritas yang belum tuntas atau belum memenuhi sesuai target RPJMD yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Penyelenggaraan Jalan dengan indikator kinerja yaitu Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap, pada akhir periode RPJMD tahun 2023 ditargetkan sebesar 86,60%, dan sampai tahun 2023 tingkat kemantapan jalan di NTB sebesar 79,94%. Ketidackapaian program ini dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan anggaran terutama untuk pemeliharaan jalan baik pemeliharaan rutin maupun berkala karena keterbatasan fiskal daerah.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan indikator kinerja yaitu Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi Manajerial. Pada akhir periode RPJMD tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,10 poin, dan sampai tahun 2023 Persentase ASN Bersertifikat Kompetensi Manajerial sebesar 0,09 poin. Hal ini menunjukkan belum semua pejabat structural belum ditingkatkan kompetensinya. Ketidackapaian program ini dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan anggaran terutama untuk menyelenggarakan diklat kompetensi manajerial, disamping itu seringnya berganti pejabat.
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan indikator kinerja Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV dan Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV dengan target akhir 100%. Sampai tahun 2023 capaian kualifikasi guru SMA/SMALB dengan

pendidikan S1/DIV mencapai 91,97%, sedangkan Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV mencapai 91,40%

4. Program Pengelolaan Hutan dengan indikator kinerja persentase Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi dengan target 100% dan peningkatan Persentase Kawasan Hutan Yang Di Kelola dengan target 30%. Sampai tahun 2023, capaian Luas Kawasan Hutan Yang Dilindungi sebesar 41,0%, sedangkan capaian Kawasan Hutan Yang Di Kelola sebesar 18,17%.
5. Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator kinerja Persentase Pengelolaan Sampah dengan target 100%. Sampai tahun 2023, persentase pengelolaan persampahan 65,31%.
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator kinerja Persentase Lembaga Adat Aktif dan ditargetkan sebesar 70% pada akhir RPJMD tahun 2023. Sampai tahun 2023, capaian Lembaga adat yang aktif sebesar 51,71%.
7. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator kinerja Persentase Keterlibatan Masyarakat Dalam Politik dengan target kinerja 100%. Pada tahun 2023, tingkat keterlibatan masyarakat dalam politik mencapai 85,74%

Adapun capaian program prioritas daerah sebanyak 146 Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dipetakan kedalam 26 sasaran pembangunan daerah disajikan sebagai berikut:

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023								
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah											
Tujuan 1: Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	115,83		115,83			115,90		99,94	
Sasaran: Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Point	0,65		0,65			0,72		114,29	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase terbentuknya DESTANA dan SMAB	%	40,09	14.445	40,09	5.537	3.071,22	100,00	99,49	249,44	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
	Persentase terlaksananya Renkon, Respon Cepat PDB, Pencarian Pertolongan Evakuasi Korban, Jitupasna	%	92,50		92,50			100,00		108,11	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	%	100	7.543	100	2.572	1.159,23	100,00	142,83	100,00	Dinas Sosial
Tujuan 2: Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Aksesibilitas	Point	81,17		81,17			84,62		104,25	
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan jalan	%	86,60		86,60			84,52		97,60	
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	%	86,60	931.804	86,60	251.253	142.768	84,52	98,12	97,60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 1: Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	54,50		54,50			56,87		104,35	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kenaikan Areal Layanan Irigasi	%	76,28	342.401	76,28	91.491	145.312	78,74	95,08	103,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 2: Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas transportasi publik	%	89,14		89,14			93,14		104,49	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	81.63	14.665	81.63	5.535	384,97	97,97	97,14	120,02	Dinas Perhubungan
	Persentase Prasarana transportasi darat dalam kondisi baik	%	100		100			100		100,00	
	Persentase Prasarana terminal dalam kondisi baik	%	40		40			40		100,00	
	Persentase tersedianya Fasilitas Keselamatan Jalan dalam kondisi baik	%	52.58		52.58			52.58		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Sarana dan prasana transportasi Laut dalam kondisi baik	%	66,06	2.261	66.06	932	76,24	94,43	94,43	142,95	Dinas Perhubungan
Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi											
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	BB		BB			B		95,67	
Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	Status	WTP		WTP			WTP		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	%	100	2.275.817	100	824.559	941.670,05	100	88,60	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	%	100		100	1.202		100		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	%	75	5.689	75	2.062	3.450,03	86,00	85,68	114,67	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	%	90	3.807	90	1.447	1.271,52	179,00	98,86	198,89	INSPEKTORAT
	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	%	48,89		48,89	2.841		5		115,25	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	%	7,55	1.402	7,55	533					INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat waktu	%	97		97	2.106	201	33,33	100,00	39,68	
Sasaran 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	38,65		38,65			48,32		125,02	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Derajat Desentralisasi Fiskal	%	38,44	1.668	38,44	585	121,00	48,32	99,24	64,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	%	54,03	46.184	54,03	16.212	8.407,94	57,54	96,62	94,32	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Kategori	A (80,01 - 90,00)		A (80,01 - 90,00)			BB		91,24	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Hasil Evaluasi yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan	%	100	14.444	100	5.431	1.599	100	86,38	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023		Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
											Pengembangan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	%	100	37.833	100	14.225	7.566	100	90,73	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase PD yang Meningkatkan Nilai Implementasi SAKIP-nya	%	100	2.917	100	1.108	49	100,00	95,21	142,86	INSPEKTORAT
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	%	26,66	2.529	26,66	961	20	62,50	97,35	100,00	INSPEKTORAT
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase SAKIP Perangkat Daerah yang Baik Meningkat	%		3.842	100	1.412	777,73	100,00	99,33	100,00	Biro Organisasi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	%	100	9.485	100	3.486	853,73	100,00	96,43	100,00	Biro Pemerintahan
Sasaran 4: Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN	Point	0,72		0,72			0,77		106,94	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Aspek Sistem Informasi	Nilai	19	21.515	19	7.865	1.500	19	100	100	Badan Kepegawaian Daerah
	Nilai Aspek Perencanaan dan Pengadaan		80		80			80		100	
	Nilai Aspek Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi		135		115			115		100	
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan		136		134			134		100	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
	Nilai Aspek Sistem Informasi		19		19			19		100	
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentasi ASN bersertifikat Kompetensi Manajerial	%	0,10	51.655	0,10	18.248	2.433	0,09	80	92,76	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Fungsional	%	0,04	-	0,04			0,11		293,92	
	Persentase ASN bersertifikat Kompetensi Tekhnis	%	0,15	-	0,15			0,07		48,10	
	Persentase Pejabat Fungsional Yang Tersertifikasi	%	0,62		0,62			-		-	
Sasaran 5: Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Point	4,55		4,55			3,97		87,25	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per-satuan penduduk	%	98,90	880	98,90	346	238	99	98,68	100,26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	%	100	654	100	257	92	100	99,55	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	%	100	3.155	100	1.242	79	100	99,33	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase realisasi Kerjasama Antar Desa pada kawasan kawasan lingkaran hutan dan pesisir	%	25	267	25	119	199	36	99,72	145,04	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Perangkat Daerah yang Memfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	%	80	16.947	80	6.703	7.659	100	99,53	125,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Berbasis TIK (%)	%	65	6.229	65	2.464	899	70	99,90	107,40	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi (%)	%	30	1.531	30	605	224	100	99,56	333,33	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah (%)	%	50	1.492	50	590	176	75	99,24	150,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kab/ kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	90	300	90	115	71	90	99,77	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jumlah Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	%	100	3.406	100	1.294	868	100	93,39	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian Kckr Dan Naskah Kuno Milik Daerah	%	100	624	100	237	52	98	98,40	98,17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	Orang	43.000		43.000	1.480	1.850	48.497	100,00	112,78	Badan Penghubung Daerah
Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah											
Tujuan 1: Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Kesehatan	Point	73,05		73,05			80,03		109,56	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	67,48		67,48			72,02		106,73	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	490.193	85	176.236	97.970		93,83	#DIV/0!	Dinas Kesehatan
	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	97		97			100,00		103,09	
	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yzng sesuai standar	%	80		80			76,19		101,59	
	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	%	100		100			100		100,00	
	Persentase kab/kota melaksanakan layanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar minimal 80%	%	100		100			100		100,00	
	Persentase Kualitas Lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100		100			100		100,00	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	%	100		100			100		100,00	
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	%	3	3.651	3	1.499	1.839	3	87,16	108,40	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana kefarmasian dan alat kehatan yang memenuhi syarat (Persen)	%	95	240	95	108	94,90	100,00	94,69	105,26	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	90	163.140	90	56.163	14.877	90,00	99,39	100,00	Rumah Sakit Umum Daerah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	76,19	29.810	76,19	11.992	5.183	80,16	99,68	94,31	Rumah Sakit Jiwa Mutiaras Sukma
	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	%	80	-	80			80		100,00	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase SPM yang mencapai target	%	80,00	144.479	80,00	59.051	27.737	80,16	96,64	94,31	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting	%	30,49		30,49			13,49		155,76	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita Wasting	%	10,41	-	10,41		97.970	5,75	93,83	46,33	Dinas Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Germas (Persen)	%	80	5.060	100	1.987	236	100,00	89,48	100,00	Dinas Kesehatan
Tujuan 2: Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	Indeks Pendidikan	Point	63,10		63,10			64,61		102,40	
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79		13,79			13,97		101,31	
	Rata rata Lama Sekolah	Tahun	7,07		7,07			7,74		109,48	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	%	100	1.486.214	100	516.005	231.924	115,78	39,67	115,78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	95,28		95,28			98,50		100,41	
	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	%	98,02		98,02			98,55		100,00	
	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	70,6		70,6			87,74		101,02	
	Rasio ketersediaan ruang kelas / penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1		1			1,09		109,00	
	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	%	18		18			10,00		180,00	
	Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata- rata untuk SLB,	%	1:10		1:10			5,00		240,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembangan Kurikulum	%	100	1.987	100	723					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100	208.215	100	71.966	50.781	91,70	99,29	95,52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Persentase Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	%	100		100			91,40		95,21	
	Persentase Kepala Sekolah bersertifikat	%	100		100			100,00		100,00	
	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	%	100		70			100,00		100,00	
	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)		80		6,5						

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	%	6,5	195	100	68	-		-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	100	832	30	322	-		-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.297	100	4.339	3.349	15,00	95,10	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100		-	100,00		100,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Atlet Berprestasi	%	100	31.488	100	12.204	21.900	140,00	98,85	311,11	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan											
Tujuan 1: Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Point	68,46		68,46			71,92		105,38	
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Point	43,03		43,03			47,78		111,04	
	Indeks Kualitas Udara	Point	87,59		87,59			90,21		102,99	
	Indeks Kualitas Air Laut	Point	71,48		71,48			82,88		115,95	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	%	24,24	1.025	24,24	369	397	100,00	79,63	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	30	2.835	10	1.020	671	10,00	99,36	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	lokasi	3	233	1	109	48	1,00	98,29	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	unit	210	232	210	109	34	71,00	97,44	710,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	usaha/ kegiatan	30	605	30	218	70	163,00	93,27	271,67	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	%	10	632	10	228	132	7,69	87,96	76,90	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	kelompok	0	-	-	-	-		-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengaduan	60	641	20	231	69	4,00	92,04	20,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Point	69,70		69,70			66,60		95,55	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	%	100	61.711	100	22.201	5.374	41,00	90,03	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	10		-	18,17		181,70	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503	2.843	30.503	1.023	395	32.518,92	99,52	106,61	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	48,67	2.125	17,70	765	491	9,46	99,66	172,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	DAS	4,00	14.296	4,00	5.143	142	50,00	94,94	156,25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	90,31	3.018	90,31	1.444	459	-	91,71		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tujuan 1 : Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	Neraca pengelolaan sampah (%)	%	100,00		100,00			65,29		65,29	
Sasaran 2: Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Sampah	%	70,00		70,00			49,64		70,91	
	Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00		30,00			15,65		52,17	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	100	15.916	100	5.794	8.277	65,31	83,77	65,31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi											
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	Indeks Daya Beli (Point)	%	75,56		75,56			73,31		97,02	
Sasaran 1: Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	17.814		17.814			39.896,00		223,96	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Perentase Peningkatan Minat Investasi	Persen	60	1.099	60	10	236	10,00	96,45	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	Persen	100	2.629	100,00	1.050	150	80,00	99,87	100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	Persen	93	1.954	93	780	6	100,00	98,63	107,53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi Investasi dengan Target Daerah	Persen	60	2.703	60	1.080	688	278,57	91,83	464,29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Cakupan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi	Persen	100	428	100	171	-	100,00		100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sasaran 2: Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kontribusi PDRB sektor pertanian, perikanan & kehutanan	%	23,88		23,88			26,15		109,51	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertumbuhan Populasi Ternak	%	10	135.417	10	46.161	24.916	1,00	62,88	10,99	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Produksi Hasil Ternak yang dipasarkan	%	100	1.708	100	582	-	100,00	0,00	100,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS	%	< 1	8.464	< 1	2.885	497	< 1	83,84	100,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	%	100	1.279	100	436	1.254	100,00	97,44	100,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%	2,05	64.205	2,05	24.040	11.374	13,25	90,77	108,34	Dinas Pertanian dan Perkebunan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%	96,79	267.361	96,79	83.007	134.056	23,14	96,75	231,40	Dinas Pertanian dan Perkebunan
	Pengembangan industrialisasi pertanian	Unit/ paket	10	-	2		-	2,00		100,00	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pertanaman Yang Aman dari serangan OPT dan DPI	%	96,5	1.229	96,5	434	32	98,02	99,82	101,58	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang meningkat skor kelas kelompok	%	100	18.895	100	6.731	483	5,32	99,72	106,40	Dinas Pertanian dan Perkebunan
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Peningkatan presentase kawasan hutan yang di kelola	%	30	-	41		5.374	41,00	90,03	100,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	Persentase Luas Wilayah Laut dan Pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	%	9,5	15.330	9,5	5.553	4.277	6,28	95,91	139,25	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	256.572	11.895	256.572	9.895	23.022	254.232,78	94,04	99,09	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.243.385	32.729	1.243.385	6.021	4.223	973.529,10	97,08	100,99	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundang-undangan	%	99,93	8.943	99,93	2.129	1.395	100,00	99,90	100,07	Dinas Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	215700	2.897	215700	929	212	169.160,12	99,15	98,95	Dinas Kelautan dan Perikanan
Tujuan 2: Terwujudnya Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)	%	11,92		11,92			13,85		83,81	
Sasaran 1: Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan	%	100		100			100,00		100,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
	Sosial dan Kesehatan (%)										
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	%	85	-	85			96,10		113,06	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	%	100	2.356	100	803	338	76,38	73,14	76,38	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	%	4,5	53.398	4,5	18.207	13.089	100,00	102,61	100,00	Dinas Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	37.284	100	12.713	18.017	100,00	210,78	100,00	Dinas Sosial
Sasaran 2: Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	87,20		87,20			94,70		108,60	
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	%	86,62	771	86,62	255	-	86,62		100,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pasokan Pangan Pokok Strategis	%	100	11.466	100	4.170	876	100	98,27	100,00	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	%	3,77	1.142	4,77	425	100	2,17	99,67	142,44	Dinas Ketahanan Pangan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	%	90,00	1.857	90,00	639	133	84,00	95,02	93,33	Dinas Ketahanan Pangan
Sasaran 3: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	80,59		80,59			83,12		103,14	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan air minum	%	80,59	10.224	80,59	3.950	2.358	83,12	99,47	103,14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 4: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	82,46		82,46			83,12		100,80	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kualitas lingkungan yang memenuhi syarat sesuai standar	%	100	-	100		97.970	90,00	93,83	128,57	Dinas Kesehatan
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Luas kawasan permukiman yang berkualitas	Ha	253391,4	587.291	84.511	167.445	256.389	94,16	61,32	100,05	Dinas Perumahan dan Permukiman
Sasaran 4: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Rasio Elektrifikasi	%	99,99		99,99			99,99		100,00	
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	%	5,57	1.992	5,57	791	146	5,57	95,88	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	%	99,99	5.546	99,99	2.203	212	99,99	97,99	100,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sasaran 4: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH)	%	68,95		68,95			66,31		96,17	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah terdampak bencana dan direlokasi yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi	%	100	7.064	100	2.595	349	80,00	79,75	80,00	Dinas Perumahan dan Permukiman

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
	Rumah tangga menempati hunian layak	%	98,91		98,91						
Sasaran5: Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Inflasi	%	3,0 - 4,0		3,0 - 4,0			3,02		100,67	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Pengawas an Legalitas/ Perizinan Bahan Berbahaya, Minuman Beralkohol dan Barang Pokok Penting	%	80	874	80	305	142	80,00	83,26	100,00	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	4	5.179	4	1.804	709	2,00	95,76	50,00	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	7	4.071	7	1.418	269	20,71	89,76	414,20	Dinas Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Penyelesaian Sengketa	%	90	3.915	90	1.364	1.517	82,98	96,93	92,20	Dinas Perdagangan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	%	100	37.550	100	13.080	4.688	100,00	93,45	100,00	Dinas Perdagangan
Sasaran 6: Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	Rp.000	11.944		11.944			11.095,00		92,89	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100	4.834	100	640	3.701,71	100,00	98,99	100,00	Dinas Perdagangan
Tujuan 3: Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	Pertumbuhan PDRB sektor kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) dalam PDRB (%)	%	4,50		4,50			8,97		199,33	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing pariwisata	Pertambahan Nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	137,24		137,24			128,10		93,34	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	100	16.580	100	6.084	2.674	94,95	37,92	94,95	Dinas Pariwisata
	Persentase Geosite yang tertata	%	50	-	50		-	0,06		0,12	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	orang		7.392		2.705	3.457	2.119.927	88,99	106,00	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	%		607		232	4.059	43,60	99,29	108,43	Dinas Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	%		3.506		1.283	128	83,30	99,19	111,07	Dinas Pariwisata
Tujuan 4: Terwujudnya perindustrian yang unggul	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri (%)	%	9,00		9,00			9,02		100,22	
Sasaran 1: Meningkatnya daya saing industri	Pertambahan Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan (Rp. Miliar)	Rp. Milyar	179,91		179,91			113,70		63,20	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Provinsi	%	100	102.322	100	39.972	5.081	40,00	94,66	40,00	Dinas Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang Meningkat dari Kecil ke Menengah	%	3,55	3.018	3,55	1.179	152	4,84	63,23	136,34	Dinas Perindustrian

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Database IKM Se-NTB dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	1	2.043	1	798	147	0,62	86,76	62,00	Dinas Perindustrian
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Proporsi usaha kecil yang diperkuat menjadi wirausaha	%	6,71	4.807	6,71	1.929	203	6,71	72,92	100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi usaha kecil yang Ditingkatkan manajemen dan kapasitas usahanya	%	56,75	7.967	56,75	3.198	629	56,75	82,47	100,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase Pembinaan Pemuda Berprestasi	%	100	11.297	100	4.339	3.349	15,00	95,10	100,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Persentase Pemuda Peserta Pelatihan Yang Bersertifikat	%	100		100			100,00		100,00	
Sasaran 2: Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17		3,17			2,80		111,67	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang bersertifikat kompetensi	%	18	3.482	18	1.420	813	18,41	99,65	102,27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	%	57,48	3.391	57,48	1.284	468	52,29	99,67	90,97	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang memiliki perangkat hubungan industrial	%	23	1.026	23	388	1.953	24,01	100,00	104,37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase perusahaan yg menerapkan Norma Ketenagakerjaan & K3	%	23	3.466	23	1.313	594	24,83	99,74	107,95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan											
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas	Point	13,25		13,25			9,61		127,50	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
Sasaran 1: Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial	%	0,00		0,00			2,96		29,60	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	%	10	1.527	10	562	742	9,84	74,20	98,40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	%	11,43	11.105	11,43	4.092	3.926	11,07	97,53	96,85	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kesejahteraan Rakyat dari Segi Mental Spiritual, Kebutuhan Dasar dan Non Kebutuhan Dasar	%	100	292.643	100	107.560	69.143	100,00	94,27	100,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat Aktif	%	70	24.519	70	9.635	1.651	51,71	87,92	139,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Bumdes Berprestasi	%	37	-	37			76,98		76,98	
	Persentase Pokja Posyandu aktif	%	100	-	100			83,96		83,96	
	Persentase Posyantek yang aktif	%	64,96	-	64,96			65,81		101,31	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	%	81,82	6.405	81,82	2.257	3.022	83,33	90,15	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	%	100	1.427	100	529	153	100,00	96,02	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah	%	100	720	100	283	400	100,00	96,07	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2023								
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	6,07		6,07			19,44		320,26	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	%	100,00	11.445	100,00	4.648	2.066	100,00	99.40	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100,00		100,00			100,00		100,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	%	86,21	2.437	86,21	898	525	86,90	70,67	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	%	100	5.728	100	2.105	466,48	100,00	99,73	100,00	Biro Hukum
	Persentase Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang Terfasilitasi	%	100		100			100		100,00	
	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	%	100		100			100		100,00	
	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi kepada masyarakat	%	100		100			100		100,00	
	Persentase MoU dan perjanjian kerjasama yang tersusun	%	100		100			100		100,00	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Litigasi	%	100		100			100		100,00	
	Persentase Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	%	100		100			100		100,00	

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Partisipasi Politik Masyarakat (%)	%	85,20		85,20			84,85		99,59	
Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	1,00		1,00			1,70		170,00	
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	%	100	43.528	100	33.721	76.899	85,74	98,94	104,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang aktif	%	83,01	1.631	83,01	601	1.469	80,94	80,94	115,63	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tujuan 1: Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Point	61,4		61,4			54,23		88,32	
Sasaran 4: Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	%	20,47		20,47			27,62		134,93	
	Cakupan Kabupaten/ Kota Yang Mendapat Predikat Kabupaten/ Kota Layak Anak	%	100		100			100,00		100,00	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase PD yang menerapkan PPRG	%	65,28	6.231	65,28	2.440	438	100,00	76,96	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif	%	83,07	2.837	83,07	1.111	251	100,00	94,96	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi/Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dalam RPJMD		Capaian Kinerja Sampai Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2023						
			Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	Kinerja	% Keu	% Kinerja	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Ketahanan Keluarga	%	15	1.341	5,5	525	63		86,34	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Gender		1	201	1	91	17	1,00	94,61	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	42,00	1.491	100,00	618	359	100,00	99,64	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA	%					-				
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	%		2.124		878	298	100,00	87,69	100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Komprehensif	%					-	100,00	#DIV/0!	100,00	

Sementara itu, program unggulan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, terdapat 75 Program Unggulan yang dipetakan kedalam 6 Misi Pembangunan Daerah. Adapun pencapaian Program Unggulan tersebut dapat di deskripsikan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan ketangguhan menghadapi resiko bencana, terdapat beberapa program unggulan yaitu Desa Tangguh Bencana (DESTANA), Sekolah Aman Bencana, dan Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SI-AGA). Sampai 2023 telah terbentuk 434 DESTANA, 102 Sekolah/ Satuan Pendidikan, dan 1 Aplikasi Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana (SI-AGA)
2. Untuk mewujudkan Pembangunan Konektivitas & Aksesibilitas Wilayah terdapat beberapa program unggulan yaitu NTB Terkoneksi, Percepatan Jalan Mantap, Air Bersih/Air Minum untuk Semua, Irigasi Cukup, Nusa Terang Benderang, dan SPAM Regional. Adapun capaiannya sampai tahun 2023 untuk NTB terkoneksi telah terbentuk konektivitas transportasi publik mencapai 93,14% yang mencakup konektivitas Udara, Darat dan laut. Tingkat kemantapan jalan telah mencapai 79,94%, sedangkan akses terhadap air minum untuk semua telah mencapai 83,12%, walaupun SPAM Regional belum dapat diwujudkan. Sementara itu, untuk Irigasi Cukup dengan tingkat kemantapan jaringan irigasi mencapai 56,87%, sedangkan Nusa Terang Benderang yang diukur dengan rasio elektrifikasi telah mencapai 99,99%.
3. Untuk mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, didukung dengan beberapa Program Unggulan yaitu SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), eNTeBe Plan/SIPD, NTB SDG's Center, Research Based Policy, NTB Satu Peta, NTB Satu Data, NTB Care, e-Pendapatan, NTB WTP, SAKIP Level A, Agen Perubahan, dan Manajemen Talenta. Berdasarkan capaian sampai 2023, penerapan SPBE NTB telah mencapai level 3,4 atau kategori Baik, eNTeBe Plan/SIPD telah berhasil mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, NTB SDG's Center telah berhasil mendorong penerapan SDG's dengan tingkat capaian sebesar 56,36%. Penyelenggaraan NTB Satu Data dengan skor 3,1 atau kategori baik, NTB Care telah berhasil

menyelesaikan berbagai pengaduan masyarakat dengan cepat dan tepat, e-Pendapatan telah berhasil menaikkan kontribusi PAD dalam APBD yang mencapai 48,32%. NTB WTP dengan keberhasilan mempertahankan Opini BPK WTP sebanyak 13 kali berturut-turut. Sedangkan SAKIP level A belum dapat diwujudkan tetapi akuntabilitas kinerja Pemprov NTB berhasil ditingkatkan dari tahun ke tahun, dari level B ke BB dengan skor terakhir mencapai 73,48.

4. Untuk mewujudkan Pengelolaan Kesehatan untuk Daya Saing SDM, terdapat beberapa program unggulan yaitu Revitalisasi Posyandu, NTB Berolahraga, Generasi Emas NTB, Jamban Keluarga/Stop BABS, dan Rumah Layak Huni. Sampai tahun 2023 telah berhasil merevitalisasi posyandu menjadi Posyandu Keluarga sebanyak 7.676 Posyandu (100%), Jamban Keluarga/Stop BABS telah mencapai 83,12%, sedangkan rumah layak huni telah mencapai 66,31%.
5. Untuk mewujudkan Pengelolaan Pendidikan untuk Daya Saing SDM, terdapat beberapa program unggulan yaitu 1000 Cendikia/Beasiswa, Re-Engineering SMK, PAUD Holistic Integratif, Literasi Digital, Rumah Bahasa, NTB Juara, dan Ayo Bercita – Cita. Sampai 2023 pemerintah provinsi telah berhasil mendorong penyediaan beasiswa untuk mahasiswa dalam negeri mencapai 7.331 orang sedangkan beasiswa Luar Negeri mencapai 756 orang yang tersebar di berbagai negara asia dan eropa. Untuk memenuhi link dan mach lulusan SMK, dilakukan re-engineering SMK melalui revitalisasi yang mencakup Revitalisasi kurikulum dan core bisnis SMK, Revitalisasi sertifikasi (LSP-P1, P2, P3), Revitalisasi GTK, Revitalisasi sarana dan prasarana, Revitalisasi Kerjasama IDUKA, dan Revitalisasi tata Kelola. Telah berhasil membentuk Rumah Bahasa sebagai pusat pengembangan pendidikan (Bahasa), serta terus mendorong untuk memenuhi NTB Juara dengan Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional yang mencapai 140 medali.
6. Untuk mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Bersih & Berkelanjutan, terdapat beberapa program unggulan yaitu NTB Hijau, NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah, Taman Asri/Indah, dan Tata Ruang Berkelanjutan. Sampai tahun 2023, pengelolaan persampahan di NTB

telah mencapai 65,29% terdiri dari sampah yang telah tertangani mencapai 49,64% sedangkan sampah yang berhasil dikurangi sebesar 15,65%. Adapun terkait dengan tataruang telah berhasil menyelesaikan penyusunan revisi RTRW dengan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024.

7. Untuk mewujudkan Pertanian/Agribisnis dan Investasi Progresif, terdapat beberapa program unggulan yaitu Pertanian Lestari/Modern, Bumdes Maju/Mahadesa, Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan, Kampung Unggas, Budidaya Lobster, Kawasan Rumah Pangan Lestari/Pekarangan Pangan Lestari (KRPL/P2L), Mall Investasi dan Pelayanan Publik, Ramah Investasi/Online Services, dan Revitalisasi BLK. Sampai tahun 2023 dengan Pertanian Lestari/Modern telah berhasil meningkatkan produksi pertanian di NTB sebesar 21,78%. Mendorong Bumdes Maju/Mahadesa berprestasi telah mencapai 51,71%. Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan mencapai 12,91%, telah berhasil membentuk Mall Pelayanan Publik sebanyak 3 Unit, dan melakukan revitalisasi BLK melalui Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePADU) untuk mengurangi angka pengangguran dan berhasil turun menjadi 2,80%.
8. Untuk mewujudkan Pariwisata Andalan, dengan beberapa program unggulan yaitu KEK Mandalika, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau kecil, Wisata Halal dan Sehat, Penataan 99 Desa Wisata, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora, dan Kawasan Samota. Sampai tahun 2023 telah berhasil menata KEK Mandalika dan daerah penyangga sekitarnya, Penataan 3 Gili KLU dan Pulau-pulau kecil dengan pembentukan unit pelaksana teknis, serta terus mengembangkan dan mempertahankan status geopark dunia Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora dan penataan Kawasan Samota.
9. Untuk mewujudkan Industrialisasi Unggul, terdapat beberapa program unggulan yaitu Industri Peralatan dan Permesinan, Industri Peternakan/Pakan Ternak, Industri Motor Listrik, Industri Pangan dan Holtikultura, Industri Perkebunan, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Industri Perikanan: Garam, Tepung Ikan, Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya, Rumah Kemasan, Industri Pakaian: Busana Muslim,

Tenun Ikat, Science Technology and Industrial Park (STIPark), Koperasi Berprestasi, UMKM Bersaing, Bela Beli Produk Lokal/NTB Mall. Dengan industrialisasi, telah berhasil menumbuhkembangkan industri di NTB hingga mencapai 9,02% dengan peningkatan nilai tambah mencapai 117,3 miliar, sementara industri smelter akan mulai beroperasi tahun 2024. Telah berhasil membentuk Science Technology and Industrial Park (STIPark), serta untuk meningkatkan daya beli produk lokal, telah dibentuk NTB mall dalam bentuk unit pelaksana teknis.

10. Untuk Meraih Masyarakat Madani (Bahagia), terdapat beberapa program unggulan yaitu Kampung Madani dan Sehat, Mawar Emas (Melawan Rentenir Berbasis Masjid), Bale Mediasi, Desa Bersinar, Kampung Digital, Kota Layak Anak, Ramah Difabel, Revitalisasi Islamic Center, dan Sekolah Perjumpaan. Sampai tahun 2023, Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau disingkat Mawar Emas menjadi gerakan pelopor pertama di Indonesia untuk membantu UKM dan pedagang-pedagang kecil yang selama ini lebih nyaman dan lebih mudah meminjam ke rentenir dengan bunga tinggi. Untuk mengurangi dan memerangi Narkoba, telah terbentuk Desa bersinar (bersih Narkoba) yang telah mencapai 34 desa. Kab/Kota layak anak 100% (10 Kab/Kota), meningkatkan ramah difabel serta melakukan revitalisasi Islamic center akibat gempa 2018. Adapun Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter mencapai 50%.

6.4. FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama periode 2019-2023 didukung oleh beberapa faktor pendorong antara lain:

1. Adanya dukungan dari pemerintahan pusat yang besar terutama menyelesaikan pembangunan Kawasan ekonomi khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta beberapa program strategis lainnya di NTB
2. Adanya dukungan pemerintah semua Kabupaten/Kota, NGO maupun perguruan tinggi untuk melaksanakan berbagai program prioritas dan unggulan NTB antara lain melalui pembentukan DESTANA, revitalisasi

- posyandu, akselerasi penurunan kemiskinan dan stunting, pembentukan Desa Wisata (DEWI), Zero Waste, dan beberapa program unggulan lainnya
3. Semakin berkembangnya destinasi-destinasi pariwisata yang baru melalui pembentukan desa wisata sebagai penyangga Kawasan ekonomi khusus

Meskipun target-target pembangunan berhasil diwujudkan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang ikut mempengaruhi pencapaian tersebut antara lain:

1. Adanya bencana gempa bumi dipertengahan tahun 2018, sehingga ditahun-tahun awal periode 2019-2023 fokus pada pemulihan pasca gempa bumi. Belum selesai pemulihan pasca gempa muncul bencana sosial yaitu covid-19 selama tahun 2020-2022
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga BBM sehingga meningkatkan jumlah penduduk miskin serta kenaikan harga barang dan jasa akibat inflasi
3. Adanya kebijakan penghentian sementara ijin ekspor tambang sehingga mempengaruhi fluktuasinya pertumbuhan ekonomi NTB
4. Masih rendahnya peran serta dan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan bebas sampah.
5. Tingginya jumlah penduduk NTB dengan kualifikasi tingkat pendidikan yang rendah terutama penduduk yang sudah melewati usia sekolah
6. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektoral non formal dengan kualitas dan kompetensi yang rendah
7. Dukungan moda transportasi yang rendah mempengaruhi konektivitas antar wilayah
8. Angka kunjungan wisatawan ke NTB belum tumbuh secara signifikan meskipun berbagai Kawasan strategis telah dikembangkan dan event-event internasional diselenggarakan

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian terhadap target-target pembangunan daerah selama kurun waktu 2019-2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian akhir terhadap tujuan pembangunan daerah dengan 14 indikator kinerja sesuai yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023 sebesar 50% atau terdapat 50% tidak memenuhi target. Adapun yang tidak tercapai sesuai target akhir adalah Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, Neraca pengelolaan sampah, Indeks Daya Beli, Tingkat Kemiskinan (%), Partisipasi politik masyarakat, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Capaian akhir sasaran pembangunan daerah yang memenuhi bahkan melampaui target akhir RPJMD 2019-2023 sebesar 70,27%. Dari 26 sasaran dengan 37 indikator kinerja, masih terdapat 29,73% atau 11 indikator yang tidak memenuhi target yaitu persentase kemantapan jalan, cakupan rumah layak huni (RLH), indeks kualitas tutupan lahan, pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum), pengeluaran per kapita, nilai SAKIP, indeks pelayanan publik, persentase penanganan sampah, pertambahan nilai PDRB sektor industri pengolahan, persentase pengurangan sampah, serta persentase penurunan konflik social
3. Capaian akhir berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada aspek kesejahteraan dengan tingkat capain sebesar 60,0%, pada aspek daya saing dengan tingkat capaian sebesar 42,86%, sedangkan aspek pelayanan umum dengan tingkat capaian 63,07%. Terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi ekspetasi diantaranya tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tingkat ketimpangan pengeluaran semakin meningkat, indeks pelayanan publik, Indeks pemberdayaan gender, dan Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan

4. Rata-rata capaian program prioritas terhadap target akhir pada tahun 2023 mencapai 98,03% atau kategori sangat tinggi. Meskipun rata-rata capaian program sangat tinggi, namun masih terdapat beberapa program prioritas yang belum tuntas atau belum memenuhi sesuai target RPJMD antara lain Program Penyelenggaraan Jalan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pengelolaan Hutan, Program Pengelolaan Persampahan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, serta Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

4.2. REKOMENDASI

Mengacu pada kesimpulan dari hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian terhadap target-target pembangunan daerah selama kurun waktu 2019-2023, maka dapat direkomendasikan beberapa hal untuk menjadi atensi dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya yaitu:

1. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang belum sesuai ekspektasi pada periode 2019-2023 perlu untuk dilanjutkan pada periode perencanaan berikutnya antara lain Indeks Risiko Bencana, Indeks Reformasi Birokrasi, Neraca pengelolaan sampah, Indeks Daya Beli, Tingkat Kemiskinan (%), Partisipasi politik masyarakat, serta Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pada level sasaran antara lain persentase kemantapan jalan, cakupan rumah layak huni (RLH), indeks kualitas tutupan lahan, pertambahan nilai PDRB sektor yang terkait kepariwisataan (penyediaan akomodasi dan makan minum), pengeluaran per kapita, nilai SAKIP, indeks pelayanan publik, persentase penanganan sampah, pertambahan nilai PDRB sektor industri pengolahan, persentase pengurangan sampah, serta persentase penurunan konflik social. Hal yang sama pada indikator kinerja daerah pada semua aspek baik aspek kesejahteraan aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum dengan tingkat capaian yang belum optimal sehingga indikator kinerja yang belum tercapat perlu untuk dilanjutkan pada periode perencanaan berikutnya

2. Pencapaian program prioritas dan program unggulan sangat signifikan, sehingga perlu dilanjutkan jika bersesuaian dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode perencanaan berikutnya, sedangkan program-program yang belum memenuhi target perlu ditingkatkan terutama pada basis intervensinya yang diharapkan dapat menukik langsung terhadap pencapaian program tersebut.